MILIK DEPDIKBUD
TIDAK DIPERDAGANGKAN

# Sejarah Kebangkitan Nasional Daerah Riau

959.814
SEJ

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

PERPUSTAKAAN
SEKRETARIAT DITJENBUD
No. INDUK 1433
TGL. CATAT. 27 AUG 1993

# Sejarah Kebangkitan Nasional Daerah Riau

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROYEK INVENTARISASI DAN DOKUMENTASI KEBUDAYAAN DAERAH
1982 / 1983

**TIM PENULIS**

1. *Dra. Marleily Rahim Asmuni*
2. *Drs. Anwar Syair.*
3. *Drs. Umar Amin.*
4. *Drs. Ahmad Yusuf*
5. *M.A. Effendi, B.A.*
6. *Drs. Suwardi Ms.*

**PENYUNTING**

1. *Masykuri.*
2. *Sutrisno Kutoyo.*

# *P R A K A T A*

*Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah yang bertujuan mengumpulkan data dan menginventarisasi kebudayaan daerah dalam beberapa aspek kebudayaan, sudah sampai pada tahap penerbitan hasil inventarisasi. Pekerjaan ini bermula dari pengumpulan data yang disusun dan ditulis oleh Tim Daerah berbentuk draft, kemudian dievaluasi dan disunting oleh Tim Pusat, sehingga siap untuk dicetak diterbitkan.*

*Pengumpulan data dan Informasi kebudayaan Daerah Riau ini, sebagaimana yang dilakukan di daerah lain di nusantara, dalam lingkup yang lebih luas berguna untuk bahan penyusunan kebijaksanaan pengembangan kebudayaan nasional, penelitian dan untuk masyarakat. Sebagai konsumsi masyarakat, dikandung harapan untuk memperluas wawasan budaya dan peningkatan apresiasi.*

*Tentu saja dalam proses kehadirannya telah berperan serta beberapa orang, baik dalam kesatuan tim, lembaga pemerintahan maupun cerdik pandai dan usahawan. Kepada mereka yang telah dengan ikhlas melibatkan kearifannya, dengan sumbangan pikiran dan tenaga, patut kita sampaikan terima kasih dan penghargaan. Tidak disebutkannya satu persatu nama dan jabatan pameran serta di atas, jauh dari maksud kami untuk mengucilkan arti dari sumbangan itu.*

*Kemudian sebagai tambahan informasi bagi pembaca, patutt pula kami lengkapkan penjelasan lain, yaitu penyusunan draft adalah kegiatan proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah Tahun 1978/1979, sedangkan untuk penerbitannya dialokasikan dana dari proyek tahun anggaran 1982/1983.*

*Atas kehadiran buku ini yang belum sempurna, baik dalam isi maupun pewajahan sehingga tujuan tersebut di atas belum dipenuhinya, kearifan pembaca untuk memaafkan masih kami tuntut dan harapkan. Disamping itu, untuk penyempurnaan selanjutnya berarti sekali kritik dan tegur sapa pembaca.*

*Semoga buku ini memenuhi harapan kita bersama.*

*Terima kasih.*

*Pekanbaru, 1 Oktober 1983*

*Pemimpin Proyek,*

**N u r s y a m. S**

NIP. 130118603

# *KATA PENGANTAR*

*Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah Riau Tahun 1978/1979 merupakan proyek lanjutan dari tahun sebelumnya dan diwujudkan dengan Daftar Isian Proyek (D I P) tanggal 17 Maret 1798 Nomor 68/XXIII/3/1978.*

*Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah Riau Tahun 1978/1979 ini mencakup beberapa aspek yang diteliti dan dicatat secara tematis, diantaranya aspek : "Sejarah Kebangkitan Nasional Daerah Riau".*

*Proyek bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi kebudayaan yang berguna untuk keperluan pelaksanaan kebijaksanaan kebudayaan, penelitian dan untuk masyarakat.*

*Untuk pelaksanaannya di Daerah Riau telah disusun suatu Tim yang terdiri dari tenaga pengajar Unversitas Riau, petugas teknis pada Kantor Wilayah Departemen Dikbud Propinsi Riau, serta tokoh budayawan Daerah Riau.*

*Pembentukan Tim tersebut dituangkan dalam surat Keputusan Pemimpin Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah Riau tanggal 7 Juli masing-masing aspek terdiri dari Penanggung Jawab Aspek dan anggota-anggota. Untuk aspek Sejarah Kebangkitan Nasional Daerah Riau ini, personalian Tim adalah seperti tertera dibawah ini.*

| | | |
|---|---|---|
| *Penanggung jawab* | : | *Dra. Marleily Rahim Asmuni*<br>*Dosen Universitas Riau* |
| *Anggota-Anggota* | : | *Drs. Anwar Syair*<br>*Dosen Universitas Riau* |
| | | *Drs. Umar Amin*<br>*Dosen Universitas Riau* |
| | | *Drs. Ahmad Yusuf*<br>*Dosen Universitas Riau* |
| | | *Drs. Suwardi MS*<br>*Dosen Universitas Riau* |
| | | *M.A. Effendy, B.A.*<br>*Kepala Bidang Permuseumam, Sejarah dan Kepurbakalaan.* |

*Pemimpin Proyek memintakan kepada masing-masing Tim untuk mengajukan perencanaan dan penawarannya dalam pelaksanaan proyek ini yang dikoordinasi oleh Masyarakat Sejarawan Indonesia Daerah Riau.*

*Setelah rencana masing-masing Tim disetujui oleh Pemimpin Proyek, maka dibuatlah Naskah Perjanjian Kerja untuk masing-masing aspek.*

*Selesai penanda tanganan Naskah Perjanjian Kerja pada tanggal 28 Juli 1978, masing-masing Tim mengadakan persiapan penelitian.*

*Persiapan selesai diadakan sekitar akhir Agustus 1978 termasuk penyelenggaraan penataran tanaga peneliti. Pada bulan September-Oktober 1978 diadakan pengumpulan data dan informasi. Dalam pengumpulan data ini masing-masing Tim telah mengadakan observasi, wawancara di daerah Riau dan di luar daerah, sesuai dengan kebutuhan masing-masing aspek.*

*Dalam penelitian ditemui beberapa hambatan, antara lain keadaan geografis daerah Riau yang sangat luas, menyebabkan ada daerah-daerah yang belum terjangkau secara khusus. Namun secara umum dan maksimal dalam penelitian diusahakan menyimpulkan segala informasi dan data yang berkaitan dengan masing-masing aspek tersebut. Mudah-mudahan berdasarkan data dan informasi yang dikumpulkan itu telah berhasil disusun laporan penelitian sebagai naskah yang terdiri dari :*

1. *Sejarah Kebangkitan Nasional Daerah Riau*
2. *Adat Upacara Perkawinan Daerah Riau*
3. *Tokoh Utama Metologis dan Lengendaris Daerah Riau*
4. *Pengaruh Migrasi Penduduk terhadap perkembangan Kebudayaan daerah Riau.*
5. *Ensiklopedi Musik dan Tari Daerah Riau (lanjutan)*

*Hasil ini kami laporkan pada rapat-rapat lengkap Tim Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah Riau dalam beberapa kali pertemuan.*

*Dalam penelitian dan pencatatan ini telah banyak bantuan dan sumbangan yang diberikan oleh berbagai pihak, terutama pejabat daerah, informan, tokoh-tokoh masyarakat, Pimpinan Kantor Wilayah Departemen Dikbud Propinsi Riau, Pimpinan Universitas Riau, baik langsung maupun tidak langsung dengan ini kami menyatakan penghargaan setingi-tinginya dan terima kasih yang sebanyak-banyaknya.*

*Demikian pula penghargaan yang tak terhingga dan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada semua anggota dan ketua masing-masing aspek dari Proyek penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah ini, berkat kerja sama dan bantuan didedikasikan, maka selesailah naskah ini seperti adanya sekarang ini.*

*Sudah barang tentu dalam naskah ini terdapat kekurangan disana sini harapan kami semoga setiap orang yang berminat dapat kiranya menyampaikan kritik demi penyempurnaan naskah ini.*

*Akhirnya kami sampaikan harapan semoga naskah ini bermanfaat untuk pembinaan dan pengembangan kebudayaan khususnya serta pembinaan kesatuan bangsa indonesia umumnya.*

*Pekanbaru, 31 Desember 1978*

**Drs. SUWARDI. MS**
Pemimpin Proyek

# *P E N G A N T A R*

*Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah, Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Direktorat Jenderal Kebudayaan telah menghasilkan beberapa macam naskah kebudayaan daerah diantaranya ialah naskah : Sejarah Kebangkitan Nasional Daerah Riau.*

*Kami menyadari bahwa naskah ini belumlah merupakan suatu hasil penelitian yang mendalam, tetapi baru pada tahap pencatatan, yang diharapkan dapat disempurnakan pada waktu-waktu selanjutnya.*

*Berhasilnya usaha ini berkat kerjasama yang baik antara Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional dengan Pimpinan dan Staf Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah, Pemerintah Daerah, Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Perguruan Tinggi, Leknas/LIPI dan tenaga ahli perorangan di daerah.*

*Oleh karena itu dengan selesainya naskah ini, maka kepada semua pihak yang tersebut di atas kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih.*

*Demikian pula kepada tim naskah ini di daerah yang terdiri dari : Dra. Marleily Rahim Asmuni, Drs. Anwar Syair, Drs. Ahmad Yusuf, Drs. Umar Amin, M.A.Effendy,BA. dan tim penyempurnaan naskah di pusat yang terdiri dari : Masykuri, Sutrisno Kutayo.*

*Harapan kami, terbitan ini ada manfaatnya.*

*Jakarta, 27 Desember 1982*

*Pemimpin Proyek,*

**Bambang Suwondo**

NIP. 130117589

# *Kata Sambutan*
# *Kepala Kantor Wilayah*
# *Departemen Dikbud Propinsi Riau*

*Pengembangan kebudayaan nasional yang utuh, dilaksanakan sesuai dengan nilai-nilai sebagaimana tersimpul dalam sila-sila Pancasila dan gagasan yang tercermin dalam UUD 1945 atas dasar kebudayaan-kebudayaan daerah.*

*Oleh karenanya, Inventarisasi dan Dokumentasi kebudayaan Daerah Riau dilaksanakan dalam rangka pengembangan kebudayaan nasional itu. Disamping itu, tujuan lain yang ingin dicapai ialah untuk penyediaan data dan informasi kebudayaan untuk keperluan pelaksanaan penentuan kebijaksanaan kebudayaan, penelitian dan masyarakat.*

*Setelah melalui suatu proses evaluasi dan editing, naskah hasil inventarisasi itu diterbitkan dalam bentuk buku. Tentu saja dengan diterbitkannya buku ini, dikandung keinginan untuk menempatkannya sebagai salah satu unsur yang mendukung perkembangan kebudayaan nasional. Sebagai suatu hasil inventarisasi, tindak lanjut dalam penelitian akan merupakan pula usaha penyempurnaan yang berguna bagi kepentingan ilmu yang berkadar ilmiah. Kemudian, sasaran ganda yang dapat pula dicapai ialah bahan apresiasif bagi masyarakat pendukungnya dan bahan pengenalan yang dapat memperkokoh jiwa kesatuan nasional bagi kita bersama. Perlambang kebhinnekaan kebudayaan kita yang beragam.*

*Kehadiran buku ini di tengah kita, telah melibatkan banyak pihak yang berpartisipasi. Dimulai dari pencatatan data oleh Tim Daerah yang terdiri dari para Dosen Universitas Riau, Seniman dan tenaga teras dari Kantor Wilayah Departemen Dikbud Propinsi Riau sendiri, berlanjut evaluasi dan editing oleh Tim Pusat, disamping beberapa kemudahan yang diperdapat dari Pemerintah Daerah pada waktu pengumpulan data dan informasi.*

*Atas segala bantuan dan partisipasi itu, kami sampaikan penghargaan dan terima kasih kami.*

*Semoga kehadiran buku ini memenuhi fungsinya dan bermanfaaat bagi kita semua.*

*Terima kasih.*

*Pekanbaru, 1 Oktober 1983*

*Kepala Kantor Wilayah*
*Departemen Dikbud Propinsi Riau*

**Drs. Soejatta**
**NIP. 130430070**

# DAFTAR ISI


| | Halaman |
|---|---|
| Prakata | I |
| Kata Pengantar | II |
| Pengantar | V |
| Kata Sambutan | VI |
| Daftar Isi | VII |
| **BAB I PENDAHULUAN** | 1 |
| **A. Tujuan Penelitian** | 4 |
| **B. Masalah** | 5 |
| **C. Ruang Lingkup** | 6 |
| **D. Pertanggungjawaban Ilmiah Prosedur Penelitian** | 7 |
| **E. Hasil Akhir** | 8 |
| **BAB II KEADAAN DAERAH PADA AKHIR ABAD KE-19** | 11 |
| **A. Pemerintahan** | 11 |
| **B. Sosial Budaya** | 12 |
| **1. Pendidikan** | 12 |
| **2. Seni Budaya** | 13 |
| **3. Alam Pemikiran dan Kepercayaan** | 13 |
| **C. Kehidupan Ekonomi** | 14 |
| **BAB III KEADAAN DAERAH RIAU DARI TAHUN + 1900 – 1928** | 19 |
| **A. Pengaruh Politik Kolonial Belanda dan Desentralisasi** | 19 |
| **1. Kerajaan Melayu Riau-Lingga** | 21 |
| **2. Kerajaan Siak Sri Inderapura** | 22 |
| **3. Kerajaan-kerajaan di Rokan** | 25 |
| **B. Kegiatan Masyarakat yang Relevan dengan Atau Pun yang Merupakan Embrio dari Proses Kebangkitan Nasional** | 30 |
| **1. Rusydiah Club** | 31 |
| **2. Sultan Syarif Kasim** | 38 |
| **3. Sultan Zainal Mangkat Madiun** | 38 |

C. Interaksi di Daerah dengan Kegiatan Partai dan Organisasi ..... 40
1. Politik ..... 40
2. Wanita ..... 43
3. Agama ..... 44
4. Pendidikan ..... 45
5. Seni Budaya ..... 49
6. Kepemudaan dan Kepanduan ..... 51
7. Pers dan Koperasi ..... 51
D. Keadaan di Sekitar Perang Dunia I (1914–1918) 53
E. Perjuangan di Daerah ..... 54

BAB IV KEADAAN DI DAERAH RIAU DARI TAHUN 1942–1918 ..... 57
A. Pengaruh Politik Pemerintah Hindia Belanda Pada Tahun + 1930 ..... 57
1. Politik Keras Terhadap Gerakan Non-Koperasi 59
2. Undang-undang Sekolah Swasta (Wilde Scholen Ordonnantie) ..... 62
B. Depresi Ekonomi di Daerah Riau ..... 62
C. Interaksi terhadap Kegiatan Partai dan organisasi 66
D. Keadaan Menjelang Keruntuhan Pemerintahan Hindia Belanda dan Kedatangan Tentang Jepang 69
1. Sikap Pemerintah Hindia Belanda ..... 69
2. Keadaan Masyarakat ..... 72
3. Sikap Masyarakat terhadap Pemerintah Hindia Belanda ..... 77
4. Keadaan Pemerintah Hindia Belanda di Daerah pada saat terakhir ..... 78
E. Kedatangan Pasukan Pendudukan Jepang ..... 80
1. Propaganda Jepang yang Terasa di daerah Riau 82
2. Waktu Kedatangan Pasukan Jepang ..... 84
3. Sikap Jepang terhadap Aparatur Pemerintah Hindia Belanda ..... 86
4. Sikap Jepang terhadap Bangsa Indonesia ... 90
5. Sikap Bangsa Indoesia terhadap Jepang .... 94

BAB V PENUTUP ..... 97
Daftar Bacaan ..... 103
Daftar Kata ..... 107
Daftar Informan ..... 111
P e t a ..... 127

# BAB I
# PENDAHULUAN

Dalam pendahuluan ini akan diuraikan pertama-tama latar belakang perkembangan administrasi wilayah Riau sampai menjadi daerah Tingkat I Riau sekarang ini. Dengan mengetahui latar belakang perkembangan tersebut akan tergambar dengan nyata tentang segi tata pemerintahan, sosial budaya serta kaitan administratif dengan daerah lain. Untuk mendapatkan gambaran yang jelas, maka perkembangannya akan diungkapkan semenjak awal daerah ini menjadi bagian dari kerajaan besar Sriwijaya.

Pada zaman Sriwijaya yang berlangsung dari abad ke-7 sampai abad ke-14 Masehi seluruh Daerah Tingkat I Riau sekarang ini termasuk ke dalam wilayah kekuasaan kerajaan besar itu. Tatkala kekuasaan Sriwijaya sudah mulai menurun, maka timbullah kerajaan-kerajaan di Riau yang kian lama kian berkembang seperti kerajaan Siak Gasib, Bintan, Indragiri dan sebagainya. Untuk beberapa waktu mereka mengakui kekuasaan Mojopahit yang kuat. Tetapi setelah kerajaan Malaka berkembang dengan pesat dan merupakan kekuasaan politik dan sosial budaya di Asia Tenggara (±1400 M - 1511 M), maka kerajaan-kerajaan yang disebutkan tadi menjadi bahagian dari kerajaan Melaka

Pada masa Melaka ini kerajaan yang ada di "Riau" dibina sedemikian rupa dengan menjalin hubungan keluarga sehigga selama satu abad sejarah Melaka itu tidak pernah terjadi pemisahan diri dengan kerajaan-kerajaan yang ada di Riau. Gasib, Indragiri, Bintan sebagai bagian (federasi) dari Melaka tumbuh dengan pesat karena majunya perdagangan di Selat Melaka.

Pada akhir abad ke-15 seperti diketahui, orang Eropa terutama Portugis dan Spanyol telah mulai menjajahi dunia dengan semboyan : *Gold, Gospel and Glory,* merebut semua daerah yang mereka temui. Pada tahun 1511 orang Portugis menghadapi kekuasaan Melaka dan setelah mendapatkan perlawanan hebat, lama dan mengorbankan banyak kapal dan prajurit baru kota Melaka dapat mereka rebut, namun itu belum berarti orang Portugis dapat menguasai rakyat Melaka.

Sultan Mahmud Syah I dan sekalian kaum bangsawan dan prajurit serta rakyat mundur dan kemudian membuat benteng-benteng dan menjadikan pulau Bintan "Kepulauan Riau" sebagai pusat kerajaan. Mulai saat inilah munculnya istilah Kerajaan Melayu Riau yang mewarisi kekuasaan kerajaan Melaka. Daerah kekuasaannya yang ada di "Riau" yaitu Indragiri, Siak Gasib, Lingga, Kampar, dan Rokan tetap

setia kepada Sultan Mahmud Syah I. Jadi semua daerah "Riau" merupakan wilayah kerajaan Melayu Riau.

Pada tahun 1641 Portugis dapat diusir dari Melaka dengan demikian kerajaan Melayu Riau dapat dengan bebas menguasai dan memerintah di Semenanjung Tanah Melayu dan daerah-daerah lainnya di Riau sementara persahabatan dengan orang Belanda berjalan dengan penuh ketegangan.

Pada tahun 1669 kerajaan Indragiri melepaskan diri dari kerajaan Melayu Riau dan pada tahun 1721 kerajaan Siak di bawah Raja Kecil melepaskan diri pula. Pada tanggal 17 Maret 1824 diadakan Traktat London antara Inggeris dan Belanda. Traktat itu membagi dua kerajaan Melayu Riau yaitu Tanah Semenanjung dan Singapura menjadi daerah pengaruh Inggris, sedangkan daerah dibagian selatan, termasuk daerah Kerajaan Melayu Riau masuk pengaruh Belanda. maka dengan demikian seluruh daerah Riau sekarang ini pada waktu itu ada beberapa kerajaan yang berdiri sendiri, di antaranya yang besar adalah:

Kerajaan Melayu Riau,
Kerajaan Siak,
Kerajaan Indragiri.

Dengan perjanjian-perjanjian yang diadakan oleh masing-masing kerajaan itu dengan Belanda yaitu Kerajaan Melayu Riau tahun 1784, dan seterusnya Kerajaan Siak tahun 1858, Kerajaan Indragiri 1838, maka kekuasaan Belanda menjadi kuat. Selanjutnya cengkeraman Belanda semakin kuat dengan diadakanya perjanjian *(contract)*, baik berupa *Lange Contract* maupun *Korte Verklaring* dengan semua kerajaan yang ada di Riau. Dan dengan begitu Belanda mengatur administrasi pemerintahan sendiri. Walaupun begitu Belanda masih memberikan hak untuk memerintah kepada Sultan dan Raja-raja untuk daerah kerajaannya masing-masing dibawah pengawasan Belanda. Jadi dengan sistim itu terdapat pula dua tata pembagian administrasi. Kerajaan mengadakan pembagian daerah administrasinya sesuai dengan keadaan daerah dan Belanda mengadakan pula pembagian daerah administrasinya sesuai dengan kepentingan tugas pengawasannya kepada daerah kerajaan.

Daerah Riau sekarang ini pada waktu itu terbagi dalam tiga daerah administrasi pemerintahan Belanda yaitu :

---

1. Daerah *Residentie Riouw en Onderho Aigheden* dengan ibu kota Tanjungpinang meliputi : *Afdeeling Riouw Archipel* dan *Afdeeling* Indragiri.

2. Afdeeling Bengkalis dengan ibu kota Bengkalis yang menjadi bagian dari *gouvernement Sumatra's Oostkust* dengan ibu kota Medan.
3. *Onderafdeeling* Bangkinang merupakan bagian dari Afdeeling Lima Puluh Koto termasuk *Gouvernement Sumatra's West kust* yang beribu kota Padang.

Dengan demikian terlibat beberapa bagian dari daerah Riau sesuai dengan pembagian administrasi Pemerintahan Belanda, pernah dimasukkan ke dalam daerah lain yaitu : *Afdeeling* Bengkalis masuk *Residensi* Sumatera Timur, *Afdeeling Bangkinang* masuk Pemerintahan Sumatera Barat.

Daerah administrasi tersebut tidak mengalami perubahan sampai tahun 1942.

Ketika Jepang menguasai Indonesia, maka pemerintah Sultan dan Raja-raja di bekukan. Riau Daratan beserta pulau-pulau yang ada di pesisir dijadikan satu keresidenan yang dalam istilah Jepang disebut *Riau Syu*. Sedangkan *Afdeeling Riouw (Riouw Archipel)* dimasukkan ke dalam administrasi pemerintahan militer Jepang di Singapura atau *Syonanto*.

Setelah Indonesia merdeka, pada tanggal 19 Agustus 1945 PPKI dalam musyawarahnya membagi wilayah Republik Indonesia 8 Propinsi. Sumatera menjadi satu propinsi dan Riau yang terdiri dari seluruh *Riau Syu* serta *Riau Archipel* menjadi satu keresidenan, yang terdiri dari empat kabupaten, yaitu :

1. Kabupaten Pekanbaru.
2. Kabupaten Bengkalis.
3. Kabupaten Indragiri, dan
4. Kabupaten Kepulauan Riau.

Setelah kedaulatan Indonesia diakui Belanda pada tanggal 27 Desember 1949, maka UU No. 22 tahun 1948 pun dilaksanakan dan Riau masuk ke dalam Propinsi Sumatera Tengah dengan empat Kabupaten, yaitu :

1. Kabupaten Kampar.
2. Kabupaten Bengkalis.
3. Kabupaten Indragiri.
4. Kabupaten Kepulauan Riau.

Undang Undang Darurat No. 19 tahun 1957 yang kemudian menjadi Undang-undang No.61 tahun 1958 ditetapkanlah oleh pemerintah Republik Indonesia terbentuknya daerah-daerah swatantra Tingkat I Riau yang tebagi atas daerah swatantra Tingkat II, yaitu :

1. Bengkalis.
2. Kampar.
3. Indragiri.
4. Kepulauan Riau.
5. Kotapraja Pekanbaru.

Pada saat ini Daerah Tingkat I Riau terdapat lima Kabupaten dan 1 Kotamadya, yaitu :

1. Kabupaten Bengkalis.
2. Kabupaten Kampar.
3. Kabupaten Indragiri Hulu.
4. Kabupaten Kepulauan Riau.
5. Kabupaten Indragiri Hilir.
6. Kotamadya Pekanbaru.

Daerah Tingkat I Riau yang luas itu, secara geografis berada di daratan Sumatera Tengah bagian Timur dan kepulauan-kepulauan yang tersebar di bagian Timur Sumatera dan Laut Natuna (Laut Cina Selatan) meliputi luas daratan ± 94.562 km2 (9,4 juta Ha) dan luas seluruhnya adalah ± 271.092 km 2. Batas geografis Riau adalah sebagai berikut :

1. Sebelah Utara berbatas dengan Selat Melaka, Malaysia Barat, Singapura dan Laut Natuna (Laut Cina Selatan).
2. Sebelah Selatan berbatas dengan Propinsi Jambi, dan Selat Karimata.
3. Sebelah Timur berbatas dengan Propinsi Kalimantan Barat dan Malaysia Timur.
4. Sebelah Barat berbatas dengan Propinsi Sumatera Barat dan Propinsi Sumatera Utara.

## A. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan penelitian sejarah Riau ini adalah untuk mendapatkan bahan-bahan dari semua sumber yang ada atau mengandung data tentang perkembangan sejarah dan sosial budaya yang berhubungan dengan Propinsi Riau khususnya data tentang pergerakan atau kebangkitan Nasional. Dari bahan-bahan berupa hasil penelitian tersebut disusunlah naskah yang mengupas secara tematis Sejarah Daerah Zaman Kebangkitan Nasional.

Mengupas secara tematis pergerakan nasional didaerah ini berarti pengungkapan mendalam masalah pergerakan nasional, karena itu diperlukan penelitian yang mendalam pula. Hal ini disebabkan karena data mengenai priode tersebut secara tertulis sangat minim dan tokoh-tokoh sebagai pelaku sejarah zaman itu juga sangat

langka. Tiadanya data tertulis dapat di terima akal, karena masa kebangkitan nasional ini adalah priode rawan bagi penjajahan Belanda oleh karena itu dokumen-dokumen mengenai organisasi serta kegiatannya tidak mungkin disebar luaskan begitu saja. Pada masa ini bangsa Indonesia termasuk tokoh-tokoh di daerah berjuang menentang penjajah dengan konsolidasi kekuatan didalam partai, mereka berjuang secara politis yang merupakan ancaman lebih hebat lagi bagi Belanda. Maka dalam penelitian ini diadakan usaha menggali, mengumpulkan dan mencatat secara luas sumber dan data tentang sejarah Riau.

Dengan diadakan penelitian ini maka sekaligus juga berarti memelihara dan menyelamatkan warisan budaya bangsa di daerah, sehingga bukan saja dapat di hayati oleh generasi kini tetapi juga oleh generasi yang akan datang. Disamping itu karena sejarah daerah adalah merupakan pengisi sejarah nasional, maka dengan diadakannya penelitian yang membuahkan naskah sejarah daerah pergerakan nasional tematis, maka menjadi lengkap serta manunggal utuhlah Sejarah Nasional Indonesia itu.

Dengan demikian diharapkan nilai-nilai sejarah dan budaya bangsa akan selalu mendasari segala tingkah laku bagi penduduk yang berdiam di Riau khususnya dan Indonesia pada umumnya dalam rangka pembinaan kesatuan bangsa Indonesia bagi generasi kini maupun generasi yang akan datang.

Disamping itu hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan sumbangan bagi para pengambil keputusan untuk menentukan tujuan maupun sasaran pengembangan kebijaksanaan kebudayaan nasional.

## B. M A S A L A H

Zaman Kebangkitan Nasional merupakan sebagian dari proses pergerakan dan perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia yang mempunyai nilai kesejarahan yang penting, karena dasar-dasar dari kenegaraan dan kebudayaan Indonesia tercermin pada zaman itu. Menyadari akan nilainya itu maka sepatutnyalah pada alam Indonesia merdeka ini, pada saat pemerintahan Orde Baru sedang melancarkan pembangunan yang bertujuan untuk mengisi serta mewujudkan cita-cita yang diperjuangkan oleh bangsa Indonesia pada zaman kebangkitan nasional itu, mengungkapkan secara lengkap sejarahnya terutama di daerah-daerah yang justru selama ini seakan-akan terlupakan. Mengungkapkan secara luas dan lengkap perjuangan bangsa di daerah pada waktu itu berarti meletakkan nilai-nilai luhur pada proporsi yang sebenarnya dan demikian berarti se-

suai dengan tujuan penelitian akan dapat mengatasi masalah yang dihadapi selama ini yaitu dilupakannya perjuangan pergerakan nasional di daerah daerah.

Proses kebangitan nasional itu memang terjadi di seluruh Indonesia. Oleh karena perjuangan politik ini adalah sangat rawan bagi Belanda, Maka Belanda dengan segala upaya menghalangi penyebaran ide perjuangan itu. Keadaan geogragis Indonesia yang sedemikian rupa, merupakan faktor lain yang menentukan lancarnya komunikasi antara Pulau Jawa sebagai pusat pergerakan dengan pulau-pulau lainnya. Selain itu faktor kwantitas kaum terpelajar yang sedikit di daerah merupakan faktor penghambat pula untuk berkembangannya pergerakan nasional di daerah. Namun bagaimana pun juga ternyata faktor-fator penghambat tadi tidak dapat menghalangi bangsa Indonesia di daerah untuk berjuang secara politis.

Masalahnya bagi daerah Riau yang luas itu kelihatan bahwa dalam rangka pembinaan organisasi dan pengembangan massa hanya terbatas secara lokal sehingga tidak dapat dihimpun dalam massa rakyat yang besar sehingga dapat memperlihatkan kekuatannya yang riil. Hal ini terjadi karena komunikasi yang sulit, tidak seperti di pulau Jawa.

Di daerah Kepulauan Riau, dimana kemudian Belanda secara langsung memerintahkan bekas kerajaan Melayu Riau itu, pergerakan nasional mempunyai wadah tersendiri, yaitu "Rusydiah Club". Namun Rusydiah Club tidak dapat secara terang-terangan menyatakan tujuan politisnya karena pimpinannya yang terdiri dari para bangsawan tidak mampu menghadapi ketatnya pengawasan pemerintah Belanda.

Dalam usaha pengungkapan secara mendalam dan terperinci sepak terjang kebangkitan nasional di Riau, peneliti terbentur akan kenyataan bahwa sumber tertulis sangat kurang. Demikian pula sebagian dari tokoh yang terlibat langsung di masa itu sudah meninggal dunia. Dan diantara tokoh-tokoh yang ada kebanyakan tidak pula mempunyai catatan lengkap tentang perjuangannya masa lalu.

## C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup pencatatan dan penelitian tematis Sejarah Daerah masa kebangkitan nasional meliputi segi-segi : kehidupan pemerintahan dan kenegaraan, masyarakat, ekonomi, seni budaya, pendidikan, agama, kepemudaan, kepanduan, pers, organisasi profesional, kewanitaan, dan koperasi.

Semua segi kehidupan tersebut dijalin dalam pendekatan historis yang dengan demikian akan terlihat perkembangannya secara sistimatis sesuai dengan waktu terjadinya peristiwa-peristiwa itu, yaitu mulai dari tahun 1900 sampai tahun 1942. Hal itu tercermin dalam isi naskah ini.

Sedang ruang lingkup daerah penelitian adalah seluruh Daerah Tingkat I Riau yang terdiri dari :

1. Kabupaten Bengkalis;
2. Kabupaten Kampar,
3. Kabupaten Indragiri Hulu,
4. Kabupaten Kepulauan Riau,
5. Kabupaten Indragiri Hilir,
6. Kotamadya Pekanbaru.

Sudah barang tentu tidak seluruh daerah Riau yang sangat luas itu dijelajahi, untuk diteliti, melainkan ibu kota kabupaten atau kota-kota tertentu dalam suatu kabupaten yang ada mempunyai potensi sumber.

Dari hasil penelitian itulah kemudian diproses sehingga menjadi naskah Sejarah Daerah Riau Masa Kebangkitan Nasional.

## D. PERTANGGUNGJAWABAN ILMIAH PROSEDUR PENELITIAN

Seperti digariskan dalam pola penelitian, bahwa tim peneliti di daerah bertugas mengadakan penelitian, pengolahan data, penyusunan data sampai menjadi naskah.

Untuk melaksanakan tugas itu maka tim peneliti sejarah daerah melakukan penelitian keseluruh daerah Riau dan museum di Jakarta

Sebelum turun langsung ke lapangan tim telah mengambil langkah-langkah sebagai berikut : mengumpulkan literatur yang ada hubungannya dengan sejarah kebangkitan nasional di daerah Riau, mempersiapkan kerangka laporan, mempersiapkan kuestioner, meng-inventarisasi informan, pembagian tugas dan segala sesuatu untuk turun ke lapangan.

Oleh karena daerah lokasinya banyak dan jauh serta sukarnya jalur komunikasi, maka penelitian ke lapangan dilakukan dua tahap.

Tahap pertama dilakukan ke Tanjungpinang dan ke Bengkalis.

Tahap kedua ke Jakarta (Museum Pusat, Gedung Arsip Nasional) dan kota Pekanbaru ke daerah Indragiri Hulu dan Indagiri Hilir, dan kedaerah Bangkinang.

Metoda pengumpulan data dan sumber-sumber sejarah daerah Riau ini bertitik tolak kepada pendekatan historis yaitu dengan studi perpustakan, mengadakan wawancara dengan informan atau tokoh yang dianggap mengetahui atau menguasai materi sejarah yang berhubungan, mengumpulkan sumber-sumber berupa naskah baik dengan jalan membeli, menyalin atau difoto copy serta observasi langsung terhadap tempat-tempat bersejarah.

Dari bahan-bahan yang telah terkumpul itulah kemudian diadakan pengolahan dengan pendekatan historis dan pendekatan interdisipliner yang dimasukkan ke dalam pola penelitian yang telah ditetapkan menjadi naskah Sejarah Daerah Tematis Zaman Kebangkitan Nasional.

## E. HASIL AKHIR

Naskah ini pada akhirnya merupakan hasil kerjasama antara berbagai fihak. Naskahnya yang asli dikerjakan oleh suatu Tim Penyusun di daerah Riau yang penggarapannya mengikuti pola dan kerangka seperti ditentukan oleh Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah di Pusat. Selanjutnya terhadap naskah ini diadakan penyempurnaan dan penilaian bersama, baik oleh Tim Pusat (P3 KD) maupun oleh Tim Penyusun di daerah Riau. Hasil penyempurnaan dan penilaian inilah yang dijadikan pedoman untuk lebih menyempurnakannya lagi dalam pekerjaan editing.

Sedangkan mengenai pekerjaan editing itu sendiri kegiatannya diarahkan kepada beberapa segi, yaitu : materi atau bahan, kebahasaan dan pendekatan. Segi materi didasarkan kepada hasil penilaian, sedangkan kebahasaan diperhatikan beberapa hal, seperti : ejaan, istilah dan keterbacaan. Dalam menulis naskah sejarah daerah, kiranya pendekatan rigiosentris merupakan cara yang wajar, dan dari naskah ini dapat dikemukakan bahwa para penyusun telah berusaha mendekati permasalahannya dengan cara demikian.

Selanjutnya naskah ini hendaknya dipandang sebagai perintis jalan ke arah penelitian dan penyusunan sejarah daerah yang lebih baik dengan berbagai kemungkinan yang lebih kaya, lebih beragam dan lebih memenuhi sasaran. Perlu juga dikemukakan bahwa meskipun dalam naskah ini hal-hal mengenai sejarah nasional masih kelihatan agak jelas, namun hendaknya dilihat sebagaimana dikemukakan oleh Tim Penyusunnya sendiri, dalam hubungannya dengan latar belakang perisitiwa ataupun konteks permasalahan kesejarahannya. Sebaliknya bahan-bahan mengenai sejarah daerah itu sendiri akan merupakan bahan yang berguna untuk menyusun se-

jarah nasional pada tema Kebangkitan Nasional. Hasil akhir ini secara keseluruhan dapat dipandang sebagai sesuai dengan *Terms of Reference* sebagaimana dijabarkan oleh proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah.

PERPUSTAKAAN
SEKRETARIAT DITJENBUD
No.INDUK
TGL.CATAT.

# BAB II

# KEADAAN DAERAH PADA AKHIR ABAD KE 19

## A. PEMERINTAHAN

Dengan ditanda tanganinya baik *Lange Contract* maupun *Korte Verklaring* antara kerajaan-kerajaan yang ada di Riau dengan Belanda, maka sebenarnya kedaulatan kerajaan-kerajaan itu sudah tidak ada lagi. Namun Belanda masih memberikan wewenang kepada raja-raja untuk memerintah langsung, sementara Belanda mengawasi dengan ketat. Maka dengan demikian kerajaan-kerajaan yang ada masih terus dilanjutkan, yaitu :

Kerajaan Melayu Riau
Kerajaan Siak
Kerajaan Indragiri
Kerajaan Pelalawan
Kerajaan kecil lainnya di Rokan.

Untuk fungsi pengawasan, Belanda mengatur sendiri pola administrasi pemerintahannya sehingga pusat-pusat pemerintahannya tidak harus berkedudukan di ibu kota kerajaan-kerajaan yang ada di Riau, melainkan membagi Riau ini atas wilayah administrasi sebagai berikut:

a. Daerah *Residentie Riouw en Onderhorigheden* dengan ibukota Tanjungpinang, meliputi *Afdeeling Riouw Archipel dan Afdeeling Indragiri.*
*b. Afdeeling* Bengkalis dengan ibukota Bengkalis yang menjadi bagian dari *Gouvernement Sumatra's Oostkust.*
c. *Onderafdeeling* Bangkinang merupakan bagian dari *Afdeeling* lima Puluh Koto termasuk *Gouvernement Sumatra's Westkust,* yang beribukota di Padang.

Pada akhir abad ke-19 ini yang menjadi raja ialah sebagai berikut :

Di kerajaan Melayu Riau ialah Abdurrahman Muazam Syah (1883 – 1913)

Di kerajaan Siak ialah Assyadis Syarif Kasim Abdul Jalil Syaifuddin (1889 – 1908)

Di kerajaan Indragiri ialah Sultan Isa Mudayat (1885 – 1901)

Kerajaan-kerajaan di Riau pada pengujung abad ke-19 ini tidak dapat berbuat banyak lagi. Raja dan kaum bangsawan mereka sudah merupakan alat penjajah yang ampuh untuk menghadapi rakyat, sehingga penjajahan Belanda dapat berlangsung.

## B. SOSIAL BUDAYA

### 1. Pendidikan

Jauh sebelum lembaga pendidikan (sekolah) yang didirikan Belanda, di daerah Riau telah berdiri surau-surau dan perguruan-perguruan agama. Yang dipelajari selain dari membaca Al Qur'an adalah mengenai ilmu agama Islam dan belajar menulis dan membaca bahasa Melayu dalam huruf Arab..

Sudah umum diketahui bahwa dalam abad ke 19 kerajaan Melayu Riau berkembang sebagai pusat kebudayaan Melayu disamping pusat pengembangan agama Islam. Raja Ali Haji adalah sastrawan, ahli bahasa dan sejarawan yang menghasilkan banyak karya-karya yang mengharumkan nama Riau dan sekaligus juga mendidik dan membawa rakyatnya kepada kemajuan.

Diantara sejumlah karya Raja Ali Haji ialah sebagai berikut:

a. Hikayat (Sultan) Abdul Muluk, 1846.
b. Gurindam Dua Belas, 1847.
c. Bustanul Katibin, 1850-1857.
d. Pengetahuan Bahasa, 1856, 1858, 1859.
e. Salasilah Melayu dan Bugis, 1860, 1865.
f. Tuhfatun Nafis, 1865.
g. Siti Syianah.
h. Suluh Pegawai.
i. Taman Permata.
j. Sinar Gemala Mustika Alam.
k. Syamaratul Muhimah.
l. Al Ustha.
m. Al Qubra.

Perkembangan pendidikan dan kebudayaan ini kemudian makin pesat sehingga pada ± tahun 1892 berdirilah suatu organisasi yang bernama *Rusydiah Club* berpusat di Pulau Penyengat. *Rusydiah Club* ini adalah organisasi kaum cerdik cendikiawan di mana para anggotanya mulanya giat dalam pengembangan pengetahuan dan pernyiaran agama Islam. Agar karya-karya mereka dapat disalurkan kepada masyarakat maka mereka mendirikan suatu percetakan yang bernama *Mathaba'atul Riauwiyah,* dimana karya-karya mereka dapat dicetak.

Sebagai bukti berkembangnya pendidikan di Riau adalah berdirinya sebuah perpustakaan yang kemudian terkenal dengan nama *Khutub Khanah Marhum Ahmadi.* Banyak buku sumbang-

an dari negeri-negeri Islam dikumpulkan pada perpustakaan itu. Sampi sekarang masih ada sisa buku dari perpustakaan itu yang terdapat di mesjid Pulau Penyengat dan dapat dipergunakan oleh mereka yang faham bahasa Arab dan ilmu agama.

Dalam pada itu Pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1833 telah mendirikan sebuah sekolah di Tanjungpinang tetapi pada tahun 1850 sekolah itu ditutup kembali. Sekolah tersebut khusus untuk anak-anak Belanda. Kemudian Belanda membuka pula sebuah sekolah di Bengkalis untuk anak-anak bumiputera pada tahun 1880. Jumlah murid adalah 44 orang dan sebuah di Tanjungpinang dan di Lingga dengan jumlah murid kedua sekolah itu 109 orang.

2. Seni Budaya

Seni budaya pada pengujung abad ke-19 ini pada hakekatnya adalah merupakan kelanjutan seni budaya masa sebelumnya. Dalam masa ini masih terasa sangat kuat pengaruh agama Islam di bidang seni budaya, sehingga pengaruh kesenian barat hanya ada pada unsur-unsur yang tidak bertentangan dengan agama. Hal ini disebabkan karena sebagian masarakat beranggapan bahwa meniru kesenian barat atau Belanda itu atau menggunakan alat kebudayaan barat hukumnya haram.

Dalam beberapa hal yang praktis, pengaruh kebudayaan barat itu sempat menjalar ke dalam kesenian rakyat seperti seni bangunan dan seni musik. Dalam seni musik di pergunakan biola sebagai alat dalam memainkan kesenian gambus dan zapin. Begitu juga dalam seni tari joget yang di iringi dengan nyanyian dan musik ada kemungkinan dipengaruhi oleh kebudayaan Portugis. Begitu juga biola di pergunakan untuk mengiringi tari olang-olang, di mana sebelumnya diiringi dengan rebab. Nafiri diganti dengan *oboe* dan seruling diganti dengan kelarinet.

Bangunan yang didirikan Belanda seperti kantor-kantor, rumah-rumah dinas tempat beribadat dan rumah-rumah sakit umumya berdiding tinggi dan beratap lonjong persis bangunan di negeri Belanda sendiri. Akibat pengaruh seni bangunan Belanda, maka banyak rakyat meniru bentuk bangunan itu yang dilihat pada toko-toko dan rumah-rumah penduduk. Bahkan pengaruh itu menjalar keistana kerajan Melayu Riau, istana kerajan Siak, istana kerajaan Indragiri, dan seterusnya.

3. Alam Pemikiran dan Kepercayaan

Alam pikiran/kepercayaan masyarakat Riau pada akhir abad ke-19 ini adalah bercirikan fanatisme Islam dalam arti bahwa

masyarakat Islam melakukan ibadah dengan baik dan menganggap bahwa orang Belanda adalah orang kafir yang harus dimusuhi. Sekalipun demikian pada waktu ini tidak pernah lagi terjadi kontak bersenjata.

Sampai sedemikian jauh masih ada pemeluk kepercayaan animisme yang dianut oleh suku-suku terasing yaitu suku Talang Mamak, suku Sakai, suku Bonai, dan sebagainya. Suku terasing ini dalam masa kerajaan-kerajaan masih berkuasa memang terisolir karena mereka hidup di hutan-hutan yang jauh dari arus komunikasi.

## C. KEHIDUPAN EKONOMI

Kehidupan ekonomi rakyat Riau pada abad ke 19 dipenuhi dengan berbagai usaha atau mata pencarian. Keadaan alam dan geografis Riau heterogen menyebabkan pula berbedanya usaha atau mata pencaharian penduduk Seperti telah diketahui di daerah Riau yang terletak di daratan pulau Sumatera mengalir ke arah Timur sungai-sungai besar yang merupakan urat nadi komunikasi dan perekonomian.

Sungai-sungai besar itu adalah :

1. Sungai Rokan, panjangnya ± 260 Km.
2. Sungai Siak, panjangnya ± 200 Km.
3. Sungai Kampar, panjangnya ± 325 Km.
4. Sungai Indragiri, panjangnya ± 250 Km.
5. Sungai Gangsal, panjangnya ± 100 Km.

Tanahnya dipenuhi dengan hutan-hutan lebat yang mengandung simpanan kekayaan disamping memungkinkan untuk persawahan maupun perladangan. Disepanjang sungai-sungai besar itulah terdapatnya pemukiman penduduk dan pusat-pusat kerajaan.

Di bagian lain dari Riau yaitu di Kepulauan bertebaran pulau-pulau di tengah laut yang luas itu yang mengandung simpanan kekayaan yang besar pula.

Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya maka mata pencaharaian penduduk di tentukan oleh lingkungannya. Oleh karena itu maka di Riau terdapat berbagai mata pencaharian dalam memenuhi kebutuhan primernya.

a. Bersawah dan berladang
b. Berkebun kelapa atau sagu
c. Menangkap ikan
d. Mengumpulkan hasil hutan.

Bersawah dan berladang adalah mata pencaharian rakyat Riau yang bermukim di Riau Daratan. Keadaan alam dan tanahnya memungkinkan untuk ditumbuhi padi. Seperti dikatakan bahwa di sepanjang sungai-sungai besar itulah terdapat tempat pemukiman dan biasanya rakyat lebih suka mendirikan rumah dan perkampungan di dekat tepi sungai. Di belakang perkampungan itu terbentang rawa-rawa yang diolah untuk persawahan. Biasanya sekali setahun sungai-sungai besar itu banjir yaitu di musim hujan dan menggenangi persawahan rakyat selama satu atau dua minggu. Lumpur dan humus yang dibawa oleh banjir sehingga menyebabkan sawah-sawah itu sangat subur dan ditumbuhi oleh padi dengan baik. Tetapi sering sawah yang subur itu tidak memberikan hasil yang memuaskan karena serangan hama yang tidak dapat diatasi oleh penduduk yang tidak mengenal alat-alat untuk mencegahnya (umumnya keadaan demikian masih berlaku sampai sekarang). Untuk mengolah sawahnya rakyat masih mempergunakan alat-alat tradisional yaitu : Cangkul, cabak, tajak, sabit, tuai, dan sebagainya. Mengenai produksi padi sawah ini tidak ditemukan data, namun yang perlu dicatat ialah bahwa penduduk pada tahun-tahun sebelum Jepang masuk tidak pernah mengalami kalaparan, seperti halnya yang sering terjadi semenjak Jepang berkuasa sampai pada saat ini.

Selain dari persawahan, rakyat Riau daratan mengusahakan pula padi ladang, yaitu pada tanah yang kering. Bibit dimasukkan ke dalam tanah yang telah ditugal dengan jarak tertatur. Kemudian rakyat juga mengenal padi ladang, yaitu menanam padi pada hutan-hutan yang telah di tebangi dan kemudian kayu-kayu semuanya di bakar habis. Biasanya penebangan dan pembakaran diadakan musim panas mendekati musim hujan. Tatkala musim hujan masuk maka bibit telah siap ditugalkan. Padi ladang ini cukup subur dan hasilnya lumayan. Tahun berikutnya tanah diladang tersebut tersebut ditinggalkan dan petani berpindah mencari areal baru yang masih penuh ditumbuhi hutan. Ladang begini disebut *ladang kasang*. Pengusahaan ladang kasang itu dimungkinkan karena hutan masih luas (kemudian setelah rakyat mengenal karet, ladang kasang itu disisipi dengan tanaman karet sehingga ketika padi sudah dipanen karetpun mulai berkembang dengan subur dan sipetani memiliki perkebunan karet itu, sehingga tanah tidak menjadi hutan kembali).

Di daerah hilir sungai-sungai besar di Riau yaitu di daerah yang tanahnya dicapai oleh air pasang, pertanian padi juga menguntungkan. Semenjak zaman kerajaan Malaka (abad ke 15) daerah Indra-

giri bagian hilir terutama daerah sepanjang sungai Gangsal (Reteh) terkenal sebagai sumber beras.

Berkebun kelapa dan sagu adalah mata pencaharian pokok rakyat Riau yang bermukim di daerah hilir sungai-sungai besar dan di pulau-pulau. Memang ternyata di daerah tersebut kelapa dan sagu (pohon rumbia) hidup dengan suburnya. Kelapa dapat di pergunakan untuk bermacam-macam keperluan terutama sejak berkembangnya kota Singapura, maka perkebunan kelapa di ikut mengalami perkembangan, sebab banyak produksi kopra Riau dikirim ke Singapura. Di samping itu kebun sagu juga ikut berkembang karena bukan saja menjadi makanan pokok sebagian rakyat tetapi dari daunnya dapat dijadikan atap yang banyak diperlukan rakyat setempat untuk atap rumah dan sebagainya. Mengenai pengolahan kopra dan sagu dirasa tidak perlu diuraikan di sini.

Menangkap ikan adalah mata pencaharian penduduk di Riau Kepulauan serta penduduk dimuara-muara sungai besar. Banyaknya ikan di lautan pulau-pulau Riau sudah terkenal dari masa sebelumnya. Apalagi dengan pesatnya perkembangan Singapura, maka usaha nelayan di Riau makin berkembang pula.

Di daerah pulau Bengkalis terkenal ikan terubuk yang banyak ditangkap terutama untuk mendapatkan telurnya yang sangat digemari.

Alat yang dipergunakan oleh rakyat untuk menangkap ikan ini adalah pukat, *jermal* ,jala, pancing, dan sebagiannya. Sedangkan produksinya tidak dapat diketahui. Perkembangan nelayan di Riau kemudian mengalami hambatan karena banyaknya berdatangan orang Cina yang ikut bergerak dalam bidang ini sehingga kemudian banyak penduduk nelayan jauh menangkap ikan hanya sebagai kulinya orang-orang Cina.

Mengumpulkan hasil hutan juga merupakan mata pencaharian sebagian rakyat, terutama penduduk di Riau Daratan bagian hulu. Rotan, damar, lilin, kemenyan, kayu, dan sebagainya adalah hasil hutan yang banyak dikeluarkan dari daerah Riau Daratan. Potensi hutan dengan segala kekayaannya memungkinkan berkembangnya mata pencaharian tersebut.

Sungai-sungai besar di Riau memegang peranan penting dalam perekonomian. Arus lalu lintas ke luar masuk Riau melalui sungai-sungai itu. Perekonomian berkembang di sepanjang sungai itu. Pemukiman, kampung-kampung dan pusat-pusat kerajaan berdiri di pinggir sungai. Sarana angkutan laut, perahu-perahu besar dan ke-

cil, kapal-kapal layar menghubungkan suatu tempat dengan tempat lainnya.

Perlu diketahui bahwa sekarang ini sungai-sungai besar di Riau masih dapat dilayari sampai jauh kepedalaman oleh kapal-kapal motor yang besar dan sungai-sungai merupakan urat nadi perhubungan di Riau.

Jalur perekonomian kebagian Barat Riau yaitu Minangkabau melalui jalan darat . Jalan darat itu menghubungkan Riau dengan daerah Lima Puluh Kota (Payakumbuh). Jalan ini cukup potensial karena hasil dari Minangkabau yang subur dibawa melalui route sebagai berikut : Payakumbuh - Kota Alam - Kota Baru (dengan jalan darat) menghilir Sungai Mahat, Sungai Kampar Kanan terus ke Teratak Buluh. Dari Teratak Buluh jalan darat ke Pekanbaru sepanjang 18 Km dengan menggunakan kuda beban kemudian dibawa menghilir sungai Siak terus ke Tanjungpinang dan Singapura

Disamping mata pencaharian rakyat yang diuraikan tadi, maka raja-raja di Riau juga aktip menggalakkan perekonomian. Sultan Syarif Kasim I, raja Kerajaan Siak berusaha memajukan perdagangan di daerah pantai dan Sungai Siak. Perdagangan berkembang, perkebunan merica dan lada semakin banyak, pembukaan kapur barus digalakkan

Pada tahun 1884 Sultan memberi hak konsesi tiga buah pabrik penggergajian kayu di Siak yaitu konsesi Sungai Rawa kepada Perserikatan Dagang F.Kehding. Tahun 1886 diberikan pula dua buah konsesi perkebunan pertama di Siak kepada pengusaha Belanda.

Sultan Isa dari Kerajaan Indragiri memberi izin pembukaan perkebunan besar Eropah di Indragiri dalam tahun 1893 yaitu perkebunan kelapa sawit. Selanjutnya perkebunan tembakau dibuka pula Air Molek. Pada tahun 1894 dari perkebunan tembakau 80 bahu tanah yang ditanami hanya menghasilkan 248 pikul. Mejelang akhir abad ke 19 di buka perkebunan karet di Sungai Lala.

# BAB III
# KEADAAN DAERAH RIAU DARI TAHUN 1900 - 1928

## A. PENGARUH POLITIK KOLONIAL BELANDA DAN DESENTRALISASI

Sebelum tahun 1903 daerah Propinsi Riau sekarang ini terbagi atas daerah-daerah administratif yaitu *Geweesten, Afdeeling dan Onderafdeelingen* yang berada dibawah kekuasaan seorang Pamongpraja bangsa Belanda/*Europes Bestuurambtenaar* seperti Residen, Asisten Residen dan Controleur. Selain itu terdapat lagi *districten* dan *onderdistricten* yang berada di bawah kekusaan seorang Pamongpraja bangsa Indonesia. Jadi kesatuan administrasi terkecil yang dibentuk Pemerintah Belanda ialah *onderdistrict*, kira-kira sama dengan kecamatan sekarang.

Pemerintahan Belanda menjalankan pemerintahan yang sentral. Akan tetapi dalam pelaksanaannya Pemerintah Belanda menjalan kan azas dekonsentrasi secara terbatas, yaitu dalam kesatuan-kesatuan yang berdasarkan hukum adat. Dalam kesatuan hukum adat itu berjalan pemerintahan otonomi asli atau swapraja yang dikuasai oleh raja-raja atau Sultan. Raja atau Sultan itu boleh melakukan pemerintahan di daerah masing-masing dengan batas-batas yang disebutkan dalam kontrak panjang *(Lange Contract)* dan pernyataan pendek *(Korte Verklaring)*.

Kerajaan yang telah mengikat perjanjian panjang *(Lange Contract) ialah kerajaan Siak Sri Indrapura, Kerajaan Indragiri, dan Kerajaan Pelalawan yang kemudian diperbaharui menjadi Korte Verklaring*. Sedangkan yang langsung dipaksa menanda tangani perjanjian pendek itu adalah Kerajaan Rambah, Kerajaan Kepenuhan, Kerajaan Tambusai, Kerajaan Gunung Sahilan, Kerajaan Singingi, Kerajaan Kunto Darusalam dan Kerajaan Logas, yang semuanya termasuk *Afdeeling* Bengkalis.

Semenjak ditanda tangani perjanjian tersebut kerajaan-kerajaan itu berada di bawah naungan Pemerintah Hindia Belanda. Kedudukan raja/sultan adalah sebagai kepala swapraja. Dalam hal ini kepala swapraja menjalankan *medebewind* ( tugas pembantu ) yang didampingi oleh seorang Controleur atau Asisten Residen.

Boleh dikatakan pada permulaan abad ke-20 itu seluruh kerajaan-kerajaan di daerah Riau sudah menanda tangani perjanjian takluk di bawah kekuasaan kolonial Belanda. Dengan demikian daerah ini

terdapat dua macam pemerintahan, yaitu daerah swapraja dengan *zelfbestuuren landaschappen* dan daerah yang langsung di perintahi oleh Belanda yang dinamakan *Rechtsstreeks Bestuursgebied.* Daerah yang lansung diperintahi Belanda ialah seluruh Kepulauan Riau *(Riau Archipel),* Reteh, Mandah, Gaung, Kateman, Ulu Teso, Pucuk Rantau Indragiri, Pulau Bengkalis dan daerah Bangkinang. Daerah-daerah tadi pada mulanya adalah bagian dari daerah kerajaan-kerajaan yang kemudian diambil alih oleh Belanda. Kerajaan Riau Lingga, yang daerahnya termasuk Reteh, Kateman, Mandah dan Gaung diambil alih oleh Belanda pada tahun 1911.

Propinsi Riau yang ada sekarang ini pada permulaan abad ke-20 sebagian besar daerahnya termasuk ke dalam Residensi Sumatera Timur *(Oostkust van Sumatera)* yang mula-mula berpusat di Bengkalis dan kemudian di Medan.

Daerah yang termasuk Residensi Sumatera Timur itu adalah sebagai berikut:

1. *Afdeeling* Deli dan Serdang yang terdiri dari kerajaan Deli dan kerajaan Serdang.
2. *Afdeeling* Langkat terdiri dari kerajaan Langkat
3. *Afdeeling* Asahan terdiri dari kerajaan Asahan, Kedatukan Indrapura, Kedatuan Suka Duka. Kedatukan Tanah Datar, Batu Bara, Kedatukan Pesisir, Kedatukan Lima Puluh, Kerajaan Kualuh dan Leidong, Kerajaan Kota Pinang, Kerajaan Panai dan Kerajaan Bilah.
4. *Afdeeling* Bengkalis terdiri dari kerajaan Sri Indrapura, Kerajaan Pelalawan, Raja IV Kota Rokan Kiri, Raja Kunto Darusalam, Kerajaan Rambah, Kerajaan Kepenuhan, Kerajaan Tambusai, Kerajaan Gunung Sahilan, Kerajaan Singingi, Kerajaan Logas.
5. *Afdeeling* Simelungun dan tanah Karo terdiri dari daerah raja tanah Jawa, raja Siantar, raja Panai, raja Raya Simelungun, raja Dolok Silau, raja Purba, raja Silima Kuta, raja Lingga, raja Barus Jahe, raja Suka Karo, raja Sarinembah dan raja Kutabuluh.1)

Sebelum abad ke-20 daerah-daerah pulau Jawa belum menjadi perhatian bagi pemerintah kolonial Belanda. Akan tetapi sesudah Pe-

---

1) Tengku Lukman Sinar SH., "Tanjung Pinang di masa Kerajaan Riau Lingga", **Majalah Canang,** No.9, September 1978, halaman 39.

2) Tengku Lukman Sinar SH., *Ibid.*

merintahan Belanda mengadakan politik pintu terbuka bagi penanaman modal swasta (asing) barulah Pemerintah Belanda memalingkan mukanya ke daerah luar Jawa. Dalam persaingan daerah koloni dengan bangsa Eropa lainnya Belanda khawatir ia akan kehilangan kesempatannya. Oleh sebab itu pada permulaan abad-20 itu Belanda secara intensif mulai menanamkan kukunya di daerah Riau. Apalagi setelah Inggeris dengan dipelopori oleh Thomas Stanford., Raffles berhasil mengembangkan Singapura dengan pesat.

1. Kerajaan Melayu Riau – Lingga

Setelah berakhirnya pertikaian antara Inggeris dengan Belanda disetujui oleh Traktat London (1824) yang isinya antara lain ialah pemisahan daerah Kerajaan Melayu Riau/Lingga yang di bawah pengaruh Inggeris dengan yang di bawah pengaruh Belanda. Dan sejak itu resmilah kerajaan Melayu Riau/Lingga terpecah menjadi dua.

Pada tahun 1830 raja Melayu Riau/Lingga mengaku takluk di bawah kekuasaan Pemerintahan Kolonial Belanda. Sejak itu Belanda dengan berbagai jalan berusaha untuk melenyapkan kerajaan tersebut. Letaknya yang strategis di jalan lalu lintas perdagangan internasional sangat penting artinya bagi strategi pertahanan maupun strategi ekonomi. Apalagi setelah diketahui bahwa daerah ini mengandung potensi alam yang banyak, timah, emas dan minyak bumi, maka Pemerintah Belanda dengan gigih memperluas kuasanya. Akibat tekanan dari Belanda itu banyak keluarga raja yang menyingkir ke Singapura (1911). Namun Belanda tidak henti-hentinya menghalangi komunikasi antara keluarga raja yang pindah itu dengan daerah Riau. Pada masa pemerintahan raja Abdurachman Muazam Syah (1883-1911) yaitu raja terakhir tumbuh sebuah perkumpulan Rusydiah Club di pusat Kerajaan di pulau Penyengat. Oleh karena Belanda curiga atas kegiatan-kegiatannya maka pemerintah Belanda dengan cepat menghapuskan kerajaan melayu Riau/Lingga ini pada tahun 1913, dan sekarang langsung di bawah kekuasaan Pemerintah Belanda (Keresidenan Riau).

"Adapun yang masuk Keresidenan Riau waktu itu selain dari Kerajaan Riau - Lingga ialah kerajaan Indragiri dan Kerajaan kecil di wilayah Kuantan yaitu : IV Koto Dihilir, IV Koto Dimudik, V Koto Dimudik, Koto Tengah, Lubuk Ramo (III Koto Hulu Teso".2)

*Residentie Riouw en Onderhoorigheden* dengan ibu kota Tanjungpinang meliputi dua *Afdeeling: Afdeeling Riouw Archipel* dan *Afdeeling* Indragiri.

Dalam menjalankan pemerintahan di daerah *Residentie Riouw en Onderhoorigheden*, pemerintah Belanda di wakili oleh Residen, Asisten Residen dan *Controleur*. Di samping itu terdapat pula pejabat-pejabat pribumi yang berkedudukan sebagai *Amir* setingkat dengan Demang, yang ditunjuk oleh pemerintah Belanda. Beberapa orang pribumi yang pernah menjabat Amir ialah Raja Muhamad Samin Bismarak dan Sultan Palembang di Reteh, Muhamad Syukur di Kuala Mandau dan Muhamad Dahlan di Gaung. Di Pulau Tujuh jabatan itu di pegang oleh datuk Kaya. Datuk Kaya yang menjabat kedudukan Demang tersebut ialah Datuk Kaya Jemaja, Datuk Kaya Siantan, Datuk Kaya Bunguran Barat, Datuk Kaya Bunguran Timur, Datuk Kaya Serasam, Datuk Kaya Midai dan Kaya Tambelan. Di daerah Kuantan jabatan tersebut dipegang oleh *Orang Gedang* atau keturunan raja.

2. Kerajaan Siak Sri Indrapura

Dalam masa pemerintahan raja Siak XI Tengku Ngah Syayed Hasyim yang bergelar Sulthan Assaidi Syarif Hasyim Abdul Jalil Syaifuddin (1888-1908) diadakan perjanjian lagi antara Pemerintahan Belanda dengan sultan yang isinya tidak lain adalah pengurangan kekuasaan Sultan Siak. Isi perjanjian itu antara lain ialah:

a. Wakil raja atau Mangkubumi ditiadakan.
b. Mengadakan peraturan-peraturan baru tentang batas-batas kerajaan Siak.
c. Pulau Bengkalis dan beberapa pulau lainya tidak lagi termasuk daerah kerajaan Siak.

Meskipun kerajaan Siak adalah daerah *zelfbestuur* namun pemerintah Belanda selalu mencampuri urusan kerajaan Siak. Secara berangsur-angsur pemerintah Belanda berusaha terus untuk mengurangi wewenang kekuasaan swapraja tersebut. Dengan berbagai taktik dicarilah usaha sehingga mau tidak mau raja Siak terpaksa juga menanda tangani setiap perjanjian yang merugikan dirinya.

Akibat tekanan pemerintah Belanda Sultan Siak terpaksa merubah struktur pemerintahannya yang semula terdiri dari 10 propinsi, berdasarkan Perjanjian Tahun 1916 di jadikan beberapa *distrik* dan *onderdistrik*, *yakni:*

a. *Distrik* Siak yang terdiri dari *onderdistrict* Mempura, berkedudukan di Buantan; *onderdistrict* Mandau berkududukan di Muara Klantan, dan onderdistrict Sungai Pakning.
b. *District* Selat Panjang terdiri dari *onderdistrict* Tebingtinggi di Selat Panjang dan *onderdistrict* Merbau berkedudukan di Teluk Belitung
c. *District* Bukitbatu terdiri dari *onderdistrict* Bukitbatu di Bukitbatu dan *onderdistrict* Dumai di Batu Panjang.
d. *District* Bagan siapi-api meliputi *onderdistrict* Tanah Putih berkedudukan di Tanah Putih, *onderdistrict* Bangko berkedudukan di Bagan Siapi-api dan *onderdistrik* Kubu berkedudukan di Teluk Merbau.
e. *District* Pekanbaru terdiri dari *onderdistrict* Pekanbaru di Pekanbaru, *Onderdistrict* Tapung Kiri di Petapahan dan *onderdistrict* Tapung Kanan berkedudukan di Sikijang.

Setiaap *District* dikepalai oleh *Districthoofd* dan setiap *onderdistrict* dikepalai pula oleh *onderdistricthoofd.* Kesatuan hukum terkecil adalah kampung-kampung yang dikepalai oleh Penghulu-penghulu.

Fungsi dari pada *districthoofd* ialah sebagai wakil Sultan Siak untuk menjalankan pemerintahan di wilayahnya. Pengangkatan *districthoofd* oleh Sultan Siak haruslah dengan persetujuan pemerintah Belanda yang dalam hal ini diwakili oleh Residen. Pemerintah-pemerintah swapraja pada mulanya masih boleh mempunyai polisi sendiri, tetapi kemudian hak itu semakin dipersempit. Yang tinggal hanya pasukan kehormatan raja, pengawal istana dan sejumlah pegawai istana yang juga semakin dikurangi jumlahnya. Selain itu penghasilan kerajaan seperti pajak, *pancung alas* (penghasilan hutan, tanah) dihapuskan. Pengadilan hanya tinggal *Kerapatan Tinggi* saja dan harus pula memasukkan *Controleur* sebagai anggotanya. Sementara itu peraturan rodi mulai dibebankan kepada rakyat.

Sultan Syarif Hasyim digantikan oleh puteranya, Tengku Sulong Sayed Kasim yang dinobatkan dengan gelar Sulthan Assaidis Syarif Kasim Sani Abdul Jalil Syaifuddin. Ia adalah sultan Siak XII dan yang terakhir (1915-1949)

Sewaktu ayahnya mangkat, ia sedang belajar di Jakarta. Su bagai wali diangkat dua orang pembesar kerajaan, Tengku Besar Sayed Syarif As Saqaf dan Datuk Lima Puluh Menteri Kerajaan. Ketika di nobatkan sebagai pengganti ayahnya yang mangkat pada tahun 1908. Sultan Siak XII ini baru berusia

16 tahun. Sebenarnya pengangkatan beliau tidak disenangi oleh pemerintah Belanda. *Controleur* mencoba menghasut rakyat supaya tidak mau memilih sultan baru dari keturunan Sultan Syarif Hasyim. Akan tetapi Datuk Empat Suku (Datuk Tanah Datar Sri Paduka Raja, Datuk Pesisir Sri Raja, Datuk Lima Puluh Sri bajuangsa, dan Datuk Kampar Maha raja Sri Wangsa) tetap menghendaki Tengku Sulong Sayed Kasim menjadi sultan.

Datuk-datuk itu sangat penting kedudukannya dalam kerajaan Siak. Mereka merupakan Dewan Kerajaan yang mengatur jalannya pemerintahan kerajaan Siak, mereka yang berhak mengangkat atau memperhentikan sultan. Kedudukan mereka diatur dalam kitab Undang-undang Dasar kerajaan Siak/*Babul Qawa'ied* (Pintu Segala Pegangan). Buku aslinya tertulis didalam huruf Arab Melayu dan disusun dalam masa pemerintahan Sultan Syarif Hasyim (1901) yang kemudian disalin ke dalam huruf latin oleh Orang Kaya M.Jamil.

Kitab Babul Qawa'ied terdiri dari 22 bab yang pada garis besarnya berisi tentang pengaturan tata pemerintahan administrasi, pengadilan (Pidana dan Perdata), lengkap dengan keterangan tentang batas-batas wewenang masing-masing orang yang memegang fungsi sebagai pelaksana.

Menurut peraturan yang tercantum dalam kitab undang-undang kerajaan Siak Babul Qawa'ied, Kerajan Siak terdiri dari 10 Propinsi, yaitu:

a. Propinsi Siak diperintah oleh Tengku Besar.
b. Propinsi Tebing Tinggi diperintah oleh Tengku Temenggung Muda.
c. Propinsi Merbau oleh Orang Kaya Setia Raja
d. Propinsi Bukitbatu oleh Datuk Laksemana.
e. Propinsi Bangko oleh Datuk Dewa Pahlawan
f. Propinsi Tanah Putih oleh Datuk Setia Maharaja.
g. Propisi Kubu oleh Datuk Jaya Perkasa.
h. Propinsi Pekanbaru oleh Datuk Syahbandar.
i. Propinsi Tapung Kanan oleh Bendahara.
j. Propinsi Tapung Kiri oleh Datuk Syarif Bendahara.

Kesepuluh pejabat yang memduduki propinsi itu selain menjadi kepala pemerintah, juga menjabat Hakim yang mengadili perkara Pidana dan Perdata dengan ketentuan-ketentuan hukum yang tercantum dalam kitab undang-undang tersebut. Misalnya untuk perkara Perdata dengan benda setinggi-tingginya 150 ringgit dan perkara Pidana dengan hukuman setinggi-tingginya sela-

ma enam bulan penjara. Di Siak terdapat empat pengadilan yaitu Hakim Kerapatan Tinggi, Hakim Polisi, Hakim Syariah dan Hakim. Kepala Suku. Dalam Kerapatan Tinggi jabatan ketua hakim dipegang oleh sultan sendiri dan dibantu oleh anggota terdiri dari Datuk Empat Suku. Sedangkan yang berhubungan dengan masalah ibadat dan adat dipegang oleh Qadhi Besar Siak, dibantu oleh Imam dari tiap propinsi.

3. Kerajaan-kerajaan di Rokan

Di daerah Rokan terdapat lima buah kerajaan *(zelf bestuurs gebied), yaitu :*

a. *Raja/Zelfbestuuder Van Rokan* di negeri Rokan
b. Raja/*Zelfbestuuder Van Kunto Darussalam* di Kota Lama.
c. Raja/*Zelfbestuuder Van Rambah* di Pasir Pengaraian
d. Raja/*Zelfbestuuder Van Tambusai* di Dalu-dalu
e. Raja/*Zelfbestuuder Van Kepenuhan di Kota Tengah.3)*

*Dengan ditanda tanganinya "Akte Van Verband* dan *Korte Verklaring"* antara Luhak dan Lima Rokan dengan Pemerintah Belanda maka kelima raja itu sudah mengaku tunduk di bawah kekuasaan Belanda. Semenjak itu mulailah Belanda sedikit demi sedikit menanamkan kukunya di daerah tersebut. Daerah Rokan adalah sebuah *onderafdeeling* di bawah *Afdeeling* Bengkalis yang termasuk *Oostkus Van Sumatera* yang berpusat di Medan. Untuk mengawasi daerah ini pemerintah Belanda menempatkan controleurnya di Pasir Pengaraian. Untuk menjaga keamanan dan menegakkan kekuasaannya Belanda juga mendirikan tangsi polisi di sana. Mulailah Belanda mencampuri urusan dalam negeri daerah itu, yang tampak dalam pengaturan pajak, pengadilan dan keamanan.

Dalam rangka pelaksanaan politik kolonial Belanda baru, yang lebih dikenal dengan nama Politik Etis, serta pelaksanaan secara berangsur-angsur desentralisasi dengan Undang-undang *Decentralisatie* 1903 Stb. 1903 No. 329 Pemerintahan Belanda membuka kemungkinan-kemungkinan membentuk daerah ontonomi di Indonesia. Kemungkinan-kemungkinan itu dicantumkan dalam undang-undang tentang ketatanegaraan Indonesia yaitu *Regeringsreglements* 1854 pasal 68a, b, dan c sekarang pasal 123, 124 dan 125 *Indische Staasregering.* Dengan adanya pasal-pasal tersebut dapatlah dibentuk daerah otonom yang disebut *"Geweestelijk* atau *Locale Raden.*

*Perturan-peraturan pelaksanaan dari Decentralisatiewet* 1903 ialah *Decentralisatie Besluit* 1905 Stb. 137 dan *Locale Raden Or-*

*donantie* 1905 Stb.No.131. Berdasarkan Peraturan-peraturan tersebut, di luar Jawa dibentuk *Locale Ressorten* (meliputi wilayah *onderafdeeling* dan *Gementen.4)*

Pelaksanaan dari undang-undang desentralisasi itu ialah dengan dikeluarkannya *Besluit Van Het Inlandsche Zelfbestuur Van Siak* pada tanggal 25 Oktober 1919 No.1 yang berisi tentang pembagian kerajaan Siak atas 5 distrik yaitu siak, Bagan Siapi-api, Tebing Tinggi, Bukitbatu, dan Pekanbaru yang dikepalai oleh *Districthoofd.*

Dalam rencana secara berangsur-angsur akan dibentuk propinsi dan kabupaten sebagai daerah otonom. Akan tetapi karena di Riau propinsi belum dibentuk, maka pelaksanaan dari undang-undang tahun 1903 masih berlaku.

*Ooskust van Sumatras* terdiri dari 34 daerah *Zelfbestuur* yang dalam teorinya diperintah secara tidak langsung atau *indirect.* Pemerintahan dilaksanakan oleh struktur kekuasaan tradisional, sedangkan pemerintah Belanda yang diwakili oleh Residen, Asisten Residen dan *Controleur* hanya bersifat mengawasi saja. Akan tetapi dalam pelaksanaan ternyata kekuasan dari *Zelfbestuurder* semakin diperkecil. Pejabat-pejabat adat semakin dikurangi kewibawaannya maupun penghasilannya. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa pengaruh desentralisasi tidak begitu terasa di daerah ini. Sedangkan pelaksanaan politik etis yang bertujuan memperbesar kekuasaan pejabat pribumi dari politik *bevoogding* kepada politik *ontvoogding* tidak dilaksanakan dengan sungguh-sungguh. Hal ini disebabkan adanya kekhawatiran dari pejabat-pejabat Belanda akan kehilangan kekuasaannya.

Pada garis besarnya di Propinsi Riau sekarang ini, ketika itu terdapat dua pembagian daerah administrasi antara daerah-daerah swapraja dan daerah *gouvernement.* pembagian daerah swapraja atau kerajaan sesuai dengan keadaan daerahnya, sedangkan pembagian daerah administrasi pemerintah Belanda sesuai pula dengan kepentingan pengawasannya terhadap daerah-daerah otonom tersebut. Untuk lebih jelasnya dapat digambarkan sebagai berikut

---

3) Mahidin Said, Rokan, *Tuanku Tambusai Berjuang*, Sri Dharma Padang, 1969, halaman 48.

4) Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Pekanbaru dalam seminar Sejarah Pekanbaru, **Pekanbaru dari Masa ke Masa,** Suatu Informasi mengenai Sejarah Pekanbaru dari segi politik, Pekanbaru, 1978, halaman 5.

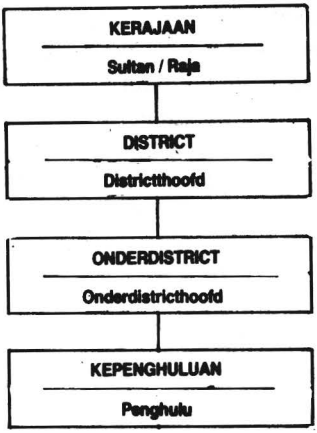


Daerah *Gouvernement* atau *Residentie* terbagi dalam *Afdeeling*, dan *Afdeeling* terbagi lagi dalam beberapa *onderafdeeling*. Bila daerah kesatuan administrasi itu meliputi daerah kerajaan, maka kesatuan terbawah adalah *onderafdeeling*. Dan bila daerah itu langsung di bawah *governement*, maka kesatuan terendahnya adalah kepenghuluan yang dijabat oleh pejabat tradisionil (adat) yang disebut menurut daerah masing-masing.

Bangsa asing berada wewenang di bawah wewenang *Gouvernement* . Masing-masing bangsa dipimpin oleh salah seorang dari golongannya yang ditunjuk oleh pemerintah *(Gouvernement)*. Penduduk Cina dikepalai oleh seorang Kapten *(Kapitein der Chinezen)*, begitu pula dengan penduduk asing lainnya. Secara *hierarchie* urutan dari kesatuan administrasi pemerintah Belanda adalah sebagai berikut:

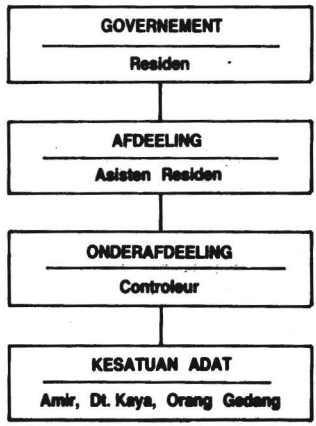

*Controleur* berada disetiap ibu kota kerajaan dan di kota-kota penting dalam arti strategis dilihat dari segi politik maupun ekonomi. Mereka melakukan pengawasan atas kebijaksanaan para raja atau sultan dan dalam menegakkan kekuasaannya, Belanda selalu memakai kekuatan meliter di belakangnya. Asal setiap kebijaksanaan yang dijalankan tidak membahayakan bagi kepentingan kekuasaan kolonial, maka para raja dan pejabat-pejabat pribumi dapat malaksanakan wewenangnya.

Sampai pecahnya Perang Dunia II di daerah Riau terdapat dua corak pemerintahan, yaitu: *Rechtsstreeks Bestuurgebied* (daerah yang diperintah langsung oleh Belanda, dan *Zelfbestuur/ende/Lancdscappen* (kerajaan-kerajaan/swapraja).

*a. Rechtsstreeks Bestuurgebied* meliputi:

1) Seluruh *Afdeeling* Tanjungpinang.
2) Reteh, Mandah, Gaung, dan Kateman.
3) Ulu Tesso dan Pucuk Rantau Indragiri
4) Pulau Bengkalis
5) Bangkinang.

b. *Zelfbestuurende Landschappen* :

1) Kerajaan Siak Sri Inderapura terdiri dari :

*District* Siak:

a) *onderdistrict* Siak
*onderdistrict* Mampura (Buantan)
*onderdistrict* Mandau
*onderdistrict* *Sungai Apit.*

*District* Senapelan:

b) *onderdistrict* Pekanbaru
*onderdistrict* Tapung Kiri
*onderdistrict* Tapung Kanan

*District* Bukitbatu:

c) *onderdistrict* Bukit Batu (Sungai Pakning)
*onderdistrict* Dumai.

*District* Tebing Tinggi:

d) *onderdistrict* Tebing Tinggi (Selat Panjang)
*onderdistrict* Merbau.

*District* Bagansiapi-api:

e) *onderdistrict* Bangko
*onderdistrict* Kubu
*onderdistrict* Tanah Putih.

2) Kerajaan Pelalawan terbagi atas:
   a) *District* Langgam
   b) *District* Pangkalan Kuras
   c) *District* Bunut
   d) *District* Serapung.

3) Kerajaan-karajaan Rokan terdiri dari lima kerajaan:
   1 Rokan
   2 Kunto Darussalam
   3 Rambah
   4 Tambusai
   5 Kepenuhan.

4) Kerajaan Gunung Sahilan terbagi atas lima daerah yang dikepalai oleh lima *Khalifah* (Camat):
   a) Gunung Sahilan
   b) Kuntu
   c) Ujung Bukit
   d) Ludai
   e) Batu Sanggan.

5) Kerajaan Singingi.

6) Kerajaan-kerajaan kecil di Kuantan terdiri dari:
   a) *District* IV Koto di Hilir
   b) *District* V koto di Tengah
   c) *District* V Koto di Mudik
   d) *District* IV Koto di Mudik
   e) *District* III Koto Hulu Tesso.

7) Kerajaan Indragiri terdiri dari:
   a) *District* Rengat
   b) *District* Siberida
   c) *District* Peranap
   d) *District* Kelayang
   e) *District* Tembilahan
   f) *District* Tempuling
   g) *District* Enok
   h) *District* Sugai Luar.

Daerah *Afdeeling* terdiri dari:

1) *Afdeeling* Tanjungpinang terdiri dari *onderafdeeling;*
   a) *Onderafdeeling* Tanjung Pinang
   b) *Onderafdeeling* Karimun

c) *Onderafdeeling* Lingga
d) *Onderafdeeling* Pulau tujuh

2) *Afdeeling* Bengkalis terabagi atas:
a) *Onderafdeeling* Bengkalis
b) *Onderafdeeling* Bagan Siapi-api
c) *Onderafdeeling* Selat Panjang
d) *Onderafdeeling* Siak
e) *Onderafdeeling* Kampar Kiri
f) *Onderafdeeling* Rokan.

3) *Afdeeling* Indragiri terdiri dari:
a) *Onderafdeeling* Rengat
b) *Onderafdeeling* Taluk Kuantan
c) *Onderafdeeling* Tembilahan

## B. KEGIATAN MASYARAKAT YANG RELEVAN DENGAN ATAU PUN YANG MERUPAKAN EMBRIO DARI PROSES KEBANGKITAN NASIONAL

Sejak pemerintahan Belanda menyodorkan *Lange Contract* dan *Korte Verklaring* kepada raja-raja Riau, maka praktis semua raja telah mengakui kekuasaan tertinggi Pemerintah Hindia Belanda di Batavia. Keunggulan senjata serta teknik yang maju dari siasat Belanda menyebabkan bangsa Indonesia tidak berhasil menghadapi setiap usaha Belanda untuk menguasai tanah dan bangsa Indonesia. Selain itu bangsa Belanda juga menggunakan kelemahan bangsa Indonesia sendiri yaitu dengan menggunakan politik adu domba antara sesama bangsa Indonesia sendiri.

Setiap perubahan politik pemerintah kolonial Belanda selalu disejalankan dengan politik dekonominya. Perubahan Politik pemrintah Belanda kepada politik etis sesungguhnya adalah untuk menunjang politik "pintu terbuka" bagi penanam modal asing. Oleh sebab itu pada permulaan abad 20 itu investasi asing semakin banyak ditanamkan di daerah Riau pada perkebunan-perkebunan dan tambang-tambang. Hal ini dimungkinkan, karena telah tercapainya pasifikasi di seluruh daerah.

Dengan masuknya modal asing itu, penduduk Riau mulai mengenal imperealisme modren. Dan sejak itu terjadilah ekploitasi besar-besaran terhadap bumi dan penduduk Riau. Perkebunan dan pertambangan mengalami kemajuan pesat. Produksi berlipat ganda yang mendatangkan keuntungan tidak sedikit bagi kaum imperealis. Sebaliknya kehidupan penduduk semakin mundur dan tidak sebanding dengan keuntungan yang diperoleh kaum kapitalis.

Keadaan yang tidak seimbang itu mudah mendatangkan keresahan dalam masyarakat. Kemerosotan dibidang materiil dan rohani menimbulkan perbincangan yang mendalam dalam masyarakat. Keadaan demikian itu telah membuka mata rakyat dan mendorong mereka untuk berbuat sesuatu yang membawa perubahan kehidupan rakyat.

"Abad ke duapuluh adalah masa pertama dalam sejarah di mana seluruh umat manusia mempunyai sikap politik yang satu dan sama, yakni nasionalisme. "5)

Demikianlah pada akhir abad XIX dengan "dipelopori oleh Raja Ali Tengku Kelana, Raja Hitam, Raja Abdullah dan lain-lain. Telah didirikan sebuah perkumpulan yang bernama *Rusydiah Club. "6)*

1. Rusydiah Club

Sultan Abdurrachman Muazam Syah (1883-1911) raja terakhir dari kerajaan Melayu Riau-Lingga menyadari, bahwa untuk mempertahankan eksistensi kerajaannya ia harus mencari jalan lain yang tidak bersifat komfrontatif dengan penguasa Belanda. Dasar pemikiran ini telah mendorong tumbuhnya organisasi baru, Rusydiah Club yang beranggotakan sebagian besar kaum bangsawan dan cerdik pandai Riau. Dengan menggunakan wadah baru tersebut tiga orang pengurus intinya, Raja Tengku Kelana, Raja Hitam dan Raja Abdullah mengadakan kegiatan-kegiatan dalam tiga lapangan, yaitu :

Kegiatan dalam lapangan agama dan ilmu pengetahuan, Kegiatan dalam lapangan ekonomi, Kegiatan dalam lapangan politik.

a. Kegiatan dalam Lapangan Agama dan Ilmu Pengetahuan

Sudah menjadi syarat dari Rusydiah Clup, bahwa seorang anggota muda baru dapat diterima menjadi anggota penuh apabila ia sudah dapat menunjukkan karya tulisnya. Karena itu setiap anggota penuh dari Rusydiah Club pernah menghasilkan karya tulis. Akan tetapi banyak naskah-naskah terbitan Rusydiah Club yang tidak dapat ditemukan lagi. Kita tidak dapat mengetahui berapa gerangan jumlah naskah yang telah dihasilkan oleh Rusydiah Club ini. Naskah-naskah yang sampai kepada kita berisi hal-hal yang berhubungan dengan sastra, bahasa, agama, dan sejarah.

---

*5) Hans Kohn, Nasionalisme, Arti dan Sejarahnya,* PT Pembangunan Jakarta, 1976 halaman 122.

6) Drs. Muchtar Lutfi, *Rusydiah Club* Universitas Riau, Pekanbaru, 1976, halaman 2.

Rusydiah Club berpusat di ibukota kerajaan Riau-Lingga pulau Penyengat Indra Sakti. Organisasi ini mempunyai percetakan tersendiri yang bernama *Mathaba'atul Riauwiyah*, artinya Percetakan Riau. Nama lain dari percetakan itu adalah *Mathaba'atul Ahmadiyah*. Pemakaian dua nama itu adalah untuk membedakan antara terbitan dinas kerajaan dengan terbitan Rusydiah club. Nama Mathaba'atul Ahmadiyah itu mungkin ada hubungannya dengan nama Raja Muda Muhammad Yusuf Al Ahmadi Yang Dipertuan Muda Riau (1858-1899).

"Pada tahun 1312 H (1896) Rusydiah Club telah menterjemahkan buku dalam bahasa Arab kedalam bahasa Melayu. Buku tersebut berjudul *Risalah Al Fawaid Al Wafiat Fi Syarhma'na Tahiyat*. Pada tahun 1313 H (1896) telah diterbitkan lagi sebuah buku bernama *Al Zikri 'ala Tarugah Al Nagsabandiah*." 7) Sedangkan karya bersama lainnya adalah Khutbah Jum'at ialah khutbah wajib untuk kerajaan Melayu Riau-Lingga, *Kanun, Riau, Lingga* yaitu kitab Undang-undang Kerajaan Melayu Riau-Lingga.

Karya perorangan antara oleh Raja Ali Tengku Kelana:

1) *Pohon Perhimpunan*
2) *Bukhiatul Aini fi Hurufil Ma'ani*
3) *Pohon Ingatan*
4) *Percakapan Si Bakhil.*

*Raja Hitam telah menulis;*

*Perjalanan Sultan Machmud Lingga Riau.*

*Istrinya Raja Aisyah menulis empat buah syair:*

*1) Khadamuddin*
2) *Seligi Tajam Bertimbal*
3) *Syamsul Anwar*
4) *Mulkatul Badrul Mukmin.*

*Raja Haji Abdullah bin Raja Hassan Riau:*

1) *Pembukaan lidah dengan teladan umpama yang mudah.*
2) *Penolong bagi yang menuntut akan pengetahuan yang patut.*
3) *Kutiban Mutiara.*
4) *Kisah 1001 Malam.*
5) *Kisah 1001 Hari.*

---

7) Drs. Muchtar Luthfi, *Ibid*, halaman 25

*Tuan Blik:*

*Syair Muhibatuzzaman* dan dua buah lagi *Syair Dandan Setia* dan *Syair Siti Zubaidah,* yang masih diragukan. Raja Zaleha mengarang *Syair Abdul Muluk.* Akan tetapi ada lagi pendapat yang mengatakan bahwa syair itu dikarang oleh Raja Ali Haji. Haji Ibrahim telah mengarang sebuah buku *Cakap Rampai Bahasa Melayu Johor.* Buku itu berisikan beberapa karangan, yaitu :

a. Anak Orang Siak Diambil Perampok Lingga.
b. Percakapan Orang Mengambil Kuli.
c. Kuasa dan Adat Raja dan Segala Menteri Besar Kecil Di-dalam Kerajaan Johor.
d. Arti Segala Gelaran di dalam Kerajaan Johor
e. Orang Jatuh ke dalam laut dibawa ke darat oleh ikan.
f. Hal Ikhwal Pengisap Candu. 8)

Dari hasil naskah *Rusydiah Club* tadi, baik yang dikarang bersama maupun perseorangan menunjukkan betapa minat mereka untuk memajukan ilmu pengetahuan dalam bentuk sastra. Tulisan mereka itu berisi Ilmu sejarah, ilmu sosial, ilmu filsafat, ilmu agama, adat istiadat, undang-undang dan lain-lain.

Pada umunya isi naskah itu menampakkan adanya usaha untuk mengembangkan agama Islam kepada masyarakat dan umat Islam umumnya. Namun dalam mengembangkan paham Islam perkumpulan *Rusydiah Club* mempunyai sifat terbuka terhadap pengaruh Barat sejauh tidak bertentangan dengan dasar ajaran Islam.

"Dalam melancarkan pendidikan dan pengajaran dalam bidang agama ini terjadi kontak yang sedemikan rupa sehingga ide-ide pembaharuan yang diinginkan *Rusydiah Club* dapat tertanam dalam dada rakyat. Jadi tujuan dari pendidikan agama yang dilakukan oleh *Rusydiah Club* bukan semata-mata memompakan pendidikan agama ansich. „9)

b. Kegiatan dalam Lapangan Politik

Fungsi utama berdirinya *Rusydiah Club* adalah untuk bidang politik. Anggota-anggota Rusydiah Club terdiri dari kaum bangsawan, cerdik cendekiawan yang sebenarnya bertu-

8) Drs. Muchtar Luthfi, *Ibid,* halaman 25 s/d 27.
9) Drs. Muchtar Luthfi, *Ibid, halaman 28.*

gas sebagai badan penasehat sultan dalam bidang politik.

Seperti kita ketahui pada masa akhir abad ke-19 dan permulaan abad ke-20, pemerintah kolonial Belanda sedang melakukan ekspansi secara intensif di daerah luar Jawa. Dengan berbagai usaha dan jalan pemerintah kolonial Belanda mencoba mengurangi kekuasaan raja-raja di Riau ini. Untuk mempertahankan kelangsungan dari eksistensi kerajaan Riau-Lingga, Perlawanan secara terang-terangan tidak akan mungkin lagi. Oleh sebab itu dicari usaha untuk membentuk sebuah badan yang legal dan tidak tampak bertentangan dengan kekuasaan Belanda.

Dibalik keberhasilan *Rusydiah Club* mengembangkan ilmu sastra bahasa Melayu, ilmu agama, filsafat, sejarah dan ilmu-ilmu sosial lainnya, Rusydiah Club juga menggunakan wadah itu sebagai tempat cerdik pandai negara memperbincangkan situasi politik waktu itu. Menyadari akan sepak terjang kaum kolonial Belanda yang semakin hari semakin menancapkan kukunya di bumi Riau ini, menyebabkan mereka harus bertindak dan berbuat sesuatu yang mendatangkan kebaikan kepada negeri dan rakyat.

Kecenderungan itu telah mendorong para bangsawan, ulama dan cerdik cendekiawan itu untuk bertindak selaku pemimpin masyarakat Melayu untuk menumbuhkan rasa harga diri yang sudah diinjak injak oleh kaum penjajah selama ini. Ini terlihat pada sikap mereka yang tidak mau menjilat kepada kaum penjajah. Dari semua karya Rusydiah Club tidak satupun dari padanya yang menyangkut kepentingan Belanda. Semua terbitan ditujukan untuk mengungkapkan dan mengembangkan kebudayaan dan sejarah Melayu sendiri.

Dengan adanya perkumpulan Rusydiah Club itu semangat dan rasa kebangsaan lebih mudah dapat dikembangkan Lembaga itu amat berjasa dalam menggalang kekuatan tenaga terpelajar dengan mempererat rasa persatuan di antara sesama mereka, sehingga tidak mudah bagi Belanda untuk mentrapkan taktik "devide at imperànya"

Adalah mungkin sekali bahwa perkumpulan itu sering menggunakan kesempatan-kesempatan yang baik untuk membicarakan masalah-masalah politik waktu itu. Apalagi Belanda sedang melancarkan tekanan terhadap kerajaan Riau-Lingga dan bermaksud akan menghapuskan kerajaan terse-

but. Letaknya yang elok dan sangat strategis itu akan dijadikan basis dalam menghadapi pengaruh Inggeris dan Singapura. Menyadari akan situasi itu, maka pada tanggal 10 Pebruari 1904 *Rusydiah Club* mengadakan pertemuan rahasia di rumah Raja ali Kelana untuk membicarakan situasi politik waktu itu.

Kegiatan Rusydiah Club dalam lapangan politik semakin meningkat dengan terbitnya sebuah brosur yang berisi kemenangan Jepang melawan Rusia dalam perang laut di Teluk Tzusima (1904-1905). Kemenangan Jepang terhadap Rusia adalah kemenangan bangsa asia terhadap bangsa barat yang sangat besar pengaruhnya. Karena kemenangan itu tidak saja berarti bagi Jepang, akan tetapi ia juga merupakan kemenangan bangsa kulit berwarna terhadap bangsa kulit putih yang menganggap dirinya super dan tidak terkalahkan.

Peristiwa kemenangan Jepang itu sangat besar pengaruhnya bagi kebangkitan Nasionalisme di Asia umumnya, dan di Riau khususnya. Kemenangan itu telah membangkitkan semangat bagi Rusydiah Club untuk menerbitkan brosur yang khusus membicarakan kemenangan Jepang tersebut.

"Sesungguhnya perjuangan kemerdekaan Indonesia tak dapat dipisahkan dari pada proses sejarah dunia umumnya. Nampak sekali bahwa proses perkembangan berhubungan erat dengan perubahan-perubahan dalam struktur dunia sejak permulaan abad ke 20. „10)

Sementara itu di Malaya semangat nasionalisme tumbuh seperti juga di negara-negara jajahan lainnya di Asia. Salah satu kerajaan yang paling gigih menantang kekuasaa Inggeris adalah kerajaan Johor. Seperti kita ketahui bahwa antara kerajaan Johor dengan kerajaan Melayu Riau-Lingga sangat erat hubungannya. Kedua kerajaan itu tidak saja mempunyai hubungan darah dan sejarah akan tetapi dulunya memang merupakan satu kerajaan jua. Hanya sejarah kolonial Baratlah yang menyebabkan mereka terpisah-pisah. Itulah sebabnya maka setiap peristiwa yang terjadi di Semenanjung Malaya selalu di tanggapi oleh Kerajaan Melayu Riau-Lingga dan sebaliknya.

---

10) Prof.Ahmad Subardjo Djoyoadisuryo, *Peranan Ide-ide dalam Pergerakan Kemerdekaan Indonesia*, *Idayu Press*, *Jakarta*, *1977*, *halaman 10*.

Atas anjuran dari Raja Hitam dan kawan-kawannya diterbitkan sebuah "Majalah Al Imam" di Singapura pada tahun (1906). "Motto majalah tersebut : menuntun pikiran orang Islam ke jalan yang suci, benar dan ikhlas. "Dari motto tersebut jelaslah sudah bahwa tujuan dari majalah itu adalah untuk menuntun pikiran orang Islam kearah tercapainya persatuan yang dimaksud dengan orang Islam di sini adalah orang Islam di Riau dan Semenanjung Malaya. Ke jalan yang suci, benar dan ikhlas artinya ialah ke jalan kemerdekaan.

Pada tahun 1911 oleh sebagian anggota Rusydiah Club yang menyingkir ke Singapura didirikan percetakan *Al Ahmadiah Press* yang separoh modalnya dari Sarikat Dagang Akhmadi di Midai (Pulau Tujuh). Dari catatan harian seorang anggota Rusydiah Club yang bernama R.H.Abbas bin H.Abdullah Hamid dapat diketahui kegiatan-kegiatan politik yang ditujukan untuk menyingkirkan kekuasaan Belanda dari Riau.

Kegiatan itu berjalan pada masa Raja Riau terakhir Abdurrachman Muazam Syah menyingkir ke Singapura sekitar tahun 1912. Pada awal tahun itu ada usaha dari Raja Abdurrachman Muazam Syah dengan bantuan Sultan Johor hendak merebut Riau dari tangan Belanda. Usaha kearah itu cukup mendapat tanggapan dari masyarakat, terbukti dengan tersiarnya berita itu di surat-surat kabar. Selain itu Sultan Riau juga mengadakan kontak dengan Sultan Trenggano yang juga mempunyai hubungan keluarga.

Walaupun usaha itu tidak pernah direalisir, namun sikap perlawanan itu tidak kunjung habis. Hal ini terbukti dengan adanya kegiatan rahasia menghubungi Jepang. Dengan bantuan biaya dari anggota-anggota *Rusydiah Club* dan rakyat Raja Hitam berangkat ke Jepang pada tahun 1913. Ia pergi ke negeri itu untuk menghubungi Kaisar Jepang minta bantuan untuk mengusir Belanda. Permulaan abad ke-20 itu Jepang termasuk salah satu negara imperialisme yang turut berlomba bersama-sama dengan negara-negara Barat lainnya. Daerah Riau yang strategis dan kaya dengan potensi alamnya tentu saja mendatangkan minat Jepang. Banyak orang Jepang yang datang ke daerah Riau untuk berniaga

atau berusaha lainnya, seperti berkebun, dan sebagainya. Tentu saja kedatangan missi Raja Hitam itu diterima dengan tangan terbuka oleh Jepang.

Usaha Raja Hitam itu sangat menggegerkan pemerintah Belanda. Belanda semakin bertindak keras, semua rakyat yang telah membantu biaya perjalanan itu digeledah. Sayang Raja Hitam akhirnya meninggal di sana dan menurut kabarnya karena diracun oleh konsul Belanda.

Khawatir akan kegiatan Rusydiah Club yang berbahaya itu pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1913 menghapuskan kerajaan Riau-Lingga. Setelah itu ujud perlawanan dialihkan kepada bidang pendidikan, yaitu dengan mendirikan *Riouw Studie Fonds* untuk membantu putra-putra Riau yang tidak mampu untuk melanjutkan sekolahnya.

c. Kegiatan di Lapangan Ekonomi

Kegiatan Rusydiah Club dalam lapangan ekonomi pertama kali dirintis oleh Raja Haji Ahmad (1903) di Pulau Midai. Dari usaha kecil-kecilan itu, kemudian berubah menjadi Sarikat Dagang Ahmadi yang didirikan oleh tiga orang bangsawan Kerajaan Melayu Riau (Raja Haji Ahmad, Raja Haji Ali dan Raja Haji Hitam) pada tahun 1906. Dalam tahun itu juga dengan berkongsi dengan Raja Haji Ali Tengku Kelana *Asyarikatul Ahmadiah* (Serikat Dagang Ahmadi) membeli sebuah kapal.

Kegiatan Rusydiah Club dalam bidang ekonomi baru jelas sesudah Sultan menyingkir ke Singapura (1911)

Sarikat Dagang Ahmadi dengan cepat terus berkembang dan jumlah anggota yang menanamkan andilnya juga semakin banyak. Sarikat ini terutama bergerak dalam perdagangan kopra. Hampir dua pertiga dari kebun kelapa di Pulau Midai adalah kepunyaan Sarikat Dagang Ahmadi. Karena itu tidak mengherankan, apabila separuh dari modal Al Ahmadiah Press di Singapura adalah berasal dari sarikat ini. Untuk memudahkan pemasaran kopra itu pada tahun 1920 dibuka pula "*Branch of Ahmadi*" yang merupakan bagian dari Al Ahmadi Press di Singapura.

Dengan demikian *Rusydiah Club* merupakan sebuah perkumpulan yang bertujuan melawan dominasi kekuasaan Belanda, baik di bidang politik, ekonomi, maupun sosial. Dan memang ".... dimana-mana nasionalisme itu berbeda-beda si-

fatnya menurut keadaan sejarah yang khusus dan struktur yang khusus pula di setiap negeri. „11)

Walaupun usaha itu terbatas di lingkungan daerah Melayu, namun tidak dapat disangkal bahwa kegiatan-kegiatan *Rusydiah Club* itu adalah relevan dengan usaha meningkatkan kesadaran nasional bangsa.

2. Sultan Syarif Kasim

Sultan Syarif Kasim sebagai Sultan Siak XII memang beralasan. Ternyata sesudah Sultan Syarif Kasim dinobatkan ia tidak selalu menerima campur tangan pemerintah Belanda dalam urusan kerajaannya. Perasaan bangga sebagai kerajaan yang merdeka masih bersemi dalam dada sultan, dan sebagai seorang pemimpin rakyat yang telah mendapat pendidikan Barat di Batavia ia lebih mampu melihat jauh ke depan. Karena itu setiap tekanan yang dijalankan oleh pemerintah Belanda selalu dielakkannya. Namun Belanda tidak kenal menyerah untuk terus mendesak sultan sehingga sedikit demi sedikit kekuasaannya semakin dikurangi. Keadaan ini sangat meresahkan hati sultan.

Untuk itu "sultan memandang perlu untuk membangun semacam kekuatan fisik. Sultan membentuk pengawal istana dan kantor-kantor yang dilengkapi dengan pakaian seragam, persenjataan tajam dan senapan lantak peninggalan Sultan Hasyim" 12).

Terdorong oleh kekhawatiran atas tekanan Belanda itu Sultan juga memanggil pemuda-pemuda untuk memasuki *Volunteer* yang oleh rakyat disebut "belantiar". Pemuda-pemuda tersebut dilatih secara militer dan digunakan sebagai pasukan kehormatan kerajaan.

"Semuanya itu merupakan bibit untuk membangkitkan semangat juang dalam mempertahankan diri dan nasib rakyat". 13) Kegiatan sultan ini menimbulkan kecurigaan fihak Belanda. Oleh karena itu Belanda mulai berangsur-angsur menambah pasukan militernya dan menempatkan mereka dalam sebuah tangsi yang letaknya berhadapan dengan istana sultan. Untuk menakut-nakuti rakyat, Belanda memperlihatkan kekuatan mili-

---

11) Hans Kohn, *Nasionalisme Arti dan Sejarahnya*. PT Pembangunan, Jakarta, 1976, halaman 1122.

12) *Majalah Canang* "Sultan Syarif Kasim II, Jadikah Beliau Diangkat Sebagai Pahlawan Nasional ?", Januari, 1978, halaman 32.

13) *Majalah Canang*, No. Perdana.

ternya. Pasukan Belanda itu setiap hari mengadakan patroli ke kampung-kampung.

3. Sultan Zainal Mangkat Madiun.

Salah seorang dari raja-raja Rokan yang tidak sudi takluk kepada pemerintah Belanda adalah Sultan Zainal dari kerajaan Tambusai. *Controleur* pertama yang ditempatkan di daerah Rokan ialah Quast (1901). Secara berangsur-angsur Belanda menyodorkan *Korte Verklaring* kepada raja-raja Rokan yang lima itu. "Seluruh raja-raja menyambut baik kecuali Sultan Zainal Abidin di Rantau Kasai. Beliau tegas menolak persahabatan dalam bentuk apapun dengan pihak Belanda. „14)

Sultan Zainal memang sudah jengkel dengan Belanda, apalagi karena Belanda berhasil mempergunakan politik adu dombanya, yaitu adu domba antara Sultan Siak dengan Sultan Zainal sendiri. Dalam hal ini Belanda sengaja memihak kepada sultan Siak. Kemudian sultan Zainal mencoba menghubungi kerajaan Perak dan Ipoh di Malaya dalam usaha menambah kekuatan maupun dalam rangka usaha penyebaran agama Islam. Usaha kedua ialah dengan minta bantuan kepada sultan Turki di Istambul. Delegasi ke Istambul itu terdiri dari Tengku Tempeng gelar T.H. Abdul Murad, H.A. Hamid, Mohammad Selung gelar T.H. Ahmad dan H.A.Majid. Dari Istambul mereka langsung naik haji ke Mekah. Akan tetapi bantuan yang diharapkan untuk menentang Belanda itu tidak di dapat, antara lain disebabkan karena sulitnya perhubungan di tambah lagi oleh syarat lain yang tidak terpenuhi seperti luas daerah kerajaan, jumlah lasykar, jumlah rakyat, dan sebagainya. Bantuan yang diperoleh hanya yang berhubungan dengan gerakan memperluas dan memajukan agama Islam.

Usaha-usaha dari Sultan Zainal dipandang oleh pemerintah Belanda sangat membahayakan kepentingan Belanda. Dua kali utusan yang dikirim Belanda untuk membujuknya tidak berhasil melunakkan hati sultan Zainal. Ia bertekad sebagai seorang Islam pantang menyerah kepada orang kafir. Akhirnya *controleur* bersama-sama serdadu Belanda menangkap sultan Zainal dan memenjarakannya di Betawi (Jakarta). Terakhir ia dibuang ke

---

14) Mahidin Said, *Rokan, Tuanku Tambusai Berjuang*, Sri Dharma, Padang, Halaman 40.

15) Mahidin Said, *Ibid*, halaman 47.

Madiun dan mangkat di sana. "Keberanian dan keimanan Sultan Zainal Abidin tetap tergores dalam hati sanubari penduduk Tambusasi Rokan, sebagai salah seorang pemimpin yang anti penjajahan. „15) Oleh rakyat ia lebih dikenal dengan sebutan Tengku Mangkat Madiun.

## C. INTERAKSI DI DAERAH DENGAN KEGIATAN PARTAI DAN ORGANISASI

### 1. Politik

Dari uraian di atas tadi jelas bahwa faktor agama yaitu agama Islam sangat menentukan dalam setiap kegiatan kemasyarakatan. Bagi penguasa-penguasa masyarakat ada kecendrungan akan tanggung jawab politis maupun moral terhadap rakyat. Ini sebagai akibat dari proses asimilasi yang dalam antara unsur-unsur Islam dengan kebudayaan setempat, sehingga nilai-nilai dan norma-norma agama sudah berpadu dengan kebudayaan daerah.

Oleh sebab itu tidak dapat dimungkiri lagi bahwa agama Islam mempunyai peranan penting dalam aktivitas masyarakat yang menimbulkan kesadaran nasional, dan menjadi dasar tumbuhnya organisasi politik.

Situasi dan kondisi daerah yang demikian itulah yang menyebabkan masyarakat sangat sensitif dengan kegiatan-kegiatan yang berlatar belakang agama. Jadi wajar bila masyarakat daerah Riau lebih tertarik dengan partai atau organisasi yang memakai agama Islam sebagai landasan perjuangannya.

Organisasi Sarikat Islam (1911) yang berlatar belakang sosial ekonomis dan menggunakan agama Islam sebagai dasar persatuan melawan setiap tindakan terhadap penduduk Islam mendapat sambutan yang baik di daerah ini.

Meskipun Budi Utomo (1908) lebih dahulu muncul di Jawa dari pada Sarikat Islam, akan tetapi karena organisasi itu merupakan perkumpulan dari priyayi-priyayi atau abtenar-abtenar, kurang mendapat sambutan dari rakyat. Berbeda dengan Sarikat Islam, perkumpulan ini berhasil sampai ke lapisan paling bawah dari pada rakyat. Apalagi karena tujuan perjuangannya langsung mengenai kepentingan rakyat bawah. Karena itu di Riau tidak ada pengaruh Budi Utomo.

Perjuangan yang diusahakan oleh Sarikat Islam sesuai sekali dengan kebutuhan penduduk Riau. Pertama penduduk Riau memang banyak yang berusaha di bidang perdagangan. Kedua da-

lam usahanya itu mereka selalu mendapat saingan kuat dari penduduk Cina. Dibandingkan dengan di Jawa, maka peranan orang Cina benar-benar menentukan dalam ekonomi daerah ini. "Sesudah tahun 1900 pertumbuhan perkebunan dan tambang-tambang timah meningkat; akibatnya terjadi perpindahan penduduk Cina besar-besaran. Selama 20 tahun saja jumlah orang Cina yang memasuki pulau-pulau di Sumatera mencapai 125.000 orang. „16) Ketiga perjuangan yang berlandaskan agama Islam adalah faham yang sudah berurat berakar atau sudah mendarah mendaging dalam jiwa penduduk Riau.

Sarikat Islam pertama-tama dikenal di Riau melalui daerah Sumatera Barat. Faham ini masuk ke daerah Riau, dibawa oleh pemuka-pemuka agama dan pedagang-pedagang.

Dengan dipelopori oleh Haji Mohammad Amin, Sarikat Islam berdiri di Pekanbaru pada tahun 1916, dengan susunan pengurusnya sebagai berikut :

| | |
|---|---|
| "*Voorzitter* | : Abdul Rachman |
| *Vice voorzitter* | : Haji Muhammad Amin |
| Sekretaris | : A. Salam |
| *Vice* Sekretaris | : Hasan Guru |
| Komisaris | : Muhamad Jamal„. 17) |

Anggota-anggota Sarikat Islam mempunyai kode sendiri untuk memudahkan hubungan antara satu anggota dengan anggota yang lainnya. Pada tahun 1917 dibentuk Koperasi Sarikat Islam di Pekanbaru sebagai bagian dari Sarikat Dagang Islam Pekanbaru dengan susunan pengurusnya sebagai berikut :

| | |
|---|---|
| "Ketua | : Haji Muhammad Amin |
| Sekretaris | : Hasan Guru |
| Bendahara | : A. Salam. „18) |

Pada tahun 1918 pengurus Sarikat Islam Pekanbaru berubah susunannya menjadi :

| | |
|---|---|
| "*Voorzitter* | : Mohamad Jamal |
| *Vice Voorzitter* | : Haji Muhammad Amin |
| Sekretaris | : Hasan Guru |
| Komisaris I | : A. Salam |
| Komisaris II | : Ibrahim. " |

16) Benard. H.M. Vlekke, *Nusantara (Sejarah Indonesia)*, Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur, 1967, halaman 346.

17) Team Penyusun dan Penulisan Sejarah Riau, UNRI, *Sejarah Riau;* III, 1975, halaman 485.

Di pulau Bengkalis Sarikat Islam dibawa dari Sumatera Timur, dan dipelopori oleh Haji Muhammad pada tahun 1917. Selaku presidennya telah dipilih Encik Entik (paman H.Muhammad). Kepada anggota diwajibkan terlebih dahulu mengucapkan sumpah serta meminum air yasin.

Perkembangan organisasi Sarikat Islam nampaknya sangat mengkhawatirkan pemerintah Belanda. Karena Sarikat Islam memberi dorongan untuk bekerja sama antar penduduk pribumi melawan rongrongan ekonomi dari pada penduduk Cina. Gerakan Sarikat Islam itu ternyata mendapat sokongan dari masyarakat sampai ke pelosok desa sehingga gerakannya berkembang ke arah perjuangan kemerdekaan bangsa. 19)

Perkembangannya yang seperti kilat itu dipandang Belanda sangat berbahaya, karena apabila semua penduduk yang beragama Islam dapat bersatu sukarlah bagi Belanda untuk mengendalikannya. Haji Muhammad Amin kemudian dipanggil oleh Komisaris Polisi Stegeman.

Komisaris Polisi itu menganjurkan kepadanya bila ia ingin berpolitik, sebaiknya pindah saja ke Siak.

Perlu diketahui bahwa daerah Bengkalis pada masa itu dijadikan tempat pembuangan Belanda Indo yang bersimpati terhadap perjuangan rakyat Indonesia. Mereka itu antara lain adalah de Korte (bea cukai), Dornick, Stockvis (kepala pajak). Di Siak Sarikat Islam dipelopori oleh Muhamad, abang Dt. Ahmad, Datuk Anis dan lain-lain.

Pada tahun 1918 di Pekanbaru terbentuk Insulinde di bawah pimpinan Abdul Rachman Malin Marajo yang bekerja sebagai "bockhouding" PU. Kemudian ia membentuk Lumbung Desa di kampung-kampung dan berusaha menyediakan bahan-bahan keperluan anggota. usaha ini ditunjang oleh majunya perdagangan sampai ke Siam (beras). Akan tetapi pada tahun 1928 ia ditangkap Belanda dan dijatuhi hukuman selama 7 tahun di Madiun.

Pada tahun 1926 Jamalako Sutan, tamatan Normaal School di Langsa mendirikan Partai Komunis Indonesia di Taluk Kuantan. Kegiatannya yang menonjol adalah dalam bidang pendidikan. Ia juga sering menulis di koran tentang keburukan-keburukan pemerintah kolonial Belanda. Ide PKI dibawa dari Silungkang oleh Dt.Simarajo dan Suman Dt.Magang.

---

18) *Ibid.*

19) Brian Harrison, *Asia Tenggara. Suatu Sejarah Ringkas*, Dewan Bahasa dan Pustaka Kuala Lumpur, 1966, halaman 273, 274.

Demikianlah sekitar dasawarsa kedua abad 20 Sarikat Islam sudah berkembang di beberapa tempat di daerah Riau. Sedangkan organisasi Muhammadiyah baru sekitar dasawarsa ketiga mengadakan kegiatan di sini.

Tampaknya organisasi yang bersifat sosial belum merupakan suatu kebutuhan masyarakat Riau waktu itu. Dalam masa 1900 – 1928 itu belum ada satupun organisasi sosial yang tumbuh di sana. Hal ini barangkali ada hubungannya dengan sifat masyarakat Riau yang masih famili verban. Dan Sultan Siak sendiripun secara berkala membantu rakyat dengan membagikan zakat kepada rakyat. Rasa kekeluargaan dan sifat gotong royong yang kuat, ditambah pula ajaran agama yang kuat menyebabkan orang senang saling tolong menolong. Apalagi jumlah penduduk Riau ketika itu menjadi masalah.

2. Wanita.

Karena adat istiadat yang membatasi gerak kaum wanita sangat kuat, maka aktivitas wanita kurang sekali di daerah ini. Di seluruh Riau pada zaman Belanda tidak terdapat satupun sekolah gadis *(Meisjes)*. Di Sumatera Barat terdapat sejumlah 43 buah sekolah *Meisjes School*, Sumatera Timur lima buah, Tapanuli lima buah, Jambi satu, Bengkulu satu, Palembang tiga dan Lampung dua. Baru pada akhir kekuasaan Belanda tahun 1942 didirikan *Meisjes Vervolgschool* di Taluk Kuantan dengan guru kepalanya Sariamin Ismail.

Meskipun pemerintah Belanda telah mendirikan beberapa buah sekolah desa dan sekolah *gouvernement*, namun adat yang kuat tidak memberi kemungkinan bagi wanitanya untuk maju. Bahkan di daerah Riau bagian Timur kaum wanitanya jarang yang ke luar rumah. Berbeda halnya dengan kaum wanita di Riau bagian Barat, di sana kaum perempuan lebih banyak bekerja di ladang dan di sawah dari pada kaum lelakinya.

"Pergerakan wanita dalam permulaan adalah gerak orang seorang, atau beberapa orang saja. „20) Mereka mengadakan kegiatan-kegiatan untuk kepentingan kaum wanita.

Keadaan demikian itu baru mengalami perubahaan dengan masuknya organisasi yang lebih modern yaitu Muhammadiyah. Akan tetapi Muhammadiyah tidak jarang mendapat tantangan dari kaum tua yang konservatif. Sampai akhir pemerintah Hin-

---

20) AK Pringgodigdo SH, *Sejarah Pergerakan Rakyat Indonesia*, Dian Rakyat, Jakarta, 1967, halaman 19

dia Belanda hanya terdapat tiga orang guru wanita asal Riau, yaitu Asiah Harlan (Rengat), Djum (Pasir Pengaraiyan) dan Raja Hatijah (Tanjungpinang).

Keadaan kaum wanita yang menyedihkan itu mendapat perhatian permaisuri Sultan Siak Syarif Kasim II yang dengan bantuan Sultan berusaha untuk memberikan jalan bagi kemajuan kaum wanita Riau. Gagasan itu mendapat tanggapan yang baik dari sultan yang kemudian mendirikan sebuah sekolah khusus untuk kaum perempuan yang diberi nama *"Sulthana Latifah School"* (1928). Inilah sekolah putri pertama di Riau.

3. Agama

Sebagian besar penduduk Riau adalah penganut agama Islam yang taat. Agama Islam masuk ke daerah Riau pertama-pertama dibawa oleh pedagang-pedagang Melayu yang sudah mendapat pengaruh Islam dari Aceh sekitar abad-13. Proses perkembangan itu semakin meluas setelah kota Melaka tumbuh menjadi kota pelabuhan yang ramai dikunjungi oleh pedagang-pedagang Islam dari Arab, Persia dan Gujarat. Karena banyaknya orang-orang Melayu yang datang berdagang, bahkan ada yang tinggal menetap di sana, maka agama Islam semakin berkembang di daerah Riau. Hal ini dipercepat lagi dengan direbutnya kota pelabuhan Melaka oleh Portugis di tahun 1511. 21) Raja Melayu Sultan Mahmud Syah terpaksa memindahkan pusat kekuasaannya ke pulau Bintan.

Sejak itu kerajaannya bernama Kemaharajaan Melayu Riau. Daerah kekuasaanya hampir meliputi seluruh Kepulauan Riau dan daratannya. Termasuk kerajaan Siak, Indragiri, Lingga, Kampar dan Rokan. Dalam abad ke-17 kerajaan Aceh di bawah pimpinan Sultan Iskandar Muda berhasil meluaskan daerah kuasanya hampir meliputi seluruh Sumatera dan Malaya. Seperti kita ketahui Aceh adalah kerajaan Islam yang pertama di Indonesia bahkan Aceh dijuluki orang sebagai "Serambi Mekkah".

Pada abad ke-16 boleh dikatakan bahwa Islam sudah menjadi agama rakyat di seluruh daerah Riau. Semua raja-raja Riau dengan bangga memakai gelar sultan dengan nama-nama Arab. Sejak itu agama Islam sudah menjadi agama kerajaan, pengaruhnya sangat mendalam bagi kehidupan masyarakat. Segala adat istiadat haruslah disesuaikan dengan ajaran Islam. Pendeknya se-

21) Drs.Soebandi Cs., *Pengantar Sejarah dan Ajaran Islam*, Ganaco, NV Jakarta, 1961, halaman 61.

gala tatakehidupan dalam pemerintahan, pengadilan, perkawinan, hukum warisan dan sebagainya berpedoman kepada ketentuan dalam Islam. Dengan demikian melalui agama Islam terjadilah penyerapan unsur-unsur kebudayaan di daerah ini.

Meskipun Islam sudah benar-benar merupakan agama rakyat, unsur-unsur Hindu dan Budha belumlah lenyap sama sekali. Kebiasaan-kebiasaan lama sebagian masih hidup di kalangan penduduknya. Bahkan kepercayaan animisme dan dinamisme masih terdapat di mana-mana. Dalam kehidupan sehari-hari jelas mereka masih melakukan kebiasaan lama seperti menggunakan mantera-mantera, nujum, takhyul serta pemujaan terhadap benda-benda keramat. Di sini tampak adanya asimilasi antara kepercayaan Islam dengan kepercayaan animisme dan dinamisme, Hindu dan Budha. Mantera-mantera sering dicampur aduk dengan ayat-ayat Al Quran. Upacara Hindu meniga hari, menujuh hari dan seterusnya masih dilakukan dikalangan penduduk sampai sekarang. Malah ada penduduk yang masih hidup dalam zaman purba seperti suku Sakai dan suku Laut.

Agama Kung Fu Zu hanya dianut oleh penduduk Cina, dan agama Nasrani (Protestan, Katolik) yang dibawa oleh orang Barat tidak banyak jumlah penganutnya. Satu-satunya gereja yang ada pada masa ini ialah di Tanjung Pinang yang disebut Gereja Ayam (ada patung ayam di puncaknya). Gereja ini khusus digunakan bagi orang-orang Belanda dan serdadu Ambon. Gereja itu sudah berdiri sejak tahun 1912.

4. Pendidikan

Politik Etis yang didengung-dengungkan pemerintah Belanda tidak banyak atau kurang sekali pengaruhnya di daerah Riau. Gagasan politik etis yang dipelopori oleh tokoh-tokoh Belanda yang berpikiran progresif itu berpendapat, bahwa kemajuan rakyat Indonesia harus bermula dari pendidikan. Namun dalam kenyataan tidaklah dilaksanakan dengan sepenuhnya. Gambaran bagaimana pelaksanaan dari politik etis ini di Riau dapat dilihat dari angka statistik yang diambil tahun 1936. Statistik ini menunjukkan bahwa jumlah penduduk Riau rata-rata 1,5 orang per km dan yang bersekolah atau melek huruf hanya 3% saja. 22)

---

22) "Wawancara dengan Sariamin Ismail di Pekanbaru", pada tanggal 22 September 1978.

Sebelum penterapan politik etis masyarakat mendapat pendidikan dari para ulama (guru agama) yang diberikan di surau-surau, madrasah-madrasah dan di mesjid-mesjid. Yang diajarkan terutama yang ada hubungannya dengan pelajaran agama seperti membaca Al Quran, Ilmu Fikih, Ilmu Al Qalam. Kadang-kadang ada juga diajarkan cara menulis Arab dan Melayu Arab. Tapi bukan pula berarti orang yang pandai membaca Al Quran pandai pula menulis Arab/Melayu Arab. Karena pelajaran Al Quran itu ada juga yang dihafal luar kepala.

Kepandaian membaca huruf Melayu Arab itu ada juga yang diperdapat dari teman-teman. Orang-orang yang senang membaca buku-buku cerita syair yang bertulisan Melayu Arab mengajarkan membaca pada kawan-kawannya yang mau membaca atau meminjam buku itu. Kitab bacaan itu adalah buku-buku syair dan cerita raja-raja atau pahlawan-pahlawan.

Wanitapun banyak yang pandai membaca huruf Melayu. Dulu orang-orang Melayu senang sekali membaca kitab-kitab syair maupun cerita-cerita yang berisi cerita raja-raja dan pahlawan-pahlawan. Buku itu ditulis dalam bahasa Melayu dengan tulisan tangan. Karena jumlahnya sangat sedikit buku itu sering beredar dari tangan ke tangan. Biasanya orang yang membaca dikelilingi oleh beberapa orang. Sambil mendengar orang-orang itu juga menyimak. Si pembaca sambil membaca juga menunjuk-nunjuk huruf yang dibacanya itu. Akhirnya karena sering menyimak dan mengulang-ulang membaca kitab itu sipendengar tadi menjadi faham pula membacanya. "Caranya lebih dahulu membaca kalimat kemudian membaca kata-kata, dan akhirnya mengenal huruf. „23)

Selain itu ada juga pelajaran atau latihan ketangkasan, pencak silat dan pendidikan budi pekerti. Kepada murid yang telah tamat belajar silat diberikan nasehat-nasehat. Isi nasehat itu umpamanya : tidak boleh sombong dengan kepandaian yang ada, pakai ilmu padi semakin berisi semakin merunduk, harus bersifat kesatria, tidak boleh mencari lawan, melawan guru dan orang tua, karena bisa kualat, dan sebagainya.

---

23) H.Soeman Hs., "Pendidikan dan Pengajaran di Pekanbaru, Prasaran pada Seminar Sejarah Kota Pekanbaru di Universitas Riau, Pekanbaru, 1978, halaman 2.

24) *Majalah Canang*, "Pendidikan tempo dulu dan Masa kini di Riau", No.5, Mei 1978, Pekanbaru, hal.4.

Pemerintah Belanda pertama kali mendirikan sekolah ialah di Tanjung Pinang (1833). Menurut laporan Kolonial Verslaag, tahun 1880 di Keresidenan Riau baru ada tiga buah sekolah bumi putera yaitu di Bengkalis dengan jumlah murid 44 orang, di Tanjung Pinang dan Lingga 109 orang. Kolonial Verslaag tahun 1905 melaporkan, bahwa di Riau terdapat empat sekolah gubernemen dengan jumlah murid sebanyak 258 orang. 24)

Sekolah *Volkschool* disebut juga Sekolah Desa, yaitu sekolah *landschap*. Sekolah Desa lamanya tiga tahun yaitu sampai klas tiga. Tamat Sekolah Desa dapat melanjutkan ke Sekolah Melayu (Gouvernement Inlandsche School) sampai klas lima. *Gouvernement Inlandsche School* sampai kelas lima. *Governement Inlandsche School* biasanya didirikan di kota-kota yang agak besar tempat kedudukan *Controleur*, seperti di Siak, Bengkalis Selat Panjang, Bagan Siapi-api, Rengat, Taluk, Tembilahan, Tanjung Pinang.

Untuk menanamkan perasaan cinta kepada raja Belanda, kepada setiap murid yang tamat diberikan ijazah yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah dan *Controleur*. Selain itu kepada murid tersebut diberikan hadiah sebuah gambar berwarna ratu Belanda. Biasanya gambar itu digantungkan di dinding rumah yang merupakan kebanggaan dan lambang status. "Inilah salah satu cara bagi Belanda untuk menegakkan penjajahannya. „25)

Pendidikan di jaman kolonial Belanda diperuntukan bagi kepentingan penjajah. Salah satu ciri sistem pendidikannya adalah untuk membantu kelestarian penjajahan.

Pada tahun 1924 pemerintah Belanda mendirikan dua buah sekolah yang berbahasa Belanda *(Hollandsch Inlandsche School)* atau lebih dikenal dengan HIS, yaitu di Siak dan Tanjung Pinang.

Pada tahun 1920 di Tanjung Pinang didirikan HCS *(Hollands Chineze School)* untuk anak Cina, dan orang berpangkat, serta anak-anak orang kaya. Pada tahun 1924 dirubah menjadi HIS. Sedangkan untuk anak orang Eropah sendiri didirikan *Eroposche Lagere School*. 27)

---

27) Dr.Sarino Mangunpranoto, *Pendidikan Sebagai System Perjoangan Kemerdekaan Indonesia*, Yayasan Idayu, Jakarta, 1926 halaman 16.
28) Majalah Canang, Op.cit., halaman 5.

Sekolah HIS tidak membatasi muridnya, dalam arti bahwa sekolah itu bukan semata-mata diperuntukkan bagi anak-anak bangsawan, kaya dan berpangkat saja. Akan tetapi karena uang sekolahnya tinggi, maka praktis anak-anak rakyat biasa tidak sanggup memasukinya. Apa lagi karena di seluruh Riau hanya terdapat 2 buah saja yaitu di Siak dan di Tanjung Pinang. Sampai pecah Perang Dunia II sekolah yang tertinggi di Riau adalah HIS.

Dari gambaran di atas jelas sekali bahwa Belanda bermuka dua dalam melaksanakan politik etis. Sekolah didirikan sesungguhnya bukanlah semata-mata untuk memajukan rakyat. Akan tetapi sekolah mereka pergunakan untuk memproduksi tenaga-tenaga pegawai rendahan guna melengkapi kebutuhan mereka akan Juru-ju ru tulis, opas, pengantar surat, polisi dinar, dan sebagainya. Sebaliknya pemerintah Belanda juga merasa khawatir bila rakyat menjadi pintar, sehingga membahayakan kelanjutan kekuasaan mereka di Hindia Belanda.

Kenyataan menunjukkan bahwa sekolah sekarang dapat menentukan kedudukan orang dalam masyarakat. Status sosial seseorang ditentukan pula oleh tingkat sekolahnya. Dengan sendirinya politik etis telah membawa pengaruh kepada status tradisional yang berpegang kepada turunan dan kekayaan. Ukuran-ukuran baru itu membawa pula perobahan kepada stratifikasi sosial. 29)

Kurangnya pemerintah menyediakan sarana pendidikan telah merangsang penduduk pribumi untuk mendirikan sekolah swasta. HIS yang sudah didirikan di Siak (1915) atas perintah sultan membuka kesempatan bagi anak-anak seluruh kerajaan. Sultan menyediakan biaya pendidikan untuk membantu anak-anak itu dengan mendirikan asrama. "Sultan memandang sekolah Belanda sedikit sekali memberikan pendidikan yang bersifat patriotisme dan lebih banyak menjurus pada pembentukan *ambtenaren*". *30)* Karena itu dalam tahun 1917, dua tahun setelah HIS berdiri, Sultan mendirikan sekolah agama Islam Madrasah *Taufiqiah el Hasyimiah* tingkat ibtidaiyah dan sanawiyah. Kebanyakan guru-gurunya berasal dari Sumatera Barat, bahkan ada yang tamatan dari Universitas Al Azhar Kairo.

---

29) Sartono Kartodirdjo, et.al. *Sejarah Nasional V*. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1975. halaman 155.

30) *Majalah Canang*. Sultan Syarif Kasim II. Canang No. Perdana. Pekanbaru. 1978. halaman 32

Untuk murid-murid puteri oleh permaisuri sultan didirikan *Sulthana Latifah School* (1928). Kemudian tahun 1929 *Madrasatun Nişa* di mana sultan menyediakan beasiswa untuk siswa yang tamat dan melanjutkan ke Diniah Putri di Padang Panjang.

Di Tanjung Pinang terdapat sekolah swasta bernama Madrasah Islamiyah yang dipimpin oleh Yahya Siddiq. Sedangkan di Kelayang terdapat Madrasah di bawah pimpinan Abu Thalib yang didirikan setelah ia kembali dari Parabek (Bukittinggi) pada tahun 1925. Pada tahun 1928 di Taluk Kuantan didirikan Perguruan Agama Islam yang diasuh Umar Abdullah.

5. *Seni Budaya*

Seni budaya pada masa ini adalah lanjutan dari seni budaya sebelumnya yang mengalami perubahan-perubahan dan perkembangannya.

Pada garis besarnya terdapat persamaan di semua tempat. Perbedaan yang ditemukan adalah karena pengaruh letak geografis terutama perbedaan antara daerah pantai/pulau dan daerah daratan. Daerah Kepulauan dan pantai banyak mendapat pengaruh dari kebudayaan Semenanjung Melayu, dan daerah daratan mendapat pengaruh dari Minangkabau dan Tapanuli.

Sementara itu pengaruh Islam mengalami perkembangan yang pesat. Ini dapat dibuktikan dengan karya-karya Rusydiah Club yang umumnya bernafaskan Islam. Meskipun politik etis memberi jalan bagi perkembangan "westernisasi" di daerah Riau, namun perkembangan dari kebudayaan Melayu Riau tetap mengalami kemajuan. Dalam hal ini Al Ahmadiah Press cukup berjasa mereproduksi karya-karya anggota Rusydiah Club dan karya-karya Raja Ali Haji. Dengan demikian kebudayaan asli tidak hilang dalam kehidupan masyarakat. Mencetak kembali naskah-naskah lama berarti mendorong rakyat untuk lebih giat lagi menghidupkan kebudayaan lama yang sangat penting artinya dalam menghadapi kebudayaan Barat.

Selain terdapat pembagian kebudayaan berdasarkan letak geograifis tadi, masih ada lagi pembagian kebudayaan yang berdasarkan stratifikasi masyarakat, ialah kebudayaan istana dan kebudayaan rakyat. Perbedaan antara kebudayaan istana dan rakyat tadi hanyalah dalam teknik, bahan dan kehalusannya. Baik itu berupa bangunan, ukiran, tarian seni drama dan lain-lainnya. Seni tari istana yang terkenal adalah tari zapin,

olang-olang dan makyong. Seni drama antara lain mendu, drama bangsawan, dan tonil.

Seni budaya rakyat pada pokoknya berhubungan dengan kehidupan masyarakat sehari-hari. Ada tari yang menggambarkan nelayan mencari ikan, pergi ke sawah/ladang, bertenun dan sebagainya.

Seni tari yang banyak dikenal di Riau adalah sebagai berikut : joget (Serampang Laut, Tanjung. Katung, dan Zapin). Zapin terdiri dari (Zapin Laba-laba, Zapin Tali, Zapin Merawai, dan sebagainya), begubang, dabus, rodat, inai, dan buria.

Seni suara : sri daik, sri siantan, sri mersing, sri bintan, laksemana bintan, tudung periuk, dondang sayang, cik minah sayang, serampang laut, mas mirah.

Seni bunyi-bunyian : gendang, gong, canang, penaban, marwas, serunai, nafiri, gambus, dan lain-lain. Daerah yang berbatas dengan Sumatera Barat juga mengenal alat musik talempong dan rebab. Di daerah Kuantan dan Bangkinang ada lagi seni suara "bakoba" (berkabar) artinya bercerita dengan dinyanyikan.

Seni pertunjukan makyong dimainkan oleh orang-orang tua, mendu semacam lenong terdapat di Pulau Tujuh dan Bunguran. Bangsawan dan tonil ialah semacam opera atau sandiwara.

Seni bangunan dan pahatan, terdapat perbedaan antara bangunan raja dan bangsawan dengan bangunan rakyat biasa. Rumah kebanyakan mempunyai tiang tinggi. Ukiran-ukiran terdapat pada haluan dan buritan sampan, kemudi, tudung pintu dan jendela. Motif ukiran kebanyakan berbentuk sulur dan daun. Di daerah berbatasan dengan Minangkabau terdapat pengaruh bangunan Minang seperti atap lentik dan ukiran khas Minang. Ada lagi ukuran sarung dan hulu keris.

Seni anyaman daun pandan, lekar dari lidi kelapa. tudung saji, tikar dan alat-alat keperluan lainnya. Selain itu tudung-tudung saji dari Tapung Kiri dan Kanan terkenal indahnya.

Tenunan yang sangat terkenal adalah tenunan Siak yang berhiaskan benang-benang emas yang mewah. Dan yang paling terkenal adalah tenun Siak Lubuk Muda yang berupa sarung. alat-alat pelaminan pengantin dan sebagainya.

Di daerah Indragiri Hilir terdapat juga seni budaya Kalimantan yang dibawa oleh penduduk Banjar ke sana, seperti *mamanda* (sandiwara), *lamut* dan *madikin*.

Pengaruh Islam dalam seni adalah zikir, berzanji, rebana, marhaban dan kasidah yang sering diadakan ketika maulud nabi.

Kesenian yang spesifik Taluk adalah *pacu jalur* (lomba sampan) yang diadakan waktu diadakan perayaan rakyat, tapi jaman Belanda diadakan untuk memperingati hari lahirnya ratu Belanda.

Kebudayaan Hindu juga masih hidup di kalangan masyarakat, seperti upacara-upacara perkawinan, penobatan raja, upacara kematian, upacara turun ke sawah/ladang, turun mandi anak, memberi nama, dan sebagainya. Membawa sajian atau mengunjungi makam keramat masih nampak sampai sekarang.

6. *Kepemudaan dan Kepanduan*

Timbulnya kesadaran nasional di daerah Riau umumnya dipelopori oleh kaum muda yang sudah mendapat pendidikan baik di sekolah pemerintah Belanda maupun sekolah swasta. Pemuda-pemuda Riau yang sudah berpendidikan ini menyadari bahwa kekuasaan kolonial Belanda selama ini telah merugikan kepada ekonomi penduduk. Sistem pemerintahannya yang menghalangai kemajuan penduduk pribumi itu haruslah ditukar, bahkan kekuasaan Belanda itu haruslah dienyahkan dari bumi mereka.

Terlaksananya Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928 di Jakarta, telah merangsang semangat nasionalis dari pemuda-pemuda terpelajar. Karena itu sewaktu adanya inisiatif dari pemerintah untuk mendirikan NIPV, maka pemuda-pemuda menyambutnya dengan baik. Di Taluk terdapat Hisbul Wathan di bawah pimpinan Amir Husin. Di samping itu ada lagi perkumpulan-perkumpulan yang bersifat olah raga.

7. Pers dan Koperasi

Kegiatan pers dan koperasi di daerah Riau terutama adalah hasil kegiatan dari organisasi Rusydiah Club yang menerbitkan sebuah majalah "Al-Iman" di Singapura pada tahun 1906. Karena suasana politik tidak mengizinkan, menyebabkan mereka tidak bisa menerbitkannya di Riau. Di Singapura mereka dapat mengeluarkan pendapat atau pikiran yang bertujuan untuk menggalang persatuan di antara bangsa Melayu atau umat Islam umumnya. Dari motto majalah tersebut yang berbunyi : *Memandu Pemikiran orang Islam ke Jalan yang Suci, Benar dan Ikhlas*, jelas sekali bahwa tekad dari *Rusydiah Club* menerbit-

kan majalah itu adalah sebagai senjata untuk memupuk rasa persatuan guna menghadapi kekuasaan Belanda. Al-Iman berdiri di bawah pimpinan Raja Hitam dibantu oleh beberapa orang teman-temannya, antara lain Syech Muhammad Thahir dan Haji Abbas bin Muhammad Taha.

Majalah itu sangat besar artinya dalam membangkitkan semangat nasional. Disamping itu majalah Al-Iman yang berbahasa Melayu itu dapat dijadikan alat memupuk cinta bangsa dan bahasa sendiri.

Pada tahun 1901 Rusydiah Club mendirikan sebuah percetakan di Singapura yang bernama Al-Ahmadiah Press. Separoh dari modalnya ditanggung oleh Sarikat Dagang Ahmadi yang didirikan di Pulau Midai pada tahun 1906. Sarikat Dagang itu berbentuk koperasi dan merupakan yang tertua di Riau yang dipelopori oleh tiga orang keturunan raja Kerajaan Melayu Riau Lingga yaitu Raja Haji Ahmad, Raja Haji ali, Raja Haji Hitam.

Badan usaha ini pada mulanya sebagai badan usaha dagang. Tetapi dalam perkembangannya kemudian ternyata badan ini berubah menjadi bentuk koperasi, karena usahanya ditujukan untuk kepentingan bersama, jumlah anggotanya 76 orang. Demikianlah usaha kecil-kecilan yang dirintis oleh Raja Haji Ali ini (1906) kemudian berkembang menjadi suatu koperasi raksasa, yang beranggotakan 76 orang. Nama asli dari usaha ini adalah Asyarikatul Ahmadiah = Sarikat Dagang Ahmadi. Nama itu diberikan sebagai penghormatan kepada pelopornya Raja Haji Ahmad. Kemudian namanya dirubah menjadi Ahmadi & Co, tetapi masyarakat Midai lebih mengenalnya dengan sebutan Ahmadi saja.

Walaupun koperasi ini sudah berkembang dengan pesat namun badan ini belumlah mempunyai anggaran dasar yang tertulis seperti koperasi masa kini. Pemilihan pemimpinnya berpegang kepada kemampuan, kejujuran dan banyaknya modal yang ditanamkan pada usaha itu.

Usaha yang mula-mula bergerak dalam menjual belikan barang-barang keperluan penduduk Midai, kemudian berkembang koperasi kelapa anggota-anggotanya adalah pemilik kebun kelapa, sehingga hampir 2/3 dari kebun kelapa di Pulau Midai adalah kepunyaan Sarikat Dagang Ahmadi. Dengan banyaknya modal yang terkumpul, akhirnya Sarikat Dagang Ahmadi dapat mengendalikan perdagangan kopra di sana.

Setiap akhir tahun keuntungan yang diperoleh dari kebun amanah dibagi dua dengan pemiliknya. Sedangkan keuntungan dari usaha itu dibagikan kepada seluruh anggotanya. Kepada yang tidak ingin mengambil keuntungannya dapat memperbesar modalnya. Kepada anggota juga diizinkan meminjam kepada Sarikat Dagang Ahmadi ini. Kemudian setiap tahunnya juga dikeluarkan zakat untuk kepentingna masyarakat dan agama.

Sarikat Dagang Ahmadi ini dipimpin oleh Raja Haji Ahmad dari tahun 1906-1914. Kemudian ia digantikan oleh Raja Haji Ali (1914-1955). Perusahaan ini masih berlanjut sampai sekarang. Pada tahun 1954 Bung Hatta mengunjungi Pulau Midai, melihat dari dekat perkembangan Sarikat Dagang Ahmadi di sana. Bekas Wakil Presiden itu berpendapat bahwa Sarikat Dagang Ahmadi ini adalah satu-satunya perusahaan nasional yang tertua di Indonesia dan dapat mencapai umur yang panjang.

## D. KEADAAN DI SEKITAR PERANG DUNIA I (1914-1918)

Ketika pada tahun 1914 pecah Perang Dunia I di Eropah, hampir semua negeri terpengaruh karenanya. Negeri Belanda sebagai kerjaan induk dari Pemerintah Hindia Belanda juga mengalami goncangan akibat perang tersebut. Meskipun negeri Belanda tidak terlibat langsung dalam peperangan, akan tetapi peperangan itu telah membawa akibat-akibat yang menyulitkan bagi perhubungan antara negeri Belanda dengan daerah Hindia Belanda.

Sewaktu Jerman mulai terjepit, mereka mulai melancarkan perang kapal selam terhadap semua kapal lawan. Dan kemudian Jerman juga menyerang kapal-kapal negara yang tidak ikut berperang, termasuk kapal Belanda. Oleh sebab itu perhubungan dari Indonesia (Hindia Belanda) dengan negeri Belanda mengalami kesulitan. Hasil-hasil dari daerah Indonesia tidak dapat lagi dikirim ke negeri Belanda.

Keadaan demikian itu menimbulkan kegelisahan baik bagi rakyat Indonesia sendiri maupun bagi pemerintah Hindia Belanda di Batavia (Jakarta). Kegelisahan itu juga terasa di daerah-daerah di Indonesia. Pada hal dalam masa itu semangat nasional sudah mulai memuncak di kalangan rakyat Indonesia. Keadaan dunia yang genting itu turut mendorong mereka untuk ikut serta memikirkan situasi. Sementara itu pemerintah Hindia Belanda telah menawarkan ajakan kepada rakyat Indonesia supaya bersama-sama ikut mempertahankan negeri ini bila keadaan menghendaki. Untuk itu kepada rakyat Bumiputera diwajibkan untuk memasuki milisi.

Sesudah gabungan dari seluruh perkumpulan Sarikat Islam diakui sebagai *'rechtpersoon'* oleh Pemerintah Hindia Belanda, maka perkumpulan itu sudah dapat bergabung dalam Centrale Sarikat Islam yang mengadakan *National Congres* pada tahun 1916. Dan sejak itu Sarikat Islam berkembang dengan cepat di daerah Riau. Sarikat Islam yang ada di daerah Riau ini ada yang merupakan afiliasi dari Padang, dari Medan, dan bahkan ada yang langsung berhubungan dengan Batavia (Tjokroaminoto). Dengan sendirinya apa-apa yang terjadi di pusat (Jawa) akan sampai juga ke daerah Riau.

Anjuran pemerintah Hindia Belanda tentang wajib milisi itu tidak mendapat tanggapan dari penduduk Riau. Rakyat tidak perduli dengan urusan pemerintah itu. Dan bukankah yang akan dipertahankan itu adalah tanah jajahan yang dikuasai oleh bangsa asing ? Jadi untuk apa kita harus susah-susah mempertahankannya.

Karena GG van Limburg Stirum agak lunak dan memberi hati, maka kehidupan politik pada masa itu berkembang dengan baik. Ada pergerakan yang bersifat radikal menuntut lebih keras pada pemerintah supaya pemerintah secepatnya membentuk Dewan Perwakilan Rakyat. Pokoknya semua golongan sudah menginginkan supaya pemerintah Hindia Belanda tidak lagi mengabaikan suara-suara rakyat, dan untuk itu diperlukan suatu wadah baru tempat rakyat berjuang secara parlementer. Akhirnya Pemerintah Hindia Belanda di bawah pimpinan GG van Limburg Stirum meresmikan berdirinya *"Volksraad"* pada tahun 1918, dengan susunan keanggotaan yang jauh dari pada sempurna. Sebagian besar anggotanya terdiri dari orang-orang Belanda. Tentu saja Volksraad yang demikian itu tidak dapat menyuarakan suara rakyat. Apalagi daerah Riau tidak ada sama sekali wakilnya di dalam Volksraad. bahkan sampai akhir masa penjajahan Belanda.

## E. PERJUANGAN DI DAERAH

Proses perjuangan kemerdekaan di daerah Riau boleh dikatakan bahwa sebagian besar dipelopori oleh cendikiawan ulama. Pelopor-pelopor pergerakan kebangsaan Daerah Riau adalah pemimpin-pemimpin yang mendasarkan kegiatan atas ratio dan ilmu pengetahuan yang berlandaskan agama Islam yang bertujuan akan kebahagiaan dunia dan akhirat.

Karena itu surau-surau ataupun madrasah-madrasah adalah sumber pembentukan para cerdik pandai yang dapat diharapkan oleh masyarakat dapat menjadi tiang dan sandaran dalam mencapai

apa yang diidam-idamkan oleh kaum muslimin. Pengaruh dari seorang Guru Agama, seorang Imam, lebih besar dari pejabat pemerintahan tradisional. Dengan satu seruan saja seorang ulama dapat menggerakkan kaum muslimin yang pernah berguru kepadanya.

Pelaksanaan politik etika dan campur tangan yang semakin mendalam oleh Pemerintah Hindia Belanda telah menimbulkan perubahan pandangan dalam masyarakat. Pengaruh baru itu menyebabkan terganggunya nilai-nilai lama dan norma-norma masyarakat, karena itu diperlukan ukuran-ukuran baru demi untuk kelangsungan etika sosial. Dalam hal ini para ulama merasa terpanggil jiwanya untuk mengabdikan diri mereka guna kepentingan agama dan bangsa.

Berdirinya organisasi Sarikat Islam adalah satu isyarat bagi kaum muslimin untuk bersatu di bawah panji-panji persaudaraan bagi seluruh pemeluk Islam melawan apa saja yang membahayakan bagi kelangsungan hidup umatnya.

Kebangkitan Nasional yang pada mulanya dipelopori dan dikembangkan secara perorangan melalui pendidikan dan dakwah agama, kemudian berkembang ke arah perjuangan melalui perkumpulan-perkumpulan atau organisasi-organisasi.

Untuk melawan pengaruh kafir yang masuk melalui sekolah-sekolah pemerintah, maka pemuka-pemuka agama bergiat mendirikan sekolah-sekolah agama yang disesuaikan dengan perubahan jaman.

Rencana Pemberontakan tahun 1926/1927 sebenarnya sudah tercium oleh pemerintah Belanda sebelumnya. Bahkan di Bengkalis tersiar berita bahwa orang-orang Komunis akan datang dengan kapal dari Jawa. Karena itu Asisten Residen Belanda di Bengkalis buru-buru pergi dengan kapal Diana, bersembunyi di perkebunan karet Belanda Sukajadi, Pekanbaru.

Menurut rencana, pemberontakan itu akan diadakan pada jam 7 tanggal 7 tahun 1927. Pemberontakan di Pekanbaru ditujukan untuk membakar semua gedung-gedung pemerintah dan membunuh orang-orang Belanda dengan jalan memberikan racun kepada babu-babu Belanda. Akan tetapi karena rencana itu bocor, sebelum pemberontakan meletus, pemerintah Belanda segera mengadakan razia besar-besaran dan menangkap beberapa tokoh Riau yang mereka curigai antara lain Jamal Lako Sutan, Tuanku Abdul Talib, Haji Muhammad Amin, Datuk Mudo Kasyim, Datuk Majolelo, Buyung Hitam dan Ayub Syarofi.

Jamal Lako Sutan oleh Pemerintah Belanda dibuang ke Digul sampai tahun 1938. Haji Muhammad Amin dipenjarakan di Batavia, kemudian dipindahkan ke Semarang dan Ambarawa sampai tahun 1934.

Walaupun mereka itu terlibat dalam pemberontakan PKI namun mereka itu bukanlah komunis dalam arti pengikut Marxisme-Lenenisme. Mereka adalah orang-orang Islam yang taat dan tidak Atheis. Karena semangat nasionalismenya yang meluap-luap, mereka tidak mau melihat ketimpangan-ketimpangan dalam masyarakat. Mereka benci melihat ketidak-adilan yang berlaku. Oleh karena itu mereka sering bertindak dan mengeritik kebijaksanaan pemerintah yang tidak memperhatikan nasib rakyat yang sengsara itu. Kegiatan-kegiatan dan pikiran-pikiran yang selalu memperhatikan nasib rakyat itu dianggap oleh pemerintah berbahaya. Mereka dicap sebagai orang komunis pengacau, dan karena itu harus ditangkap dan dipenjarakan.

Kaum terpelajar Riau semakin menyadari akan kepincangan-kepincangan pemerintah Hindia Belanda. Bahkan mereka secara langsung merasakan adanya diskriminasi antara bumiputera dengan kulit putih. Penguasaan bahasa Belanda menyebabkan mereka semakin banyak dapat membaca ilmu-ilmu pengetahuan Barat. Dan mereka semakin sadar akan keterbelakangan bangsanya. Mereka insaf bahwa keterbelakangan itu adalah akibat dari penjajahan yang berabad-abad. Timbul kesadaran bahwa untuk memajukan rakyat. kita tidak perlu cuma menunggu uluran tangan dari kaum penjajah. Kaum terpelajar haruslah menyingsingkan lengan baju, berjuang untuk melenyapkan kesengsaraan, keterbelakangan, ketidak-adilan yang merajalela itu.

Oleh karena itu peristiwa Sumpah Pemuda yang tercetus pada tanggal 28 Oktober 1928 turut menambah semangat bagi kaum terpelajar di Riau. Dengan adanya alat pemersatu itu kesadaran nasional lebih mudah dan cepat direalisasikan. Dan dalam hal ini peranan guru-guru bumiputera Riau sangat besar dalam menyebarluaskan ide persatuan itu. Dengan diakuinya bahasa Melayu sebagai bahasa Indonesia maka peranan bahasa Melayu meningkat sebagai alat untuk perjuangan. Dengan adanya pengakuan itu jelas sekali bahwa betapa tingginya kebudayaan daerah Riau yang memang sejak Kerajaan Melayu Riau-Lingga sudah dibina oleh sastrawan-sastrawan Melayu yang terkenal seperti Raja Ali Haji, Raja Ali Tengku Kelana dan tokoh-tokoh *Rusydiah Club* lainnya.

# BAB IV
# KEADAAN DI DAERAH RIAU DARI TAHUN 1928 – 1942

## A. PENGARUH POLITIK PEMERINTAH HINDIA BELANDA PADA TAHUN 1930

Seperti sudah diterangkan terdahulu, bahwa daerah Riau diperintah secara tidak langsung oleh Pemerintah Hindia Belanda. Kepada kerajaan-kerajaan yang ada di daerah ini diberikan hak untuk memerintah sendiri yang disebutnya *"Zelfbestuurende Landschappen"* Akan tetapi bukan pula berarti, bahwa Pemerintah Hindia Belanda sengaja mengembangkan pemerintahan yang demokratis. Walaupun daerah-daerah ini adalah otonom, tetapi kekuasaan yang diberikan mereka terbatas kepada hak pemerintah sendiri tentang hal-hal yang berhubungan dengan urusan rumah tangganya sendiri. Pemerintah Belanda memberikan hal ini kepada raja atau sultan dengan tujuan agar raja atau sultan itu mau memberikan daerah-daerah potensial kepada Belanda untuk dikuasai secara langsung atau *"Rechtsstreeks bestuursgebeid."*

Memang dalam tahun 1922 pemerintah Belanda mengadakan pembaharuan pemerintahan berdasarkan undang-undang tentang reorganisasi pemerintahan yang disebut *Bestuurhervorming wet* yang dalam perumusannya mempertegas hak otonomi dan *"medebewind"* kepada daerah-daerah otonom. Berdasarkan undang-undang baru itu di Jawa dan Madura dibentuk propinsi, kabupaten dan *staatsgemeenten.* Akan tetapi undang-undang tersebut tidak membawa pengaruh kepada pemerintahan di Riau.

Jadi di sini terdapat perbedaan politik pemerintah Belanda dalam melaksanakan desentralisasi itu. Di Jawa desentralisasi digunakan untuk menghapuskan pengaruh dari feodalisme dengan memberikan bentuk baru dalam pemerintahannya, yaitu daerah teritorial baru yang berbentuk setengah otonom.

Di Riau pemerintah Belanda sengaja mengadakan tekanan-tekanan kepada kerajaan-kerajaan dengan maksud untuk mengurangi daerah-daerah otonom tersebut. Untuk itu pemerintah sengaja meletakkan pejabat-pejabat pemerintahan Belanda seperti Residen, Asisten Residen dan *Controleur* untuk mengawasi setiap tindak tanduk raja-raja dan sultan-sultan Riau. Mereka ini semakin lama semakin mencampuri urusan rumah tangga kerajaan-kerajaan tersebut.

Undang-undang yang berlaku di daerah Riau sebagian besar adalah undang-undang Pemerintah Hindia Belanda. Peradilan ada dua macam, yaitu peradilan anak negeri dan peradilan hukum adat, sedangkan peradilan pemerintah berdasarkan peraturan hukum. Pada sidang Kerapatan Tinggi (Zelfbestuur) yang dipimpin oleh raja atau sultan, *Controleur* duduk sebagai anggota.

Untuk perkara-perkara besar keputusannya harus mendapat persetujuan Residen. Kerapatan rendah dipimpin oleh jaksa bernama *Magistraad Recht. Landraad* terdapat di Bengkalis dan putusan yang tidak bisa diambil olehnya diputuskan oleh *"Raad van Justitie"* di Medan.

Dalam tahun 1937 pemerintah Hindia Belanda mengambil lagi keputusan lain tentang daerah luar Jawa dan Madura, yaitu menghidupkan kembali kedudukan kepala-kepala adat, dan dengan sendirinya mengembalikan kepada propotsi semula.

Untuk pelaksanaan itu diciptakanlah Undang-undang *"Grocpsgemeenschap Sordonnantie"* Stb. 1937 No. 1964 jo. 1938 No. 130 dan 164, yang memuat ketentuan tentang pembentukan *Groepsgemeenschappen* yang wilayahnya meliputi administrasi *"Gewest"* yang berada di bawah kekuasaan Residen dan *Staat en gewesten* di luar Jawa, Madura Stb. 1938 No. 131 dan 271. 1)

Pada dasarnya politik Kolonial Belanda itu bertujuan untuk menjajah Indonesia selama-lamanya. Berbagai cara dan siasat telah dilakukan oleh Pemerintah Hindia Belanda guna mencapai maksudnya itu.

Pemerintah Hindia Belanda selalu bersikap tidak mempercayai rakyat bumiputera untuk melakukan suatu tindakan sendiri, dengan dalih : "rakyat Indonesia belum matang".

Ini terbukti dengan pernyataan Gubernur Jenderal de Jonge, bahwa Indonesia baru bisa diberi hak otonomi kira-kira tiga ratus tahun lagi. 2)

Demikianlah sampai pecahnya perang dunia II Pemerintah Hindia Belanda tetap menjalankan pola politik dualisme di daerah Riau.

---

1) Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Pekanbaru, *Pekanbaru Dari Masa ke Masa*, Suatu Informasi mengenai Sejarah Pekanbaru Dari Segi Politik, "Paper dalam Seminar Sejarah Pekanbaru", 26 s/d 29 Mei 1978, halaman 6.

2) Sartono Kartodirdjo et al., *Sejarah Nasional Indonesia II*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, 1975, halaman

1. *Politik Keras terhadap Gerakan Non-Koperasi*

Walaupun politik keras terhadap gerakan non-koperasi tidak sehebat yang dilakukan oleh Belanda di Jawa misalnya, tetapi tindakan tersebut dilakukan juga di daerah ini. Gerakan non-koperasi di Riau pada umumnya belum digerakkan melalui suatu organisasi, tetapi lebih banyak dilakukan oleh tokoh-tokoh terkemuka dalam masyarakat. Dan kenyataannya memang di daerah Riau tidak pernah muncul organisasi yang menjunjung dasar non-koperasi, seperti misalnya PNI, yang kemudian dilanjutkan oleh Partindo, PNI Baru dan lain-lain.

Walaupun PNI sebagai salah satu organisasi politik yang menjalankan secara tegas dasar non-koperasi itu tidak pernah lahir di Riau dalam masa penjajahan Belanda, namun di sana ada juga golongan yang menamakan dirinya "pengikut Soekarno". 3)

Begitulah diungkapkan oleh seorang tokoh PNI daerah Riau yang telah menggerakkan organisasi politik itu. Setelah jatuhnya kekuasaan Jepang di tanah air kita. Di Riau Belanda telah lebih dahulu melakukan tekanan dan menindak tegas tokoh-tokoh yang dinilainya tidak mau bekerja sama dengan pemerintah Belanda. Hal ini yang menyebabkan tidak adanya organisasi-organisasi yang bergerak atas dasar non-koperasi di daerah Riau sampai menjelang keruntuhan pemerintahan Hindia Belanda.

Tetapi sebagaimana yang diutarakan di atas, di daerah Riau terdapat pribadi-pribadi yang menolak untuk bekerja sama dengan Belanda. Salah seorang di antaranya ialah H.Muhammad Amin, yaitu salah seorang tokoh yang pada tahun 1918, bersama-sama dengan tokoh-tokoh lainnya memprakarsai berdirinya Serikat Islam di Pekanbaru.

Pemerintah Belanda pernah menawarkan kepada H.Muhammad Amin ini untuk memegang jabatan *Onderdistricthoofd* ataupun *Districthoofd,* tetapi semuanya itu ditolak oleh beliau.

Pada tahun 1924 beliau menetap di Malaya dan mendirikan suatu perkumpulan yang bernama Persatuan Indonesia Malaya (PIM). Tujuan perkumpulan ini ialah meninggikan taraf hidup dan ilmu pengetahuan di kalangan rakyat yang serumpun itu. Tetapi hakekat yang sebenarnya ialah menentang kaum kolonial yang bercokol di kedua daerah itu; Malaya dijajah oleh Inggeris dan Indonesia oleh Belanda.

3) *Wawancara* dengan Haji Muhammad (Ex Bupati Bengkalis) pada tanggal 25–8–1978 di Bengkalis.

Tahun 1928 beliau kembali ke Pekanbaru, tetapi sesampainya di Pekanbaru beliau ditangkap. Mula-mula dipenjarakan di Pekanbaru selama empat bulan kemudian dipindahkan ke penjara Siak. Dari Siak dipindahkan ke Bengkalis, kemudian ke penjara Medan. Dan dari penjara Medan dipindahkan pula ke penjara Glodok (Jakarta). Di Jakarta ia mendapat kesempatan bertemu dengan teman-teman seperjuangannya, seperti : H.Agus Salim, K.H. Achmad Chatib, Surjopranoto, H.Samanhudi, dan lain-lain 4)

Dari penjara Jakarta, beliau dipindahkan lagi kepenjara Ambarawa. Selama 7 tahun hidup dalam penjara dengan tuduhan melakukan kegiatan politik melawan pemerintah Belanda. Dalam tahun 1934 ia dibebaskan dan kembali ke Pekanbaru. Dalam tahun 1938 beliau pergi ke Malaya lagi. Haji Muhammad Amin menerangkan ajaran-ajarannya dalam sebuah buku karangannya yang berjudul "Syamsul Bayan" yang ditulisnya dengan huruf Arab-Melayu. Menjelang pecahnya perang Pasifik, beliau kembali ke Pekanbaru, tetapi sesampainya di Pekanbaru beliau ditangkap kembali oleh Belanda dan baru mendapat kebebasan setelah Jepang masuk ke daerah ini dalam tahun 1942.

Pada tanggal 12 Agustus 1968 beliau berpulang ke rahmatullah di Pekanbaru dalam usia 105 tahun. Menteri Sosial RI dengan SK Pol. 89/71/PK tanggal 7 Oktober 1971 menetapkan Haji Muhammad Amin sebagai salah seorang Perintis Kemerdekaan dari daerah Riau.

Politik keras terhadap gerakan non-koperasi di Riau ini dilakukan oleh Belanda sebab takut akan timbulnya partai-partai yang radikal seperti yang terjadi di Jawa dengan partai PNI dan lain-lain. Pemerintah Belanda merasa khawatir akan roboh kalau organisasi yang radikal tersebut dibiarkan tumbuh dan hidup serta bergerak. Kepada fasal 153 dari Buku Hukum Pidana *(Wetboek Strafrecht)* ditambah dengan fasal *bis* dan *ter* yang memberi hak bagi pemerintah Belanda untuk menangkap dan menghukum tokoh-tokoh masyarakat yang dianggap berbahaya terhadap ketertiban dan ketentraman umum.

Banyak pemimpin-pemimpin masyarakat yang dicurigai, termasuk juga pemimpin-pemimpin Persatuan Muslimin Indonesia (PERMI) yang tumbuh di daerah Lima Koto (Kampar). Pemim-

4) H.Syafei Abdullah, "Mengenang Perjuangan Almarhum H.Muhammad Amin Perintis Kemerdekaan dari Daerah Riau", *Canang*,No.6, Juni, 1978, halaman 5.

pin-pemimpin partai ini selalu menghasut rakyat supaya jangan mau membayar *belasting* dan ikut rodi. Banyak di antara mereka yang bersembunyi di hutan-hutan untuk menghindari penangkapan. Banyak anggota PERMI ditangkap, di antaranya ialah Haji Muhammad Amin (bukan Haji Muhammad Amin yang mendirikan SI). Pada tanggal 28 Juni 1934 *Controleur* Bangkinang mendesak kepada para ninik-mamak yang berada di Air Tiris untuk membuat suatu pernyataan kepada Residen Padang yang isinya supaya Haji Muhammad Amin dibuang ke Digul. Karena hal ini lekas diketahui beliau, maka beliau melarikan diri ke Singapura dan berdomisili di sana sampai tahun 1942, dan baru pulang kembali bersamaan dengan kedatangan Jepang ke daerah ini.

Satu-satunya Digulis yang berasal dari Riau ialah Jamal Lako Sutan, yang oleh Belanda dibuang ke Digul sampai tahun 1938. Semula beliau ditangkap oleh Belanda bersama beberapa tokoh lainnya, yaitu Tuanku Abdul Talib di Kelayang, Datuk Mudo Kasyim, Datuk Majolelo di Tapung dan Buyung Hitam di Bangkinang. Tuduhan Belanda ialah bahwa mereka sebagai orang-orang Komunis berusaha menimbulkan suatu gerakan menentang Belanda. Jamal Lako Sutan dengan SK Pol.621/65 tanggal 4 Oktober 1965, yang ditandatangani oleh Menteri Sosial Rusiah Sarjono S.H., ditetapkan sebagai Perintis Kemerdekaan di Riau.

Tindakan pemerintah Belanda terhadap pemimpin rakyat telah mengganggu ketentraman dalam kehidupan masyarakat serta menjadikan rakyat gelisah. Di daerah Lima Koto (Wilayah Kabupaten Kampar sekarang) pemerintah Belanda mengumumkan kepada masyarakat untuk tidak berkumpul lebih dari dari tiga orang dan kalau hal ini dilanggar akan ditangkap.

Untuk menjaga agar tidak timbulnya perlawanan bersenjata dari masyarakat, maka di daerah Bengkalis umapanya, Belanda menetapkan beberapa ketentuan, antara lain larangan bagi rakyat membawa senjata: Alat untuk bekerja harus dibungkus, misalnya dengan upih, dan harus pula disandang waktu membawanya.

Dengan demikian jelaslah bahwa tindakan Belanda tersebut telah menyebabkan hilangnya rasa ketentraman dan kebebasan dalam kehidupan sosial-kemasyarakatan sehari-hari.

2. *Undang-undang Sekolah Swasta (Wilde Scholen Ordonnantie.*

Pemerintah Hindia Belanda di bawah Gubernur Jenderal De Jonge pada tanggal 1 Oktober 1932 mengeluarkan *ordonnantie* sekolah liar yang bersifat preventif. Undang-undang Sekolah Swasta *(Wilde Scholen Ordonnantie)* itu bertujuan menolak permohonan izin untuk menyelenggarakan pendidikan, jika diduga bahwa pendidikan yang akan diselenggarakan itu akan membahayakan. 5) Pemerintah Belanda merasa khawatir akan perkembangan pendidikan swasta seperti misalnya Sekolah Taman Siswa, yang perkembangannya sangat pesat. Belanda sangat takut bilamana pendidikan swasta tersebut akan menguasai pendidikan seluruh tanah air. Kalau ini terjadi berarti kemerosotan besar pendidikan kolonial dan sekaligus membahayakan kewibawaan pemerintah.

Tindakan preventif tersebut telah pula dilakukan oleh Belanda di daerah Riau. Setiap guru, termasuk guru agama tidak dibenarkan mengajar jika tidak memiliki *besluit* dari pemerintah Belanda. Sekolah-sekolah swasta yang akan dibuka harus diberitahukan terlebih dahulu dengan mengisi blanko isian, dan dikirimkan kepada Asisten Residen. Situasi pendidikan swasta yang demikian ini terjadi di Rengat (Indragiri).

Di daerah Lima Koto sekolah-sekolah agama Islam yang telah mendapat jaminan ninik-mamak dibubarkan, dan guru-guru yang disangsikan, tidak boleh mengajar. Beberapa sekolah agama yang tidak menurut peraturan-peraturan yang ditentukan oleh pemerintah Belanda itu dibubarkan. Sekolah-sekolah yang dibubarkan itu ialah : Sekolah Islam di Kuok, yang didirikan oleh Datuk Singo, sekolah Islam di Air Tiris yang didirikan oleh H.Jaafar, dan sekolah Islam di Rumbio yang didirikan oleh Datuk Laksamana.

Sekolah-sekolah swasta di tempat-tempat lainnya di daerah Riau pada umumnya tidak terkena ordonansi sekolah swasta ini. Sekolah-sekolah swasta yang didirikan oleh Muhammadiah, tidak terkena peraturan ini, karena mereka dapat menyesuaikan diri dengan keinginan pemerintah Belanda.

## B. DEPRESI EKONOMI DI DAERAH RIAU

Dalam tahun-tahun tigapuluhan krisis ekonomi berkecamuk di seluruh tanah air Indonesia, mulai dari kota yang paling besar sampai di pelosok-pelosok yang terpencil, merata di segenap lapisan

5) Slametmuljana, *Nasionalisme Sebagai Modal Perjuangan Bangsa Indonesia*, Jilid I, PN Balai Pustaka, 1968, halaman 190.

masyarakat. Depresi ekonomi ini merupakan akibat logis dari keadaan pasaran hasil tambang dan hasil bumi di Eropa sehabis perang dunia pertama, menjadi sangat lesu. Keadaan itu menyebabkan hasil eksport turun.

Riau sebagai sebuah daerah penghasil karet mendapat pukulan hebat. Permintaan akan karet berkurang, atau tidak ada sama sekali. Oleh sebab itu rakyat yang hidupnya semata-mata menggantungkan dirinya dari karet, terutama para petani karet, kehidupannya sangat menderita. Barang-barang kebutuhan hidup sehari-hari memang ada, tetapi daya beli tidak ada. Rakyat yang hidup dari perladangan padi, ubi, sagu dan hasil bumi lainnya yang bukan termasuk jenis komoditi eksport, tidak begitu merasakan akibat depresi ekonomi ini, karena mereka dapat memproduksi sendiri jenis-jenis bahan makanan mereka sehari-hari, misalnya di daerah Lima Koto.

Tetapi bagi mereka yang bekerja sebagai pegawai pada pemerintah Belanda terutama pada daerah-daerah yang langsung diperintah oleh Belanda *(rechtsstreeks bestuurs gebeid)*, keadaan depresi ekonomi tersebut cukup menimbulkan penderitaan. Pegawai-pegawai Belanda banyak yang dinon-aktifkan untuk sementara dan gaji mereka tidak dibayar. Ada pula di antara pegawai tersebut yang tidak diberhentikan, tetapi gajinya diturunkan. Tindakan itu dilakukan oleh Belanda karena kas pemerintah Hindia Belanda sendiri semakin menipis.

Pemerintah Hindia Belanda dalam menanggulangi kasnya yang semakin kosong, melakukan pemungutan bea-cukai secara intensif, terutama pajak atas garam dan candu. Demikian pula terhadap barang-barang lainnya yang diperdagangkan. Pada umumnya setiap barang-barang yang diperjual belikan di tempat tertentu dikenakan pajak, yang hasilnya dimasukkan dalam perbendaharaan kota atau HPB *(Hoofd Plaatselijk Bestuur)* yang ditangani *Controleur*, di samping jabatan utamanya sebagai Kepala Pemerintahan. Dalam usaha menghindarkan diri dari pungutan pajak ini terkenallah kelicikan orang India yang menjual roti dijunjung, orang Yunan yang menjual kain pakai sandang dan orang Jawa menjual pecal dijunjung. Karena barang-barang yang diperdagangkan itu tidak pernah menyentuh bumi (tanah), maka bebaslah mereka dari tagihan pajak. Suatu politik ekonomi yang menonjol yang dilaksanakan oleh pemerintah Belanda dalam usahanya mengisi kas, ialah melakukan pemungutan cukai luar biasa terhadap "karet hitam". 6)

Saat itu karet dibagi dalam dua golongan, yaitu "karet hitam",

suatu istilah yang diberikan kepada karet yang diproduksi oleh rakyat, sedangkan karet yang berasal dari produksi onderneming Belanda disebut "karet putih". Tindakan ini dijalankan oleh pemerintah Belanda setelah kelihatan bahwa permintaan akan karet mulai membaik kembali, walaupun harganya tidak seperti keadaan sebelum depresi. Dunia mulai membeli karet kembali, tetapi dalam jumlah yang terbatas. Dalam usahanya untuk melindungi "karet putih" itulah pemerintah Belanda di daerah Riau melakukan penagihan cukai luar biasa terhadap "karet hitam". Tindakan ini dilakukan berdasarkan kebijaksanaan Pemimpin Tertinggi Hindia Belanda masa itu, yaitu Gubernur Jenderal de Jonge.

Dengan demikian jelaslah bahwa penderitaan rakyat akibat depresi ekonomi tersebut semakin "diperhebat" dengan pelaksanaan cukai karet luar biasa dari Gubernur Jenderal de Jonge tersebut.

"Politik yang dijalankan oleh pemerintah dengan mengambil tindakan drastis itu ditujukan untuk menyelamatkan golongan Belanda yang ada di Indonesia dengan mengorbankan kepentingan golongan Indonesia. "7)

Sebagai pengaruh sosial dari kesulitan ekonomi tersebut ialah terjadinya perampokan-perampokan yang dilakukan oleh rakyat terhadap kedai beras cina, seperti yang terjadi di Siak Kecil (Lubuk Muda) dan Sungai Apit ± 1933, yaitu suatu daerah yang termasuk dalam Wilayah Kabupaten Bengkalis sekarang ini. Peristiwa di Sungai Apit tersebut sangat menghebohkan, sehingga Gubernur Belanda di Medan memerlukan sendiri datang ke Sungai Apit guna mengadakan pengecheckan secara langsung ke tempat dimana peristiwa tersebut terjadi. Setibanya di Sungai Apit Gubernur berdialog langsung dengan penghulu setempat, yang bernama Umar. Penghulu Umar menjelaskan peristiwa tersebut menurut keadaan yang sebenarnya kepada Gubernur. Akibatnya Gubernur Schaklen sangat tidak senang terhadap pemungutan cukai luar biasa yang telah menimbulkan kesulitan bagi rakyat Riau itu.

Ketika sedang berada di Jakarta (Batavia), Gubernur Schaklen berbicara di depan *Volksraad*, menyatakan bahwa pemerintah Hindia Belanda telah menyalahgunakan uang rakyat dalam jumlah jutaan guilden. Akibat dari pada pendiriannya itu. pada tahun 1935 Gubernur ini diberhentikan dari jabatannya.

---

6) Wawancara dengan Dt.Achmad Yusuf (Ex Bupati Indragiri), di Pekanbaru, tanggal 10-10-1978.

Pemerintah Hindia Belanda menerima hasil dalam jumlah yang besar dari pajak istimewa tersebut. Tetapi hasil cukai yang banyak ini tidak mendapat persetujuan dari Parlemen Belanda karena pemungutannya tidak berdasarkan undang-undang. Sebab itu pemerintah Hindia Belanda berusaha mengembalikan hasil cukai tersebut dengan menyerahkannya kepada *districthoofd* atau *onderdistricthoofd*, agar uang tersebut dapat dipergunakan bagi kepentingan rakyat banyak di daerahnya, misalnya untuk membangun mesjid, jembatan, sekolah, madrasah dan lain-lain. Tetapi kebanyakan dari *districthoofd* atau *onderdistricthoofd* itu tidak mau menerima uang tersebut karena dianggap wang tidak sah atau tidak halal, apalagi untuk Pembangunan sarana-sarana keagamaan. Satu-satunya mesjid di Pekanbaru yang dibangun dengan mempergunakan uang tersebut ialah Mesjid Raya Pekanbaru. 8) Mesjid ini sampai sekarang masih berdiri, letaknya di daerah Kecamatan Senapelan, Kotamadya Pekanbaru.

Tindakan ekonomi lainnya yang diterapkan oleh Belanda di daerah Riau ialah sistem *coupon*. Sebagaimana yang telah dikemukakan, bahwa sebagai akibat depresi ekonomi tahun 1930-an itu maka keadaan pasaran karet sungguh sangat parah sekali. Beberapa tahun kemudian memang mulai lagi permintaan akan karet, tetapi harganya jauh di bawah harga sebelum masa depresi tersebut.

Pemerintah Belanda sangat khawatir sekali jika pasaran karet yang agak membaik itu merosot kembali. Sebab itu pemerintah Belanda berusaha mempertahankan harga karet yang berlaku waktu itu dengan jalan mengadakan pembatasan terhadap produksi karet rakyat atau *rubber-restrictie*, yang mulai berlaku sejak tahun 1937. Dibentuklah suatu badan yang beranam *Rubber Restrictie Dienst*, dengan tugas mendaftar seluruh kebun karet rakyat, dan menghitung berapa jumlah pohon karet milik rakyat tersebut. Setelah seluruh kebun karet rakyat terdaftar, maka dikeluarkan kupon-kupon yang di dalamnya tertulis nama pemilik kebun karet, jumlah karet yang boleh diproduksi, letak kebun karet tersebut dan lain-ain.

Karena kupon tersebut dapat diperjual-belikan, maka kebanyakan kupon-kupon tersebut jatuh ke tangan para eksportir Cina. Akibatnya sebagian besar dari pemilik kupon tersebut tidak memproduksi sendiri karetnya, pengusaha-pengusaha Cina, yang membeli kupon itulah kemudian yang memproduksi karet rakyat.

---

8) Wawancara dengan Abdul Rab (ex. pegawai Qadhi Kerajaan Siak 1930-1935), di Pekanbaru, tanggal 10 September 1978.

Memang terdapat juga produsen-produsen bumi putera, tetapi jumlahnya sangat terbatas. Keadaan yang demikian itu merupakan akibat sampingan yang kurang baik dari sistem kupon itu, karena menjadikan rakyat pemilik kebun karet itu pemalas dan hidup seperti orang kaya, karena tanpa bekerja merekapun mendapatkan "surat berharga" dari pemerintah Belanda berupa kupon, yang dapat ditukar dengan sejumlah uang.

Kupon biasanya dibagi-bagikan dalam jangka waktu tiga bulan sekali, dan pada saat pembagian itu keadaan laksana pasar malam, di mana orang-orang sibuk menghitung dan menerima hasil penjualan kupon tersebut. Sistem kupon ini tidak berlangsung lama, dan berakhir menjelang pecahnya perang dunia kedua.

## C. INTERAKSI TERHADAP KEGIATAN PARTAI DAN ORGANISASI

Satu-satunya partai politik yang pertumbuhannya agak merata di seluruh daerah Riau, terutama di daerah Riau Daratan, ialah Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII), yaitu suatu organisasi yang semula bernama Syarikat Dagang Islam (SDI). Sesuai dengan dinamika perjuangannya maka SDI dirubah namanya menjadi SI (Syarikat Islam), kemudian menjadi PSI (Partai Syarikat Islam) dan terakhir menjadi Partai Syarikat Islam Indonesia atau PSII (Januari 1929) setelah menerima pengaruh dari Dr. Sukirman yang baru pulang dari Nederland.

Yang menjadi peletak dasar dari organisasi ini di Riau ialah H.Muhammad Amin. Ia yang menjadi pelopor berdirinya SI di Pekanbaru, tahun 1916. Dalam tahun 1920 ia telah melakukan interaksi dengan tokoh-tokoh SI di Jawa dengan berangkat ke Batavia, menemui HOS. Cokroaminoto, H.Agus Salim, A.Moeis, dan lain-lain guna berkonsultasi dan menyampaikan pendirian SI daerah Riau.

Berdirinya SI di Pekanbaru itu segera diikuti oleh tempat-tempat lainnya. Dalam tahun 1930 di daerah Kampar Kanan (Pasir Pengaraian) berdiri pula PSII di bawah pimpinan Sultan Laut Api, seorang tokoh yang sangat yakin dan konsekwen terhadap cita-cita perjuangannya sehingga berani mengorbankan seluruh harta bendanya demi berhasilnya perjuangan menentang pejajahan.

Dalam waktu yang hampir bersamaan PSII didirikan pula di di daerah Lima Koto, yang kegiatannya terutama dalam bidang pendidikan, misalnya di Rumbio dengan tokohnya ialah Abd.Rahman, Adnan, Abd. Muluk, dan lain-lain. Daerah Lima Koto ini dulunya

termasuk wilayah kekuasaan kerajaan Pagaruyung. Sejak tahun 1896, mulailah penjajahan Belanda dan Daerah Lima Koto dimasukkan dalam wilayah keresidenan Sumatera Barat. Sedangkan untuk daerah Lima Koto didudukkan seorang *Controleur* bertempat di Bangkinang. Setelah Proklamasi Kemerdekaan RI. barulah daerah Lima Koto itu masuk wilayah Riau. Dengan keadaan geografis yang demikian itu, maka dalam kegiatan PSII di daerah Lima Koto itu interaksinya terjadi dengan PSII daerah Sumatera Barat. Sepanjang penelitian yang dilakukan maka tidak terjadi aksi politik dalam kegiatan PSII di daerah Lima Koto itu, tetapi kegiatan tersebut hanya dalam bidang pendidikan, seperti mendirikan sekolah Islam dan melaksanakan dakwah Islamiah. Selain itu juga kegiatan dalam bidang kepanduan melalui organisasi SIAP yang dipimpin oleh H.Muhammad Amin.

Sekitar tahun 1930-an di Indragiri Hilir berdiri beberapa organisasi, yaitu Muhammadiah, Nahdatul-Ulama (NU) dan Musyawaratul Thalibin. 9) Muhammadiah didirikan melalui hubungan dengan Minangkabau, yang dilakukan oleh H.Salauddin, Nazri, Abdullah Rusyi dan lain-lain. NU berasal dari Surabaya dan salah seorang pendirinya ialah Chalidi Nur. Sedangkan Musyawaratul Thalibin berasal dari Kalimantan Barat (Kandangan), pusat organisasi tersebut. Adapun tokoh-tokoh yang mendirikannya ialah H.Ibrahim, H.Rayidi, Bajuri dan Hayat Abdurrahman. Pada umumnya organisasi-organisasi ini bergerak di bidang pendidikan, yaitu dengan mendirikan sekolah-sekolah agama Islam.

Sesudah bulan September 1937 di Jakarta terbentuklah Majelis Islam A'la Indonesia (MIAI) yang juga disebut Majelis Islam Luhur, maka atas permufakatan ketiga organisasi tersebut di atas terbentuklah MIAI di Indragiri Hilir. Setelah di Indragiri Hilir berdiri MIAI, maka di Rengat (Indragiri Hulu) didirikan pula MIAI, tetapi baru dalam zaman pendudukan Jepang.

Di daerah Lima Koto MIAI berkedudukan di Bangkinang, dengan ketuanya H.A.Malik. Pertemuan-pertemuan selalu diadakan dengan tujuan mempererat persatuan di kalangan umat Islam.

Satu-satunya organisasi yang agak radikal ialah PERMI yang dalam tahun 1932 didirikan oleh H.Muhammad Amin di Air Tiris (daerah Lima Koto). Pada tanggal 28 Agustus 1933 Haji Muham-

---

9) Wawancara dengan H.Murad Rasyidi, di Tembilahan, tangal 28 September 1978.
10 AK Pringgodigdo, *Sejarah Pergerakan Rakyat Indonesia*, Penerbit Pustaka Rakyat, Jakarta, 1960, halaman 183.

mad Amin sebagai pemimpin PERMI dihadapkan di depan sidang *landraad* dengan tuduhan menyindir pemerintah Belanda. Dalam suatu sidang *openbaar* beliau berpidato dan dalam pidato tersebut beliau menyamakan pemerintah Belanda sebagai binatang buas. 11) Sebagai konsekwensi dari ucapannya tersebut *landraad* memvonis H.Muhammad Amin 9 bulan penjara. Sejalan dengan itu PREMI di daerah inipun bubarlah (tahun 1934). Selain di daerah Lima Koto ini, maka pada sekitar tahun 1933 PERMI juga berdiri di Kuantan (Indragiri Hulu). Karena PERMI di Riau ini secara langsung berasal dari Sumatera Barat, maka dalam setiap kegiatannya selalu terjadi interaksi dengan Sumatera Barat. Tetapi PERMI di Sumatera Barat lebih tegas lagi, sehingga banyak di antara pemimpinnya yang ditangkap Belanda dan diasingkan ke Digul.

Di Gunung Sahilan (Kampar Kiri) pada tahun 1929 pernah berdiri suatu organisasi Islam yang beraliran konservatif, yaitu Persatuan Tarbiyah Islamiah (PERTI). Pendirinya ialah H.Muhammad Isa dan H.Usman. Keduanya murid Sirajuddin Abbas dari Empat Angkat Candung (Sumatera Barat). 12) Di daerah Kuantan pernah pula berdiri PERTI sekitar tahun 1930-an. Dalam kegiatannya PERTI di Riau ini selalu berhubungan dengan tempat asalnya, yaitu Candung Sumatera Barat). PERTI banyak bergerak dalam bidang pendidikan Islam. Sebagai suatu organisasi yang berpaham lunak, kegiatannya dalam aksi-politis hampir tidak kelihatan, terutama di daerah Riau.

Mengenai Petisi Sutarjo dalam Volksraad tahun 1936-1937, yang mengusulkan kepada pemerintah Nederland agar Hindia Belanda diberi status berdiri sendiri *(zelfstandigheid)* atau menuntut dominion-status, dapat diketahui oleh golongan berpendidikan di daerah Riau melalui surat-surat kabar atau majalah yang datang dari Medan, Padang, Palembang atau dari pulau Jawa. Karena di daerah ini tidak terbentuk dewan-dewan daerah, maka tanggapan mengenai petisi Sutarjo tersebut hanya terbatas pada sekedar pembicaraan para cerdik-pandai yang pada umumnya merasa sangat gembira akan hal ini. Mereka mengharapkan agar petisi tersebut dapat terrealisasi dengan segera.

Demikian pula halnya dengan Gerakan Indonesia Berparlemen yang dicetuskan melalui resolusi GAPI dalam bulan Agustus 1940. Berita inipun dapat diketahui terutama oleh para cerdik-pandai

---

11) Wawancara dengan H.Muhammad Amin di Air Tiris, (Kecamatan Kampar, tanggal 6 Oktober 1978.

12) Wawancara dengan Haji Abdul Ganie, di Pekanbaru, tanggal 28 dan 31 Oktober 1978.

melalui surat-surat kabar atau majalah. Sepanjang penelitian yang telah dilakukan, walaupun tidak terdapat suatu kegiatan yang nyata, tetapi para cerdik pandai di daerah ini merasa simpati serta menyokong sepenuhnya gerakan Indonesia Berparlemen dengan harapan agar segera terjadi perubahan nasib.

## D. KEADAAN MENJELANG KERUNTUHAN PEMERINTAHAN HINDIA BELANDA DAN KEDATANGAN TENTARA JEPANG

### 1. *Sikap Pemerintah Hindia Belanda*

Kegiatan-kegiatan organisasi politik dilarang di daerah Riau pada akhir-akhir pemerintahan Hindia Belanda. Yang mendapat kelonggaran untuk bergerak hanyalah organisasi-organisasi sosial. Namun setiap kegiatan organisasi sosial diawasi dan selalu dicurigai. Tokoh-tokoh masyarakat yang dianggap membahayakan pemerintah Hindia Belanda ditangkap dan dipenjara, sehingga rakyat sangat hati-hati apabila membicarakan soal politik.

Organisasi sosial yang tetap berdiri adalah Musyawaratul Thalibin di Tembilahan, Muhammadiah di Kuantan, Tembilahan, Kampar dan Bagan Siapi-api serta Persatuan Tarbiyah Islamiyah (PERTI) di Kuantan. Musyawaratul Talibin dan Muhammadiyah adalah organisasi sosial yang bergerak di bidang agama dan pendidikan, tetapi juga merupakan wadah bagi tokoh-tokoh politik di daerah ini. Ajaran jihad yang disampaikan para ulama Muhammadiyah sangat meresap di hati setiap anggotanya, sehingga pengaruh Muhammadiyah cepat berkembang di tengah-tengah masyarakat.

Pada tahun 1937 diadakan Komprensi Muhammadiyah Daerah Sumatera Barat di Padang. Komprensi memutuskan antara lain akan mendirikan Konsulat Muhammadyah di Daerah Riau. Pada tahun 1938 diadakan pula Komprensi Muhammadiyah Daerah di Taluk Kuantan dan pada saat itu diputuskan membentuk Majelis Konsul Muhammadiyah Daerah Riau yang berpusat di Taluk Kuantan. Umar Amin Husin terpilih sebagai Ketua Majelis Konsul Muhammadiyah Riau yang pertama. 13) Taluk Kuantan terpilih sebagai pusat Majelis Konsul karena di daerah ini yang terlebih dahulu tertanam Muhammadiyah. Cabang-cabangnya terdapat di Lubuk Jambi, Cengar, Taluk, Baserah,

---

13) Jamal Lako Sutan, *Perjuangan Kemerdekaan di Daerah Riau*, Naskah, halaman 17.

Cerenti dan Tembilahan. Sedangkan ranting-rantingnya hampir terdapat di setiap kenegerian yang ada di Kuantan.

Pada tahun 1938 di Bangkinang didirikan pula cabang Muhammadiyah yang berada di bawah Majelis Muhammadiyah Daerah Sumatera Barat. Sebagai pimpinan cabang ditunjuk Ayub Syairafi dan daerahnya meliputi V Koto Kampar. Di Bagan Siapi-api juga terdapat organisasi Muhammadiyah. Tahun 1939 Umar Amin Husin mendirikan cabang Muhammadiyah Tanjung Pinang. Anggotanya sebagian terdiri dari pegawai-pegawai Gubernemen, orang-orang dari Kuantan, Kampar dan Minangkabau. Sedangkan penduduk Kepulauan Riau sebagian besar menolak aliran Muhammadiyah. Mereka menyebutnya aliran Muhammadiyah sebagai golongan muda.

Komprensi Muhammadiyah Daerah Riau ketiga seyogianya akan diadakan di Tembilahan pada bulan Juli 1939. Tetapi karena di Tembilahan pada saat itu mengalami musim kemarau panjang, sehingga sangat sulit untuk mendapatkan air, maka Majelis Konsul memutuskan Komprensi diadakan di Taluk saja secara sederhana dan tertutup.

Menurut undang-undang kolonial yang berlaku, untuk mengadakan rapat tertutup tidak diperlukan izin polisi kolonial. Tatkala rapat berlangsung pada hari pertama, datang menteri polisi bersama anggotanya dan seorang penghulu adat. Polisi memerintahkan agar rapat dibubarkan, karena penghulu tidak memberi izin rapat tersebut. Muhammad Yaman dan Jamal Lako Sutan masing-masing sebagai pimpinan rapat dan sekretaris dikenakan hukuman denda sebesar f 25,- per orang. 14)

Anggota-anggota Muhammadiyah dilarang mengucapkan pidato tentang "Wajjahidu Fisabilillah (perang pada jalan Allah)," 15) karena ucapan itu dapat membangkitkan perasaan anti penjajahan. Belanda mengerti maksud dari kalimat itu. Apabila ada di antara anggota atau ulama Muhammadiyah yang mengucapkan kalimat itu, maka pimpinan Muhammadiyah dipanggil dan diminta untuk mempertanggung-jawabkannya. Sekitar tahun 1940 Ayub Syairafi ditangkap karena dianggap membahayakan pemerintah Hindia Belanda. 16) Pimpinan Muhammadiyah sering mendapat teguran dan diawasi setiap geraknya,

14) *Ibid.*, halaman 18
15) H.Munaf Yacoub, Wawancara, 2-10-1978, di Taluk
16) H.Moh.Zen Wahidin, Wawancara, 18-10-1978 di Bangkinang.

tetapi organisasi ini masih tetap bertahan sampai akhir pemerintah Hindia Belanda di daerah Riau.

Musyawaratul Talibin pada mulanya merupakan tempat bertemunya tokoh-tokoh masyarakat di daerah Tembilahan. Pada akhir pemerintahan Hindia Belanda organisasi ini hanya bergerak di bidang pendidikan dan agama. Orang-orang pergerakan di Tembilahan hanya bersifat perorangan atau tidak diorganisir, karena takut akan tindakan kekerasan pemerintah Hindia Belanda.

Di samping organisasi Muhammadiyah, di Lubuk Jambi juga berdiri Persatuan Tarbiyah Islamiah (PERTI) di bawah pimpinan Ma'rifat Marjani. Karena PERTI hanya bergerak dalam lapangan agama dan pendidikan, maka organisasi mendapat dukungan dari penghulu-penghulu adat dan polisi kolonial. Sedangkan Muhammadiyah mendapat tantangan penghulu-penghulu adat, karena sikapnya yang menentang bid'ah dan churafat. PERTI berkembang di Lubuk Jambi, Kari, Taluk, Kopah dan Pangean. Pemerintah Hindia Belanda tidak merintangi gerak PERTI sebab mereka anggap tidak membahayakannya.

Untuk menambah pembiayaan pemerintah Hindia Belanda, kepada rakyat dikenakan *blasting* dan rodi. Kehidupan rakyat tidak diperhatikan. Irigasi tidak diadakan, transmigrasi hanya berlangsung secara spontan seperti kedatangan suku Bugis dan Banjar ke Tembilahan, orang-orang Jawa dan Minangkabau datang ke daerah Riau karena keinginan sendiri. Program politik etis tidak dilaksanakan sepenuhnya, kecuali pendidikan yang sedikit diperhatikan.

*Blasting* dikenakan kepada setiap orang yang telah berumur 15 tahun, tanpa pertimbangan apakah anak tersebut telah sanggup mencari penghidupan atau belum. Di Bangkinang, setiap orang yang telah wajib *blasting* dikenakan sebesar 2 rupiah 40 sen. Bagi rakyat yang diambil untuk bekerja rodi dibayar 25 sen sehari dan apabila tidak dapat melaksanakan rodi dikenakan hukuman $\pm$ 3 bulan. 17)

Bermacam-macam tindakan dijalankan pemerintah Hindia Belanda untuk menegakkan roda pemerintahannya di daerah Riau. Setiap guru yang akan mengajar pada sekolah pemerintah atau sekolah swasta harus mendapat izin dari pemerintah. Peng-

17) Ibid., *Wawancara*, 18-10-1978.

awasan ini dilakukan agar setiap guru dapat mematuhi peraturan pemerintah Hindia Belanda.

Sikap pemerintah Hindia Belanda yang keras ini kurang mendapat simpati rakyat. Hampir seluruh lapangan kehidupan rakyat dicampuri pemerintah Belanda secara langsung atau tidak langsung. Pendirian mesjid baru di Pasar Taluk Kuantan dihalangi pemerintah Swapraja yang dibantu pemerintah Hindia Belanda. Alasan untuk menghalang-halangi pembangunan mesjid tersebut adalah keputusan kaum adat bahwa setiap kota hanya boleh didirikan satu mesjid. Namun pembangunan mesjid itu terus berlangsung dan salah seorang panitianya adalah Dr.Abu Hanifah. Karena terdengar berita bahwa dirinya akan diperhentikan dari dokter Swapraja Kuantan, Dr.Abu Hanifah minta berhenti pada tahun 1938. 18)

2. *Keadaan Masyarakat*

a. Ekonomi

Krisis ekonomi dunia melumpuhkan kehidupan seluruh perekonomian. Barang-barang ekspor tidak laku di pasaran internasional. Daerah Riau ikut terpengaruh akibat krisis ekonomi itu, karena sebagian besar rakyat sangat tergantung hidupnya dari hasil ekspor karet, kelapa dan hasil hutan.

Usaha-usaha untuk mengatasi kesulitan ekonomi itu sangat sukar dicari. Satu-satunya jalan yang dapat ditempuh rakyat yaitu kembali kepada pertanian. Kebiasaan hidup mewah selama harga karet mahal sebelum depresi ekonomi, nampaknya mempengaruhi semangat mereka untuk bertani. Mereka menjadi malas sehingga jatuh miskin.

Pada tahun 1935 karet mulai berharga kembali, tetapi belum menyerupai keadaan sebelum krisis ekonomi. Permintaan dunia akan hasil karet belum seimbang dengan hasil produksi yang ada. Tahun 1937 Pemerintah Hindia Belanda membuat peraturan pembatasan produksi karet dengan maksud agar kestabilan harga dapat dipertahankan. 19) Peraturan ini pada hakekatnya merugikan perkebunan karet rakyat, sebaliknya menguntungkan perusahaan perkebunan besar karena mereka diperbolehkan tetap berproduksi seperti biasa.

---

18) Jamal Lako Sutan, *Op.cit., halaman 19.*

19) Jamal Lako Sutan, *Sejarah Kuantan dan Inderagiri*, Naskah, halaman 70.

20) UNRI, *Sejarah Riau*, Naskah, halaman 517.

Pemerintah Hindia Belanda membentuk badan *Rubber Restrictie Dienst* (RRD) 20) untuk melaksanakan peraturan pembatasan produksi karet itu. RRD bertugas mencatat semua kebun karet rakyat dan menghitung jumlah batang setiap bidang kebun karet rakyat. Sebagai bukti bahwa telah didaftar, kepada pemilik diberikan "tanda pendaftaran" dan sekali tiga bulan diberikan "kupon" (sejenis surat berharga) sesuai dengan banyak bidang dan jumlah pohon karet.

Harga tiap kilogram karet sebesa f 0,30 (tiga puluh sen). Sistem kupon berlangsung antara tahun 1937 sampai tahun 1940. Penerimaan kupon pada dasarnya merugikan rakyat sebab produksi karet rakyat dikurangi. Imbalan yang berupa kupon untuk sebagian rakyat disambut dengan senang hati, sebab dengan tidak menyadap karet mereka sudah mendapat hasil. Mereka melihat hanya dari segi tenaga yang dipakai, tidak melihat secara keseluruhan.

Di samping pembatasan produksi karet, rakyat dikenakan lagi pungutan bea ekstra seperti yang terjadi di daerah Kuantan. Bea ekstra itu dijadikan *fonds* (dana) yang disebut *Rubber fonds.* Dana itu sebagian diserahkan kepada tiap-tiap negeri di Kuantan dan digunakan untuk biaya berbaikan pasar dan mesjid-mesjid. Sisanya digunakan untuk biaya perbaikan jembatan yang ada di Kuantan, dari kayu menjadi jembatan besi.

Di daerah Bengkalis barang-barang yang jajakan di suatu tempat dikenakan pula pajak. Barang-barang makanan dan minuman cukup dengan izin dari pemerintah Hindia Belanda. Bahkan di seluruh daerah Riau setiap rakyat yang telah berumur 15 tahun ke atas dikenakan lagi *blasting.* Sekitar tahun 1940 kehidupan ekonomi rakyat sangat merosot, banyak penduduk yang makan sagu, gaplek dan gadung di daerah Bengkalis. Gangguan keamanan terjadi di mana-mana, sehingga rakyat merasa ketakutan.

Pemerintah Hindia Belanda telah menemukan bouxit di Kijang sejak tahun 1935. Tambang itu diusahakan oleh *Nederlandsch Indische Bouxit Exploitatie Maatschappij.* Tahun 1940 tambang itu telah menghasilkan sebesar 275.000 ton. 21) Di samping itu dibuka pula tambang emas di Logas tahun 1937 oleh *Exploitatie Maatschappij* Bengkalis. Pada ta-

21) Jamal Lako Sutan, *Op.cit., halaman 74.*

hun itu juga dibuka tambang minyak oleh *Nederlansdsch Koninklijk Petroleum Maatschappij* yang berpusat di Lirik. Tambang minyak belum menghasilkan, ketika Belanda terpaksa menyerah kepada Jepang.

Sarana jalan menunjang perekonomian pemerintah Hindia Belanda dan perekonomian rakyat. Setelah jalan Rengat ke Taluk dibuat dan dibuka, maka pemerintah Hindia Belanda melanjutkan membuka jalan Taluk ke perbatasan Sumatera Barat dan Pekanbaru. Pada tahun 1938 jalan Rengat - Taluk - Kiliran Jao dapat ditembus, dan pada tahun itu juga telah dapat dilewati mobil sampai ke Padang. Bahkan pada tahun 1938 itu telah ada trayek angkutan Rengat - Padang dan Rengat - Bukittingi pulang pergi setiap hari. 22)

Jalan Rengat ke Tembilahan giat pula dikerjakan pada akhir pemerintahan Hindia Belanda, tetapi jalan itu belum siap, Belanda telah menyerah kepada Jepang. Sejak pendudukan Jepang tahun 1942 pembuatan jalan Rengat - Tembilahan tidak diteruskan lagi.

*Di Bengkalis, jalan-jalan dikerjakan oleh Biro Water Staat* (BOW) dan biro itu telah berhasil membuat jalan Bengkalis ke Ketam Putih, Banten dan Miskun. Di samping itu BOW juga membuat polong air dan parit. BOW hanya berjalan sampai tahun 1941, setelah perang dunia kedua meletus. 23) Pada akhir pemerintah Hindia Belanda ada rencana membuat jalan kereta api dari Muara Sijunjung ke Tembilahan, tetapi keburu meletusnya perang dunia kedua.

b. Sosial Budaya

Keadaan ekonomi yang buruk mengakibatkan sosial-budaya kurang mendapat perhatian. Rakyat tidak dapat memikirkan kepentingan masyarakat karena kesibukan mencari penghidupan. Kebudayaan tidak berkembang, karena keadaan hidup yang merosot. Pemerintah Belanda menjelang perang dunia II tidak memperhatikan sosial-budaya masyarakat karena menghadapi perang dunia itu sendiri.

Perkembangan agama Islam menjelang perang dunia kedua terus meningkat, dakwah agama berlangsung terus. Muhammadiyah yang berkembang di tengah-tengah masyarakat Riau membawa faham pembaharuan dan membersihkan un-

---

22) *Ibid.*, halaman 68

23) Djasman Kariosentono, "Wawancara", tanggal 21 Agustus 1978, di Bengkalis.

sur bid'ah dan churafat. Tidak dapat dihindarkan bahwa di daerah Riau masih terus bertahan faham tua sehingga di daerah Riau terdapat faham tua dan faham muda. Faham muda adalah faham yang dianjurkan Muhammadiyah dan faham tua yaitu faham lama yang tetap bertahan. Kedua faham itu terus berjalan sendiri-sendiri.

Pemerintah Hindia Belanda telah mendirikan Sekolah Desa 3 tahun, Sekolah *Gouvernement* 5 tahun dan HIS. Sekolah Desa 3 tahun pada akhir pemerintah Belanda hampir terdapat di setiap desa. Sekolah *Gouvernement* hanya ada di tempat-tempat yang dianggap penting seperti : Siak, Bengkalis, Selat Panjang, Bagan Siapi-api, Rengat, Tembilahan, Taluk, Tanjung Pinang, Pasir Pengaraian dan Pekanbaru. HIS pemerintah hanya ada di Tanjung Pinang dan Siak. HIS Tanjung Pinang khusus bagi rakyat dari *Afdeeling* Kepulauan Riau dan Afdeeling Inderagiri. HIS Siak untuk rakyat yang ada di daerah *Afdeeling* Bengkalis.

Untuk memasuki HIS sangat sulit karena letaknya yang sangat jauh dan uang sekolah yang mahal, yaitu f. 3,00 sebulan. Uang sekolah sebesar itu tidak terjangkau oleh rakyat biasa. Karena itu yang masuk HIS hanya anak bangsawan dan penghulu-penghulu. Didorong keadaan tersebut, pemuka masyarakat berusaha mendirikan sekolah partikelir. Tetapi untuk mendirikan sekolah harus memperhatikan peraturan *Wilde Scholen Ordonnantie. 24)*

Sementara itu organisasi keagamaan dan pemuka-pemuka Islam berusaha pula mendirikan sekolah-sekolah agama, madrasah dan Pondok Pengajian. Di Kuok didirikan oleh Datuk Sinaro, di Air Tiris oleh Haji Jaafar dan di Rumbio oleh Datuk Laksamana. Di Bengkalis didirikan pula Pondok Pengajian dengan gurunya Lilit, Haji Muhammad, Tuan Guru Haji Ahmad. Pondok Pengajian ini hanya hidup sampai tahun 1940.

Setiap cabang Muhammadiyah mendirikan sekolah *Ibtidaiyah, bahkan ada yang mendirikan Sekolah Tsanawiyah* (sekolah lanjutan). Pada tahun 1937 cabang Muhammadiyah Taluk telah mendirikan *Muallimin* (Sekolah Guru Muhammadiyah). Rencana pelajaran 50 % pengetahuan umum dan

---

24) UNRI, *Op.cit., halaman 510.*

50% pelajaran agama. Di samping itu Muhammadiyah aktif pula mengadakan kursus buta huruf, terutama untuk kalangan anggotanya. Akhir pemerintah Hindia Belanda anggota Muhammadiyah telah bebas buta huruf.

Berkat kegiatan pemuka-pemuka masyarakat, maka berdirilah sekolah-sekolah partikelir. *Schakel School* di Rengat, HCS dan HIS Muhammadiyah di Bagan Siapi-api, HIS di Pekanbaru dan Selat Panjang. Tahun 1940 di Taluk didirikan pula *Schakel School* (sekolah sambungan) tetapi belum sempat mengeluarkan murid sudah dituttup pada tahun 1942.

*Sekolah yang tertinggi di daerah Riau pada zaman Belanda hanyalah HIS, HCS dan Schakel School.* Untuk melanjutkan ke sekolah yang lebih tinggi harus ke Medan, Padang dan Jakarta. Karena terbatasnya sarana pendidikan ini, maka rakyat di daerah Riau ketinggalan dibandingkan dengan daerah lain.

c. Kesehatan Rakyat

Di beberapa kota kecil dalam daerah Riau telah didirikan Rumah Sakit. Disetiap diberi seorang dokter pemerintah Hindia Belanda. Menurut keputusan Kepala Dinas Kesehatan Rakyat tahun 1933, di daerah Riau di tempatkan 9 orang dokter pemerintah. Setiap dokter bertugas memelihara kesehatan rakyat. Kesembilan dokter itu di tempatkan di Tanjung Pinang, Bengkalis, Bagan Siapi-api, Pekanbaru dan Bangkinang. 25) Poliklinik ditempatkan pada ibukota *onderdistrict* di bawah pengawasan seorang jururawat.

Di samping dokter pemerintah, ada lagi tenaga dokter di perkebunan Air Molek, Maskapai Singkep-, yang dibiayai sepenuhnya oleh perusahaan itu, Di daerah Swapraja Kuantan diangkat pula seorang dokter Swapraja dan ditempatkan di rumah sakit Taluk. Di antara dokter yang pernah bertugas di Taluk yaitu Dr.Abu Hanifah dan Dr.Ilyas.

Untuk menghindari berjangkitnya wabah cacar dilakukan pencacaran massal terhadap rakyat. Pencegahan penyakit puru dengan jalan suntikan, kebersihan badan dan pakaian. Sebelum ada pencegahan itu banyak orang yang meninggal akibat penyakit cacar. Usaha memberantas penyakit malaria, sangat jarang terjadi padahal rakyat sangat banyak ketularan penyakit itu. Di daerah Riau penyakit malaria sangat mudah berkembang karena banyaknya rawa-rawa yang menjadi sarang nyamuk.

Karena kurangnya sarana pengobatan dan jauhnya rumah sakit, maka sebahagian besar rakyat masih berobat ke dukun-dukun. Tambahan lagi berobat ke dukun itu biayanya lebih murah dan kepercayaan sebagian rakyat terhadap obat dari dukun masih kuat.

3. *Sikap Masyarakat terhadap Pemerintah Hindia Belanda*

Rakyat tidak dibolehkan mengadakan rapat-rapat dan berkumpul lebih dari tiga orang. Pemerintah Hindia Belanda semakin ketat mengawasi setiap gerakan rakyat, kecuali da'wah agama yang mendapat izin. Melalui da'wah ini disampaikan ajaran agama dan jiwa nasional.

Tahun 1939 perang dunia kedua berkobar di Eropah. Negeri Belanda turut serta berperang di pihak sekutu dan kekuatan Negeri Belanda tidak sebanding dengan kekuatan Nazi Jerman. Masyarakat telah mengetahui terjadinya perang dunia kedua serta keterlibatan Belanda dalam perang itu. Sebab itu mereka sangat berhati-hati dalam segala tindakan dan menanti apa yang akan terjadi.

Pada tanggal 10 Mei 1940 negeri Belanda diserang oleh Nazi Jerman dan tanggal 14 Mei 1940 didudukinya. Raja Belanda melarikan diri ke Inggris untuk minta perlindungan, meskipun Inggeris sendiri masih ragu-ragu apakah mungkin dapat mematahkan Jerman. 26) Akibatnya hubungan Negeri Belanda dengan pemerintah Hindia Belanda terputus dan Hindia Belanda berjalan sendiri. Peristiwa pendudukan Nazi Jerman ini tidak disiarkan oleh Pemerintah Hindia Belanda. Tujuannya agar rakyat Indonesia tetap mengakui keunggulan Belanda atau Belanda adalah bangsa yang tidak terkalahkan. Rakyat Indonesia mengetahui bahwa negeri Belanda diduduki Nazi Jerman, walaupun Pemerintah Hindia Belanda merahasiakannya.

Berita kekalahan Negeri Belanda itu sangat mempengaruhi Pemerintah Hindia Belanda. Orang Belanda di daerah Riau terlihat panik dan lesu. Hal ini dapat dilihat dari air muka orang-orang Belanda seperti *Controleur-controleur*. Peringatan hari lahirnya Ratu Yuliana yang akan diadakan tanggal 31 Agustus 1941 di Taluk yang seharusnya akan dimeriahkan dengan lomba

---

25) Jamal Lako Sutan, Op.cit., halaman 64.

26) BHM Vlekke, *Nusantara (Sejarah Indonesia)*, Dewan Bahasa dan Pustaka, Kementerian Pelajaran Malaysia, Kualalumpur, 1967, halaman 402.

perahu tidak jadi dilaksanakan. Para *controleur* tidak bergairah.

Pemerintah Hindia Belanda setelah terpisah dengan Negeri Belanda berusaha mengumpulkan kekuatan sendiri. Di Bagan Siapi-api Belanda menyusun penjaga keamanan yang kebanyakan terdiri dari orang Cina. Untuk menjaga keamanan di daerah-daerah dikerahkan pemuda-pemuda Indonesia. Menara penjagaan dibuat di atas pohon-pohon kayu. Orang yang bertugas untuk menjaga menara diberi alat perlengkapan yang dipasang pada telinga disebut *telinga gajah* dan juga pluit. Apabila ada bahaya maka pluit dibunyikan dan diikuti oleh lonceng-lonceng yang ada di tanah.

Untuk mendapatkan sokongan rakyat, Belanda berusaha mendekatinya. Namun rakyat bersikap acuh tak acuh. Di Bengkalis, Tembilahan, Rengat dan hampir semua daerah Riau rakyat diperintahkan juga mempersiapkan kebutuhan bahan makanan cadangan. Di Bengkalis dibentuk *stadswacht* (penjaga kota). Belanda mengimpor bahan makanan dari Singapura dan Ranggun. Gudang-gudang dipersiapkan untuk menampung barang-barang import itu. Bahan makanan itu didistribusikan kepada rakyat.

Berbagai bujukan dilakukan pemerintah supaya rakyat ikut mempertahankan kekuasaan Belanda. Organisasi sosial yang sebelum Negeri Belanda jatuh kepada Nazi Jerman, tidak dapat bergerak, setelah itu diperlonggar. Belanda bersikap lunak terhadap organisasi itu, dengan harapan Belanda supaya rakyat membantu Belanda pada saat datang serangan dari luar. Rakyat yang sudah mengerti tujuan perubahan sikap Belanda itu, menunggu apa yang akan terjadi setelah perang dunia berakhir.

4. *Keadaan Pemerintah Hindia Belanda di Daerah pada Saat Terakhir.*

Pada tanggal 7 Desember 1941 meletus Perang Pasifik. Jepang membom armada Amerika Serikat di Pearl Harbour. Pada tanggal 8 Desember 1941 Amerika Serikat, Inggris dan Belanda menyatakan perang terhadap Jepang. 27) Praktis Pemerintah Hindia Belanda terlibat dalam peperangan itu.

Dalam menghadapi Jepang, Belanda berusaha mengambil hati rakyat agar rakyat Indonesia, bersedia mempertahankan kekuasaan Belanda. Belanda membentuk komisi Visman pada bu-

---

27) Nio You Lan, *Jepang Sepanjang Masa*, PT Kenta, Jakarta, 1962, halaman 282.

lan Nopember 1941. Pada bulan Nopember itu juga misi memutuskan dan menjanjikan satu perubahan ketatanegaraan bagi bangsa Indonesia setelah perang selesai. Rakyat bersikap masa bodoh terhadap itu. Kepercayaan rakyat terhadap pemerintah Hindia Belanda semakin berkurang, bahkan ada yang mengharapkan agar Jepang cepat datang. Rakyat ingin Belanda runtuh secepat mungkin.

Di Bangkinang Belanda mengumpulkan ninik mamak dan kepada mereka dikatakan bahwa walaupun Belanda kalah, tetapi Belanda akan kembali lagi berkuasa di Indonesia. Belanda berpesan supaya ninik mamak bersabar dahulu. Ninik mamak acuh tak acuh atas bujukan pemerintah Hindia Belanda itu.

Setelah Jepang menyerang Pearl Harbour, Inggris memperkuat pertahanannya di Singapura dan Malaya. Tetapi kekuatan Jepang jauh lebih unggul dari kekuatan Inggris. Pemerintah Hindia Belanda sangat mengandalkan pertahanan Inggris di Singapura; karena tidak dapat lagi mengharapkan bantuan dari Negeri Belanda.

Pada saat Singapura digempur Jepang, terjadi peperangan yang dahsyat. Perang di Singapura dapat disaksikan dari Tanjung Uban. Melihat kekuatan dan keberanian tentara Jepang itu tentara Hindia Belanda (KNIL) melarikan diri dari Tanjung Uban ke Rengat. Ikut serta dalam pelarian itu Residen Belanda di Tanjung Pinang. Tentara Australia yang ikut mempertahankan Malaya dan Singapura lari ke Rengat dan Pekanbaru selanjutnya ke Padang dan terus kembali ke Australia. Tentara Australia itu mengakui keberanian dan kekuatan tentara Jepang. 28)

Pada tanggal 23 Desember 1941 Belanda mengosongkan Bengkalis dan mereka berkumpul di Pekanbaru. Pemerintah Hindia Belanda tidak lagi memperhatikan politik pemerintahan, kebudayaan dan agama. Mereka sudah panik, di antara mereka ada yang hanya menanti kekalahannya.

Jauh sebelum Perang Pasifik meletus, banyak orang Jepang yang masuk ke daerah Riau. Di Pekanbaru dan Bengkalis ada toko Jepang dan di Tanjung Pinang sudah ada orang-orang Jepang yang menyamar sebagai pedagang kecil. Sesungguhnya mereka itu adalah mata-mata Jepang.

---

28) Jamal Lako Sutan, *Op.cit,*. halaman 22.

Karena diliputi suasana perang, pemerintah Hindia Belanda tidak lagi memperhatikan ekonomi rakyat. Akibatnya ekonomi rakyat menjadi kucar-kacir dan tidak terurus lagi.

## E. KEDATANGAN PASUKAN PENDUDUKAN JEPANG

Sampai masa terakhir pemerintahan Hindia Belanda daerah Riau terbagi dalam tiga daerah administrasi yakni :

1. Daerah *Residentie Riouw Onderhorigheden* dengan ibu kota Tanjung Pinang.
2. *Afdeeling* Bengkalis yang menjadi bagian dari *Governement Sumatras's Oostkust* dengan ibu kota Bengkalis.
3. *onderafdeeling* Bangkinang yang merupakan bagian dari *afdeeling* Lima Puluh Kota dan termasuk *Governement Sumatra's Westkust* dengan ibu kota Padang.

Pembagian daerah administrasi Belanda itu tidak mempengaruhi secara langsung tata pemerintahan setempat. Pejabat-pejabat pemerintah Belanda tidak menjalankan pemerintahan daerah. Mereka berada di sana untuk mengawasi jalannya pemerintahan kerajaan-kerajaan. Pemerintahan yang sesungguhnya tetap dijalankan oleh raja-raja atau sultan-sultan melalui saluran hierarkhi kerajaan sendiri, sehingga rakyat tidak merasa mengenal adanya pemerintahan Hindia Belanda. Dengan demikian kesatuan-kesatuan masyarakat yang ada tetap utuh dan hukum adat menjadi dasar dari struktur pemerintahan.

Akan tetapi perlu diketahui bahwa pejabat-pejabat kerajaan yang ditunjuk oleh raja atau sultan harus mendapat persetujuan pemerintah Belanda terlebih dahulu. Bahkan pengangkatan raja atau sultan juga harus mendapat persetujuan pemerintah Belanda. bagaimana pun raja-raja atau pun sultan hanyalah alat saja dari pada pemerintah Belanda, atau sekurang-kurangnya berpura-pura tunduk kepada kemauan pemerintah Belanda.

Untuk membatasi kekusaan raja-raja dan sultan-sultan pemerintah juga membuat peraturan-peraturan atau perjanjian-perjanjian dengan raja dan sultan bersangkutan. Untuk mengurangi wibawa raja-raja maka pemerintah Belanda melarang kerajaan-kerajaan itu mempunyai pasukan sendiri. Selain itu pemerintah Belanda khawatir bila pasukan kerajaan itu digunakan untuk melawan kekuasaan pemerintah Belanda. Para raja hanya dibenarkan mempunyai pasukan kehormatan saja. Mereka tidak dibolehkan memakai tanda-tanda pangkat militer atau kebesaran lainnya, bahkan mereka sama sekali dilarang mempunyai senjata.

Kedudukan hulubalang, panglima serta pendekar-pendekar kerajaan lainnya sekarang hanya dipakai sebagai penjaga keamanan kampung. Dengan demikian mereka sengaja direndahkan martabatnya di mata rakyat.

Dalam teori kerajaan-kerajaan itu berdiri sendiri atau dengan kata lain mempunyai hak otonomi, tetapi kenyataannya hak itu sedikit demi sedikit terus dikurangi. Dengan tidak terasa pemerintah Belanda kemudian mencampuri kekuasaan legislatif dari kerajaan-kerajaan. Undang-undang yang berlaku bukanlah undang-undang yang dikeluarkan oleh dewan-dewan kerajaan, akan tetapi adalah undang-undang pemerintah Belanda.

Pada akhir pemerintahan Hindia Belanda di Kuantan terdapat *Kuantan-raad* yang bertugas untuk menentukan anggaran belanja daerah serta memikirkan tentang kemajuan daerah. Uang kas yang didapat dari pajak tidak lagi diserahkan kepada residen akan tetapi digunakan di daerah masing-masing untuk perbaikan jalan-jalan, mendirikan sekolah, jembatan dan lain-lainnya. Anggota dari *Kuantan-raad* adalah keturunan *Orang Gedang* atau Raja yang ditunjuk untuk seumur hidup. Sedangkan di Tanjung Pinang terdapat *Riouw-raad* yang anggotanya terdiri dari *Datuk-datuk Kaya* dan *Amir-amir*.

Wibawa raja-raja dan sultan-sultan tidak saja dikurangi dengan jalan membatasi kuasanya, akan tetapi juga dengan mengurangi uang penghasilannya yang selama ini diambil dari pajak. Pengaturan dan pengawasan oleh Pemerintah Belanda ini menyebabkan orang Indonesia dalam mengatur pemerintahan negeri sendiri, tidak berkuasa. 29)

Depresi dunia yang hebat di tahun 1929 menimbulkan akibat bagi perekonomian penduduk Riau. Akibat depresi itu bagi negara industri tidak sehebat di daerah agraria. Di Indonesia umumnya yang merupakan negara agraris, depresi itu mendatangkan bencana besar, karena hasil produksi menjadi bertumpuk dan tidak terjual. Harganya turun dengan drastis yang mengakibatkan kehancuran bagi perekonomian rakyat. 30)

---

29) AK. Pringgodigdo SH., *Sejarah Pergerakan Rakyat Indonesia*, Dian Rakjat, Jakarta, 1967, halaman 190.

30) Burger, Prof.Dr.DH., Prayudi Atmosudirdjo, Prof. Dr.Mr. *Sejarah Ekonomi Sosiologis Indonesia II*, Negara Pradnja Paramita, Djakarta, 1962, halaman 202.

Harga karet yang melonjak antara tahun 1914-1920 menyebabkan penduduk Riau berlomba-lomba menanam karet. Sebagian rakyat mengabaikan pertanian bahan makanan. Untuk mencukupi beras terpaksa di impor dari Siam. Dengan datangnya masa depresi itu terjadilah kegoncangan pada penduduk Riau. Untuk menanggulangi keadaan itu pemerintah Belanda telah mengadakan monopoli penjualan hasil karet dan kopra rakyat. Di samping itu pemerintah juga mengadakan monopoli dalam berbagai perdagangan lainnya baik ekspor maupun impor.

Karena keuangan pemerintah mengalami kemunduran, ada usaha untuk menaikkan pajak rakyat. sehingga kehidupan rakyat yang sudah berat, semakin berat lagi.

Sementara itu terjadi pula ekspansi ekonomi Jepang di daerah Riau. Di antaranya ada orang jepang yang mengusahakan kebun-kebun kelapa, kebun karet, dan kebun kelapa sawit. Salah satunya ialah *Okura Estate* yang berusaha di lapangan perkebunan karet dan kelapa sawit. Kemudian Jepang juga memegang kontrak penyeberangan rakit di Rantau dan Danau, suatu jalur ekonomi yang fital di Riau, yang merupakan jalan penghubung antara Riau dengan daerah-daerah tetangganya. Selain itu banyak pula yang mengadakan usaha kecil-kecilan lainnya seperti toko foto, klinik obat dan lain-lain.

1. *Propaganda Jepang yang Terasa di Daerah Riau*

   Ekspansi militer yang dilancarkan Jepang di Mansyuria sangat mencemaskan semua bangsa di Asia. Ternyata kemudian bahwa Jepang ingin pula menguasai Cina. Akhirnya terbukalah kedok bahwa negeri Sakura ini betul-betul merencanakan untuk menguasai seluruh Asia Tenggara. Situasi politik internasional pada akhir dasawarsa keempat di abad itu sangat mencemaskan. Berita-berita tentang situasi politik internasional pada masa itu diikuti oleh semua orang baik melalui media pers maupun yang disampaikan oleh orang-orang yang pulang pergi berniaga ke Singapura. Sementara itu orang-orang Jepang yang berada di Riau secara sembunyi-sembunyi melancarkan propagandanya kepada rakyat bahwa Jepang pada suatu waktu, akan datang membebaskan rakyat Indonesia dari penindasan penjajahan Belanda. Berita itu disampaikan secara bisik-bisik dari mulut ke mulut.

   Suasana itu menjadi semakin tegang setelah beberapa orang Jepang di Riau ditangkapi Belanda. Salah seorang di antara mereka itu adalah pengusaha foto yang bernama Watanabe

yang pernah membisikkan kepada Abdul Ganie bahwa perang akan pecah tidak akan lama lagi. Setelah diperiksa ternyata bahwa ia adalah seorang militer Jepang yang berpangkat Mayor. 31)

Abdul Ganie yang pada masa itu bertugas sebagai kepala kantor *Ukura Sangyo Kubushiki* bersama dengan kawan-kawannya : Syarif, Ahmad, Amir Hamzah, Dt.Wan Abul Rahim, dan Itam mengadakan rapat di rumah Tengku Aladin untuk membentuk komite penyambutan Jepang, anggota komite memakai tanda pengenal berbentuk segi empat dengan bulatan di tengahnya. Rupanya polisi Belanda dapat mencium gerak-gerik komite itu yang telah mengadakan rapat semalam. Untung bagi mereka karena pada sebelumnya sudah membuat sebuah notulen rapat palsu sehingga mereka akhirnya dibebaskan.

Sementara itu propaganda Jepang sudah tersiar dan meluas di mana saja. Propaganda Jepang ada juga yang dibawa oleh orang-orang yang berdiam di perbatasan Singapura dan Malaya menyebabkan berita-berita itu cepat sampai ke Riau. Jepang sangat pandai menggunakan keadaan. Dengan slogan yang muluk-muluk yang berbunyi : "Kita orang Asia bersaudara", karena itu penjajahan Barat harus dimusnahkan dari bumi Asia, "*Dai Toa Senso*", dan "Asia untuk bangsa Asia". Propaganda ini disiarkan melalui radio Tokio dan pada akhir siarannya selalu dikumandangkan lagu Indonesia Raya. 32)

Mungkin karena sikap pemerintah Hindia Belanda yang tidak mau ambil peduli akan keinginan-keinginan rakyat yang baik selama ini menyebabkan rakyat terbius oleh propaganda Jepang tersebut. Rakyat sadar bahwa janji Belanda yang akan memberikan pemerintahan sendiri kepada Indonesia dengan secara berangsur-angsur hanyalah pemanis mulut belaka. Belanda sengaja menghalang-halangi perkembangan pendidikan bangsa Indonesia dengan mengeluarkan Undang-undang Sekolah Swasta *(Wilde Scholen Ordonnantie)*.

Masa sepuluh tahun terakhir pemerintahan Hindia Belanda di Indonesia umumnya kehidupan politik mengalami kemundur-

---

*31) Wawancara* dengan Haji Abdul Ganie (Letnan Purnawirawan) di Pekanbaru tanggal 28 dan 31 Oktober 1978.

32) Mr.Ahmad Subardjo Djojodisuryo, *Lahirnya Republik Indonesia*, PT.Kinta, 1972 halaman 14

an akibat dari tindasan dari pemerintah Belanda. Di Riau tokoh-tokoh nasionalis yang militan sudah ditangkap dan banyak yang dipenjarakan. Oleh karena itu masuknya propaganda Jepang mendapat sambutan hangat dari pejuang-pejuang nasionalis yang selama ini tidak dapat berkutik. Mereka tidak sadar akan strategi politik yang dilancarkan oleh Jepang itu. Mereka sudah lama memimpikan tumbangnya kekuasaan kolonial Belanda di bumi Indonesia ini.

Beberapa orang propagandis Jepang memakai identitas huruf F *(Fujiwarakiku)* di lengan bajunya. Di daerah Cerenti propaganda itu disiarkan oleh Jusin, Thoha Hanafi dan di Basrah oleh H.Burhan, dan di Pangean oleh M.Zen. Kemudian daerah propagandis menjadi semakin luas yang masing-masing mempunyai daerah sendiri yaitu Abu Bakar Abduh di Rengat, Haji Ismail Umar di Cerenti, Umar Usman di Talük dan H.M. Nur di Baserah.

Kegiatan yang diadakan oleh pemuda-pemuda Riau itu tercium oleh Belanda. Beberapa pemuda yang dituduh ikut kegiatan itu ditangkap dan dikirim ke penjara di Jawa (Garut). Propaganda Jepang itu rupanya juga mendapat sambutan dari orang-orang Cina di Kepulauan Riau.

Sementara itu propaganda Jepang ada juga yang datang dari daerah Sumatera Barat, di antaranya dibawa oleh Bustami anggota *padvinder* dari Bukittinggi. Berita itu tersiar di daerah Kampar. Seorang pelarian politik dari daerah Kampar, H.Muhammad Amin pada tahun 1934 kembali lagi ke Kampar bersama-sama dengan Jepang (1942). Kedatangannya disambut dengan tepuk tangan oleh penduduk.

2. *Waktu Kedatangan Pasukan Jepang*

Daerah Riau dimasuki Jepang dari tiga arah yaitu dari arah pantai Timur dengan menduduki Kepulauan Riau, dari arah Barat dengan melalui Sumatera Barat dan dari arah Utara dengan melalui Sumatera Utara.

Penyerangan pertama dilancarkan Jepang terhadap kepulauan Riau pada tanggal 14 Desember 1941 oleh tiga skwadron pesawat terbang. Pulau yang pertama-tama mendapat serangan yaitu pulau Tarempa. Pulau ini sangat penting artinya karena letaknya strategis bagi pertahanan Belanda, karena itu pemerintah Belanda menempatkan stasiun radio yang dikepalai oleh orang Belanda sendiri. Untuk menguasai daratan Riau (Sumatera) ma-

ka pulau ini haruslah terlebih dahulu direbutnya, apalagi di pulau itu terdapat pula station radio yang merupakan alat vital bagi pertahanan. 33) Pulau Tarempa yang terletak di District Siantan di Laut Cina Selatan itu dihujani dengan bom disertai tembakan-tembakan gencar yang mengakibatkan banyaknya orang yang terbunuh. Serangan itu diulang kembali pada tanggal 19 Desember 1941 yang diikuti oleh pendaratan pasukan Angkatan Laut Jepang pada tanggal 25 Januari 1942. 34)

Pontianak jatuh ke tangan Jepang pada tanggal 10 Februari 1942. 35) Setelah Singapura berhasil direbut Jepang dari tangan Inggris pada tanggal 15 Februari 1942, maka Jepang mengadakan penyerangan ke seluruh daerah Kepulauan Riau dan Sumatera. Pada tanggal 21 Februari 1942 Tanjung Pinang diduduki dan kemudian berturut-turut kota-kota lainnya. Kedatangan pasukan Jepang ke sana telah mendapat bantuan dari beberapa tokoh Cina di sana antara lain ialah Cia Sun Haw, Oei Cap Tek dan Cei Pit Sip Cs. 36)

Kedatangan Jepang ke daerah daratan Riau yang melalui Sumatera Barat dan Sumatera Utara tidak dilakukan melalui peperangan. Ketika Jepang menyerang Tarempa staf pemerintahan Belanda di sana melarikan diri. Mereka berkumpul di Pekanbaru dan Siak. Kedatangan Jepang di daerah ini disambut dengan hangat oleh penduduk. Penduduk sungguh kagum melihat keberhasilan Jepang mengusir Belanda. Orang-orang Belanda yang sangat mereka takuti dan hormati selama ini ternyata tidak mampu mengadakan perlawanan sama sekali terhadap Jepang. Keadaan demikian melunturkan anggapan rakyat selama ini terhadap Belanda, bahwa Belanda/orang kulit putih adalah bangsa yang tak terkalahkan. Ternyata Belanda tidak berbeda dengan mereka yang juga mengenal rasa takut. Peristiwa itu besar artinya bagi pemupukan rasa percaya diri sendiri yang memperkuat kesadaran kebangsaan.

Sikap Jepang pada mulanya sangat ramah kepada penduduk. Mereka suka bermain-main dengan anak-anak. Inilah taktik yang dipakai mereka untuk memikat hati penduduk.

---

33) *Wawancara* dengan Letnan Kolonel Purnawirawan H.Mohd.Djamin St.Bandaro, Pekanbaru, tanggal 20-9-1978.

34) Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah Riau 1977/1978, *Sejarah Daerah Riau*, halaman 224.

35) Sartono Kartodirdjo, et.al, *Sejarah Nasional Indonesia VI*, Dep. P dan K, Jakarta, 1975, halaman 1.

36) Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah, *Op.cit., halaman 225.*

Akan tetapi setelah seluruh daerah Riau dikuasainya, suasana ramah tadi mulailah hilang. Muncullah watak fasis yang sebenarnya. Bendera Merah Putih tidak boleh lagi dikibarkan. Kemudian menyusul peraturan-peraturan baru yang harus diikuti oleh semua penduduk. Setiap orang yang bertemu dengan Jepang haruslah membungkukkan badan dan mengucapkan "banzai" dan "saikeree" kepada Tenno Haika. Tentu saja peraturan-peraturan baru itu sangat menyinggung perasaan penduduk yang fanatik agama. Sekarang mereka disuruh menundukkan kepala ke arah Timur yaitu ke arah matahari terbit tempat Tenno Haika kaisar Jepang. Bila rakyat tidak mau atau lupa maka mereka ditempeleng, disepak dan dikatai dengan kata-kata kasar "bagero", "nanda gurah" dan sebagainya.

3. *Sikap Jepang terhadap Aparatur Pemerintah Hindia Belanda*

Penyerangan pasukan Jepang ke daerah Riau ini menimbulkan kepanikan pada orang-orang Belanda yang ada di Riau. Sebagian dari mereka ada yang melarikan diri ke Australia dengan kapal laut dan kapal udara. Dan yang tidak sempat melarikan diri ditangkap oleh tentara Jepang seperti Asisten Residen Bengkalis, *Controleur* Bagan Siapi-api dan beberapa pembesar lainnya. Mereka dikumpulkan dan disuruh berbaris di halaman Istana Sultan Siak, disaksikan oleh seluruh rakyat. Pembesar-pembesar Belanda itu dibentak-bentak dan dihina di muka rakyat jajahannya. Peristiwa itu menjatuhkan martabat orang Belanda di mata rakyat. Bersama-sama mereka juga terdapat orang-orang Indonesia yang dianggap kaki tangan Belanda. Mereka terus dijemur di sana sampai sore harinya..

*Stoot-troep* tentara Jepang pertama kali masuk Pekanbaru melalui kota Payakumbuh (Sumatera Barat) kira-kira pada awal tahun 1942. Waktu itu yang menjabat *Districthoofd* Pekanbaru adalah Datuk Wan Abdurrahchman.

Dua hari sesudah kota Pekanbaru diduduki tentara Jepang, sebagian masyarakat mengadakan rapat umum di Pasar Bawah yang disponsori oleh seorang pemuda dari Sumatera Barat yang datang bersamaan dengan *stoot-troep* tentara Jepang. Isi pidato yang disampaikan dalam rapat itu, ialah usaha mengambil alih kekuasaan pemerintahan dengan menempatkan orang-orang yang telah mereka siapkan lebih dahulu. Kebetulan sekali pada waktu itu satu pasukan patroli Jepang datang ke rumah Datuk Wan Abdul Rachman. Ia serta merta melaporkan kejadian tersebut kepada komandan pasukan itu. Dengan segera komandan

pasukan Jepang itu pergi ke lapangan untuk membubarkan rapat umum itu dan menangkap pemimpinnya. 37)

Oleh kapten Sanade, komandan pasukan Jepang itu, Datuk Wan Abdul Rachman ditunjuk menjadi komandan pasukan Indonesia yang ditugaskan mengumpulkan semua bangsa Belanda yang ada di seluruh Riau termasuk Riau Kepulauan untuk di bawa ke Pekanbaru. Di Pekanbaru semua tawanan itu dikumpulkan di sebuah pesanggarahan Landschap, di dekat pelabuhan yang sekarang dan kemudian dikirim ke kamp intenering di Stanum Bangkinang.

Kira-kira tiga bulan kemudian masuklah ke kota Pekanbaru Pemerintah Militer Jepang yang dikepalai oleh seorang Gubernur Militer bernama Kolonel Makino Sazaburo.

Dalam masa pemerintahan Jepang inilah kota Pekanbaru dijadikan ibu kota keresidenan Riau. Keresidenan Riau yang oleh Jepang disebut *Riau Syu* itu meliputi daerah Riau Daratan dan seluruh pulau-pulau yang ada di pesisir Timurnya. Daerah Riau Kepulauan *(Afdeeling Riouw)* kecuali Mandah, Gaung, Kateman dan Anak Serka dimasukkan ke dalam wilayah kekuasaan militer Jepang yang berpusat di *Syonanto* (Singapura). *Syonanto* artinya ialah kota di Selatan.

Jabatan *Cokan dan Bunsuco* dijabat oleh militer Jepang, sedangkan *Gunco* dan *Kuco* dipegang oleh orang Indonesia, yaitu mereka yang sebelumnya menduduki jabatan *districthoofd* dan *onderdistricthoofd. 38)* Pemerintah Jepang pada hakekatnya melanjutkan pemerintahan daerah menurut susunan pemerintah Belanda. Hanya nama-nama daerah dan yang mengepalainya yang dirubah dengan nama-nama Jepang. Menurut Undang-undang No.27 tahun 1602 daerah pemerintahan terbagi atas *Syuu* (Keresidenan), *Si* (Kotapraja), *Ken,* (Kabupaten), *Gun* (Kewedanaan), *Son* (Kecamatan) dan *Ku* (Desa), di samping adanya *Kooti* (Vorstenlanden).

Sampai saat kapitulasi Jepang yang menjabat *Syu Cokan* di Riau adalah Kolonel Makino Sazaburo. Secara hierarchie struktur pemerintahan Jepang di Riau adalah sebagai berikut :

---

37) Dt.Wan Abdul Rachman, *Kota Pekanbaru Semenjak dari Tahun 1925*, Suatu Kertas Kerja dalam Seminar Sejarah Kota Pekanbaru, 26-28 Mei 1978, Pekanbaru, halaman 2, 3.

38) Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Pekanbaru dalam "Seminar Sejarah Pekanbaru, 26-29 Mei 1978, *Pekanbaru dari Masa ke Masa*, halaman 6.

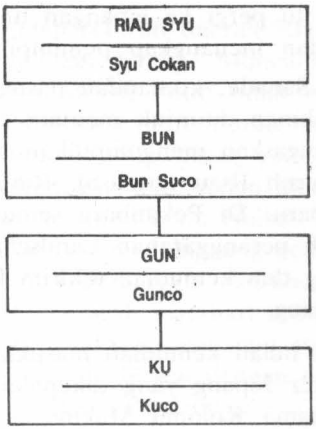


Daerah Administrasi pemerintahan Jepang di *Riau Syu* terbagi atas empat *Bun* yaitu :

a. Pekanbaru *Bun* : Pekanbaru Gun
Siak Gun
Pelalawan Gun
Pasir Pengaraian Gun

b. Bengkalis *Bun* : Bengkalis Gun
Selat Panjang Gun
Bagan Siapi-api Gun

c. Inderagiri *Bun* Rengat Gun
Taluk Gun
Tembilahan Gun

d. Bangkinang *Bun* : Bangkinang Gun
Pasir Pangaraian Gun.

Daerah Bangkinang ini baru dimasukkan daerah *Riau Syu* menjelang akhir masa pendudukan Jepang. Pasir Pangaraian yang semula masuk Pekanbaru Bun dipindahkan ke dalam wilayah Bangkinang Bun.

Kedudukan Jepang yang semakin menurun dalam Perang Pasifik menyebabkan Jepang mulai merubah politiknya terhadap penduduk Indonesia. Jepang mulai merubah politik ofensifnya kepada politik defensif dan dalam hal ini Indonesia akan dijadikan alat untuk membantu kekuatan Jepang.

Keputusan Sidang Parlemen ke 82 di Tokyo, Perdana Menteri Tojo di dalam pidatonya di lapangan Ikada...., Jakarta pada tanggal 7 Juli 1943 memberi kesempatan bangsa Indonesia

untuk turut mengambil bagian dalam pemerintahan negara". 39) Di Riau dibentuk semacam Dewan Perwakilan Rakyat dengan nama *Riau Syu Sangi Kai* yang beranggotakan 27 orang yang berasal dari dua orang utusan dari setiap Gun. Di samping itu terdapat juga anggota dari golongan Cina. *Riau Syu Sangi Kai* ini diketuai oleh Aminuddin dengan wakil ketua Raden Yusuf SA. Sebagai sekretaris ditunjuk Abbas Saleh dan Wan Ghalib. Pengangkatan dari anggota *Riau Syun Sangi Kai* ini bukan dengan pemilihan, tetapi ditunjuk dari orang-orang terkemuka di daerah setempat.

*Riau Syu Sangi Kai* bertugas untuk melancarkan pemerintahan Jepang. Mereka dalam pekerjaannya tidak dapat mengeluarkan pendapat yang bertentangan dengan kemauan Jepang. Hal ini ternyata dalam masalah pemungutan beras dan hasil-hasil lainnya dari rakyat.

Cokan terlebih dahulu tidak berunding dengan dewan ini, kecuali hanya meminta supaya dewan ini membantu bagaimana supaya bahan makanan itu dapat terkumpul dengan memuaskan. Bila ada anggota yang mencoba-coba ingin melindungi rakyat, maka ia akan berurusan dengan *Kompetai* Jepang. *Kompetai* adalah polisi militer Jepang yang sangat ditakuti rakyat karena kekejamannya yang luar biasa. Pernah kejadian salah seorang anggota dewan ini. Abdurab dari Bagansiapi-api yang mencoba mengemukakan pendapatnya yang bermaksud membela rakyat langsung diinterogasi oleh Kempetai.

Pemerintahan Jepang di Kepulau Riau berada di bawah kekuasaan Angkatan Laut Jepang di *Syonanto* (Singapura). Wakil *Syonanto Kabitai* (Datuk Bandar Singapura) di Riau ialah Residen. Pada awal masa pendudukan Jepang jabatan Residen Kepulauan Riau dipegang oleh seorang Jepang yang telah tua, bekas *Corps d'elite* tentara Kwan Tung bernama G.Yogi. Daerah-daerah *Districthoofd* seperti Tanjung Pinang, Tanjung Balai Karimun, Dabo Singkep dan Tarempa dikepalai oleh To Co. Sedangkan bekas *onderdistricthoofd* (Son) dikepalai oleh Sonco.

*Hierarchie* dari pemerintahan Jepang di Kepulauan Riau adalah sebagai berikut :

---

39) Sartono Kartodirdjo, et.al., *Sejarah Nasional Indonesia VI*, Balai Pustaka, Jakarta, 1977, halaman 12.

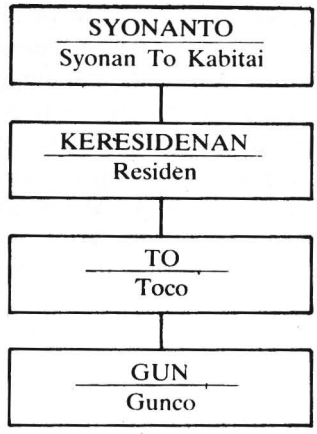


4. *Sikap Jepang terhadap Bangsa Indonesia*

Segera sesudah daerah Riau dapat dikonsolidasi oleh Jepang, mulailah Jepang berusaha menanamkan kukunya. Penduduk Riau yang dituduh kaki tangan Belanda mereka tangkap. Raja-raja dan Sultan-sultan di daerah Rokan seperti Raja Kepenuhan, Tengku Sulaiman, Raja Rokan IV Koto, Yang Dipertuan Sakti dan calon raja Tengku Muhammad, raja Kunto Darussalam yang bernama Tengku Maali gelar Tengku Pahlawan dan Tengku Palitnasif, adik raja Tambusai, dan Datuk Wan Entol yang menjabat Gunco Siak turut ditangkap.

Di antara mereka yang meninggal dalam tawanan ialah : Tengku Sulaiman, Yang Dipertuan Sakti dan Tengku Pahlawan. Putera Mahkota Rokan Tengku Muhammad dan Tengku Palitnasif baru dibebaskan dalam keadaan yang menyedihkan setelah Jepang kalah.

Sultan Siak tidak pernah ditangkap Jepang, karena Jepang khawatir bila Sultan Siak diganggu, rakyat akan berontak. Untuk membujuk Sultan-sultan dan Raja-raja, Jepang mengadakan musyawarah di antara raja-raja dan sultan-sultan yang dinamakan "*Sultan Kaigi*". Tujuan diciptakannya Sultan Kaigi itu tidak lain adalah untuk menekankan raja-raja itu supaya mereka tunduk kepada kekuasaan Jepang.

Ketika baru masuk ke Riau Jepang memperbolehkan bendera merah putih dikibarkan berdampingan dengan bendera "Hino Maru", akan tetapi setelah mereka dapat menguasai keadaan, orang Indonesia dilarang mengibarkan bendera kebangsaannya itu. Kegiatan-kegiatan politik dilarang sesuai dengan peraturan yang dikeluarkan Jepang pada tanggal 20 Maret 1942 yang kemudian dirubah dengan peraturan tanggal 15 Juli 1942. 40) Perkumpulan-perkumpulan yang dibolehkan adalah perkumpulan yang bersifat olahraga dan hiburan. Tetapi dengan syarat bahwa pemimpinnya harus bersumpah terlebih dahulu, bahwa perkumpulannya itu tidak akan menjalankan aksi politik.

Penduduk dilarang mengadakan hubungan dengan luar negeri, semua media pers dikuasai dan pesawat radio penduduk disita. Jepang khawatir kalau kekalahan-kekalahannya dalam Perang Pasifik diketahui oleh penduduk Riau. Penduduk juga tidak dibenarkan memakai kendaraan, karena itu semua kendaraan diambil dan dipakai oleh Jepang.

Semua ulama di Riau dikumpulkan, kemudian diberi indoktrinasi, agar mereka turut membantu Jepang mensukseskan perang Asia Timur Raya. Kemudian para ulama itu terpaksa menanda-tangani ikrar yang berisi bahwa mereka akan selalu berusaha mensukseskan Perang Asia Timur Raya itu. Mereka berbuat begitu dengan maksud menghalangi tindakan Jepang yang semakin mengganas terhadap penduduk. Dengan menanda-tangani ikrar itu, para ulama sudah berusaha melindungi kaum muslimin dan muslimat Riau.

Jepang yang mengalami kekalahan dalam peperangan di sekitar kepulauan Salomon mulai mengambil langkah-langkah baru. Untuk persediaan bahan makanan Jepang mulai dengan intensif merampas makanan rakyat. Di samping itu Jepang juga mengerahkan seluruh penduduk untuk berladang sampai ke pelosok-pelosok. Rakyat tidak hanya disuruh menanam bahan-bahan makanan, tetapi juga disuruh menanam pohon-pohon jarak. Rakyat menjadi sangat menderita, lebih-lebih karena ada di antara orang Indonesia sendiri yang menjabat *Gunco* sengaja mengambil muka kepada Jepang untuk mengumpulkan padi melebihi target yang ditentukan.

---

*40) Drs.SCT Kansil SH, Drs.Julianto AA., Sejarah Perjuangan Pergerakan Kebangsaan Indonesia,* Erlangga, Jakarta. 1972, halaman 46.

Romusha di daerah Riau kebanyakan didatangkan dari pulau Jawa. Jumlah *romusha* yang pasti tidak dapat diketahui dengan pasti. Tetapi menurut perkiraan tidak kurang dari 100 ribu orang.

*Romusha* yang dianggap Jepang tenaga sukarela itu sebenarnya adalah tenaga kerja paksa yang digunakan untuk keperluan Jepang dalam menghadapi perang.

Di Riau tenaga romusha itu digunakan untuk membuat jalan kereta api dari Pekanbaru melalui Logas menuju Sijunjung di daerah Sumatera Barat. Sepanjang lokasi itu sengaja didirikan bedeng-bedeng tempat pemusatan tenaga-tenaga romusha itu. Dari sana mereka dikerahkan untuk bekerja melebihi batas kemampuan manusia. Akan tetapi tenaga yang mereka keluarkan tidak seimbang dengan jasa yang mereka terima. Makanan yang diberikan sangat sedikit dan kadang-kadang bercampur pula dengan dedak atau pasir. Pada hal mereka disuruh kerja siang malam tak henti-hentinya, berhujan, berpanas di tengah-tengah gigitan nyamuk hutan yang tidak terkira banyaknya. Berhenti sedikit saja cambuk sudah melayang di badan mereka. Biarpun sakit mereka memaksakan diri juga untuk bekerja, sebab yang tidak bekerja tidak berhak mendapat makan. Jangankan untuk mendapat perawatan, makanpun semakin dikurangi jatahnya. Akibatnya beribu-beribu bangsa Indonesia mati yang kelaparan atau karena penyakit yang menyerang.

Banyak juga yang mencoba melarikan diri melalui hutan belantara, akan tetapi sebagian besar dari mereka mati di tengah jalan. Selain fisik mereka yang sudah sangat rusak, seperti kerangka berjalan, ada juga yang mati karena kelaparan atau dimakan binatang buas. Yang berhasil menempuh hutan itu akhirnya juga menjadi gelandangan yang kemudian mati di emper-emper toko, di kaki lima dan di bawah rumah penduduk.

Peristiwa yang tragis itu membuat Logas terkenal sebagai "Neraka Bikinan Jepang". Banyak pula di antara romusha itu yang tewas sewaktu peledakan dinamit. Mereka ada yang jatuh masuk jurang, ada yang terhimpit batu, bahkan ada yang sengaja diledakkan bersama-sama dengan dinamit.

Romusha-romusha lokal disebut *"kinrohosyi"*. Rakyat dari daerah Pasir Pengaraian dan di kerajaan Lima Koto Rokan diwajibkan bekerja untuk pembuatan jalan baru dari Dalu-dalu sampai ke Kota Pinang di Sumatera Utara. Selain itu mereka juga dikerahkan untuk bekerja di lapangan terbang Simpang Ti-

ga Pekanbaru. Sebagian dari mereka dipekerjakan di Rantau Berangin dan Danau Bingkuang untuk membuat jembatan dan ada pula yang dipekerjakan di pabrik kapal di Tampan Pekanbaru.

Di Samping Tiga terdapat sebuah makam perkuburan romusha. Beribu-ribu orang ditanam pada sebidang tanah yang tidak begitu luas. Pada tanggal 10 Nopember 1978 yang lalu di tempat tersebut didirikan sebuah tugu peringatan untuk menghormati dan mengenang arwah mereka.

Tenaga romusha tidak pernah didatangkan dari Kepulauan Riau. Ini mungkin ada hubungannya dengan kebijaksanaan dari Residen G.Yogi yang menyediakan tenaga untuk Hei Ho dan Kai Gun.

Untuk membantu usaha Jepang dalam perang Asia Timur Raya itu Jepang merasa perlu membentuk pasukan militer dari tenaga-tenaga rakyat Indonesia. Keadaan yang sudah mendesak karena kekalahan-kekalahan yang dialami memaksa Jepang untuk membentuk *Gyu Gun*. Pembentukan *Gyu Gun* sudah dimulai di Singapura dan Malaya, kemudian diikuti oleh G.Yogi di kepulauan Riau.

Pada bulan Nopember 1942 dibentuklah *Gyu Tai* di Tanjungpinang. *Gyu Tai* digunakan untuk pasukan pengawal pulau-pulau. Mereka diberi senjata dan dilatih seperti pasukan Jepang di *Syonanto*. Sampai masa akhir pendudukan Jepang jumlah *Gyu Tai* di Kepulauan Riau mencapai 600 orang.

Hubungan antara Komandan Batalyon *Gyu Tai* dengan pimpinan *Gyu Gun* di *Syonanto* dan Malaya terjalin dengan baik. Hal ini terbukti dengan bergabungnya kepala staf *Gyu Gun* Malaya dengan komandan Batalyon Riau yang bernama Mayor Abdul Manaf.

Untuk menjaga keamanan, Jepang juga membentuk suatu badan yang terdiri dari penduduk setempat. Badan keamanan itu bernama *Bo Go Dan*. Di Pekanbaru pasukan *Bo Go Dan* dilatih oleh M.Djamin yang waktu itu menjabat *Keisatsusoco* (Kepala Polisi Wilayah). *Ken Pei ho* juga terbentuk yang anggotanya terdiri dari orang-orang Cina. Di Pekanbaru, Bagansiapi-api dan beberapa tempat lainnya didirikan sekolah-sekolah *Gyu Gun*. Banyak pula di antaranya pemuda-pemuda Riau yang diwajibkan memasuki *Hei Ho* dan *Kai Gun*. Di antara mereka yang mendapat pendidikan ini, ada yang kemudian memegang peranan dalam perang kemerdekaan.

5. *Sikap Bangsa Indonesia terhadap Jepang.*

Seperti sudah diuraikan terdahulu, bahwa kedatangan Jepang mendapat sambutan yang baik dari penduduk Riau. Propaganda Jepang yang menampakkan sikap persaudaraan itu mengena di hati rakyat. Akan tetapi sesudah Jepang membuka kedoknya, timbullah kemudian antipati rakyat. Mulailah rakyat sadar bahwa selama ini mereka tertipu oleh kebodohan mereka sendiri. Rupanya sikap Jepang selama ini adalah siasat belaka. Malah sekarang nasib rakyat seolah-olah lepas dari mulut buaya, jatuh ke mulut singa. Rakyat benar-benar menderita selama dalam kekuasaan militer Jepang itu. Akan tetapi situasi dan kondisi tidak memungkinkan bagi rakyat untuk melawan secara terang-terangan.

Untuk persediaan perang, Jepang berusaha mengumpulkan makanan sebanyak mungkin. Karena itu semua padi diambil secara paksa. Namun rakyat tidak tinggal diam. Dengan secara diam-diam mereka mengadakan perlawanan dengan cara menyembunyikan hasil padinya di hutan-hutan. Sedangkan padi yang hampa diserahkan kepada Jepang.

Di Tembilahan terjadi perlawanan bersenjata terhadap perampasan padi rakyat. Oleh karena rakyat tidak mau menyerahkan padinya, maka Jepang mengirim beberapa orang *junsa* (polisi) ke Parit Enok di Tembilahan untuk menangkap penduduk yang melawan itu. Kedatangan *junsa* itu mendapat perlawanan sehingga menewaskan seorang *junsa*. *Kemudian Jepang mengirim lagi pasukan junsa* yang langsung dipimpin oleh *Ku Co* R. Majid. Perlawanan kali ini dapat menewaskan *Ku Co* dan beberapa *junsa*, sedangkan senjata mereka dapat direbut oleh rakyat. Perlawanan rakyat itu dipimpin oleh Haji Abdul Arif. Akhirnya di bawah pimpinan *Bun Su Co* dan *Kai Sat Suco* kampung Parit Enok dikepung dan rumah-rumah penduduknya dibakar. Melihat tindakan itu rakyat dengan nekad menyerukan "Allahuakbar" lalu menyerbu dengan tekad perang sabil. Karena rakyat hanya bersenjatakan parang, banyak di antara mereka yang jatuh korban.

Selain itu terjadi pula pemberontakan orang Sakai di Mandau di bawah pimpinan Kodai. Jepang mengira pemberontakan itu terjadi karena penangkapan atas diri Datuk Wan Entol, karena itu Datuk Wan Entol dibebaskan, dan kepadanya diminta untuk menghentikan perlawanan suku Sakai itu.

Seperti sudah diuraikan terdahulu, daerah Riau oleh Jepang dibaginya menjadi dua daerah kekuasaan, yaitu Riau Daratan di bawah kekuasaan Angkatan Darat Jepang dan daerah Riau Kepulauan menjadi daerah kekuasaan Angkatan Laut Jepang. Riau Daratan berpusat di kota Pekanbaru dan Riau Kepulauan berpusat di Singapura.

Untuk memperkuat pertahanan Angkatan Daratnya pemerintah Militer Jepang telah berusaha membangun lapangan terbang Simpang Tiga dengan mengorbankan tenaga dan jiwa rakyat Indonesia. Kecuali itu di Tampan Pekanbaru telah dibangun pula pabrik kapal dan senjata. Untuk memudahkan pengangkutan bala tentaranya Jepang telah membangun jalan-jalan baru dari Dalu-dalu ke Kota Pinang di Sumatera Utara, dan jalan kereta api dari Pekanbaru melalui Logas ke Sijunjung di daerah Sumatera Barat.

Selain itu untuk memperkuat Angkatan Laut di kuala-kuala telah dibangun dan diperkuat pertahanannya. Untuk menambah tenaga militernya Jepang telah membentuk pasukan-pasukan *Gyu Gun, Kei Bo Dan, Seinendan, Ken Pei Ho* dan *Gyu Tai di kepulauan.*

Sementara itu Jepang juga memanfaatkan segala potensi yang ada di daerah Riau ini untuk memperkuat pertahanan Jepang dalam menghadapi tentara Sekutu yang semakin mendesak itu. Pertambangan minyak bumi Minas dan Duri yang selama pemerintah Belanda hanya memproduksi minyak mentah, sekarang dijadikan oleh Jepang sebagai industri penghasil solar, bensin dan minyak tanah. Selain itu tambang batu bara Logas Tangko ditingkatkan dan diolah sendiri untuk tanur tinggi yang dikeluarkan melalui pelabuhan Tanjung Rhu Pekanbaru. Karena itu sampai sekarang di Tanjung Rhu masih terdapat sisa-sisa rel kereta api yang digunakan Jepang dalam Perang Dunia II yang lalu. Tambang batu bara itu juga diadakan di Gelugur Rokan, tetapi belum sempat berproduksi Jepang sudah kalah. Perdagangan pun dikuasai oleh Jepang yang disebut Kaisya, yaitu maskapai-maskapai Jepang yang bergerak dalam seluruh lapangan perdagangan dan industri. Untuk memperlancar perdagangan dan keuangan Jepang juga mendirikan bank yang bernama *Shomin Ginko.* Untuk mengganti uang Belanda kemudian Jepang juga mengeluarkan uang kertas sendiri. Tetapi sesudah satu tahun inflasi melaju dengan derasnya. Yang mencetak uang kertas ialah *Butai.*

Keperluan penduduk diurus oleh koperasi Jepang yang bernama *Kumiai.*

Selain itu ada bekas peninggalan Jepang yang sampai saat ini tidak diketahui kegunaannya ialah sejumlah sumur-sumur batu yang terdapat di areal seluas tiga km2 dari Jalan Diponegoro (Hotel Riau) sampai ke Tangkerang Utara dan Selatan.

# BAB V
# PENUTUP

Dalam abad ke-19 pemerintah Kolonial Belanda belum begitu mendalam pengaruhnya di daerah Riau. Semua kerajaan-kerajaan yang ada di daerah ini masih dapat menjalankan pemerintahannya seperti semula.

Pemerintahan Hindia Belanda memberikan *Zelfbestuur* kepada kerajaan-kerajaan di Riau. Raja tidak memerintah secara otokrasi, akan tetapi bersama dengan sebuah Dewan Kerajaan yang mempunyai fungsi penting dalam pemerintahan. Dibandingkan dengan di pulau Jawa, maka kerajaan-kerajaan Melayu lebih bersifat demokratis.

Di Kerajaan Siak pelaksanaan pemerintahan kerajaan diatur menurut ketentuan-ketentuan yang termaktub dalam sebuah kitab pedoman yang bernama *Babul Qawa'ied* yang kemudian dibukukan oleh Sultan Syarif Hasyim pada tahun 1901.

Pada penghujung abad ke-19 pulau Penyengat yang menjadi ibu kota Kerajaan Melayu Riau-Lingga tumbuh menjadi pusat kebudayaan dan pusat pengembangan agama Islam di Riau. Sampai saat ini masih kita temukan bekasnya pada sebuah mesjid yang megah di sana. Di pulau Penyengat terdapat pula sebuah perpustakaan yang penuh berisi kitab-kitab pengetahuan Islam yang merupakan sumbangan dari berbagai negara Islam waktu itu. Sejumlah buku-buku tersebut masih terawat, dan dapat dijadikan objek penelitian yang mendalam oleh para ahli.

Kerajaan Melayu Riau-Lingga pun terkenal sebagai daerah tempat kelahiran seorang pujanggawan Melayu terkenal, Raja Ali Haji yang telah meniggalkan buah tangannya yang tidak ternilai artinya dalam ilmu bahasa, sastra dan sejarah. Dari sejumlah hasil tulisannya yang sampai kepada kita dapat kita ketahui bahwa ia tidak saja berjasa dalam mempertahankan nilai-nilai budaya sendiri, tetapi juga sanggup mengembangkan, menyebar-luaskan serta meneruskan warisan budaya nenek moyang kepada generasi penerusnya. Hal ini terbukti dengan adanya usaha penerbitan kembali oleh sebuah perkumpulan dari kaum bangsawan dan cerdik pandai dari kerajaan Melayu Riau-Lingga yang bernama *Rusydiah Club* yang menurut perkiraan muncul pada tahun 1892 di pulau Penyengat.

Dalam *Traktat London* (1824) telah disetujui pembagian daerah daerah Melayu menjadi daerah kekuasaan Inggris mulai dari pulau Singapura ke Utara, dan daerah kekuasaan kolonial Belanda dari Si-

ngapura ke Selatannya. Sejak itu hubungan kedua daerah yang tadinya satu itu mulai renggang. Belanda melarang penduduk Riau untuk menjual hasilnya ke Singapura atau ke Semenanjung Melayu. Akan tetapi letaknya yang begitu berdekatan, apalagi di perbatasan itu terdapat banyak sekali pulau-pulau, maka perhubungan itu tidak dapat sama sekali diputuskan oleh pemerintah Belanda. Dari daerah Kepulauan Riau mereka menjual ikan, kelapa/kopra, dan dari Daratan Riau mereka menjual hasil-hasil hutan seperti damar, kayu, menyan, gading, rotan dan sebagainya.

Sesudah abad ke-20 pemerintah Hindia Belanda mulai mengarahkan perhatiannya ke daerah Riau. Dengan semakin intensifnya penanaman modal asing, maka daerah Riau dikenakan pengawasan langsung untuk memungkinkan dibukanya usaha-usaha perkebunan maupun pertambangan. Sejalan dengan itu mulailah pemerintah Belanda mengadakan tekanan-tekanan kepada semua kerajaan-kerajaan yang ada di daerah Riau. Pemerintah Belanda mulai menyodorkan perjanjian baik berupa *Lange Contract* maupun *Korte Verklaring*. Akibat tekanan dari pihak Belanda yang unggul dalam kekuatan militer itu, semua kerajaan-kerajaan di Riau, seperti Kerajaan Siak, Kerajaan Pelalawan, Kerajaan Indragiri, Kerajaan Rokan Nan Lima, Kerajaan Gunung Sahilan, Kerajaan Singingi dan Kerajaan-kerajaan kecil lainnya di Kuantan terpaksa menanda tangani perjanjian dengan Belanda. Kerajaan Melayu Riau-Lingga pada tahun 1913 dihapuskan oleh Pemerintah Hindia Belanda.

Dalam abad ke-20 itu terdapat dua macam pemerintahan di daerah Riau, yaitu daerah yang langsung diperintahi oleh pemerintah Hindia Belanda dan daerah yang tidak langsung diperintahi oleh pemerintah Hindia Belanda. Kedua daerah itu disebut dengan istilah *Rechsstreeks Bestuurgebied* dan *Zeltbestuurende Landschappen*.

Sejak itu pengawasan terhadap kerajaan-kerajaan dan semua daerah Riau semakin diperketat. Untuk itu pada semua ibu kota kerajaan di tempatkan seorang *Controleur* yang dapat mengawasi segala tindak tanduk raja maupun rakyat. Mulailah pemerintah sedikit demi sedikit campur tangan dalam urusan-urusan kerajaan. Dan akhirnya raja hanya tinggal sebagai raja boneka yang dipakai sebagai alat untuk mengekalkan kekuasaan kolonial Belanda di bumi Riau ini. Jadi bila dalam abad ke-20 ini di pulau Jawa pemerintah sedang mengadakan perubahan politik barunya yang dinamakan "politik etika" dan pelaksanaan "desentralisasi", maka di daerah Riau perubahan politik itu boleh dikatakan tidak dilaksanakan. Tampaknya pemerintah Belanda bermaksud untuk mempertahankan tata pemerintahan tradisional, akan

tetapi sesungguhnya Belanda hanya ingin meperalat raja beserta staf pemerintahannya guna melaksanakan maksud penjajahannya. Pemerintah Belanda menjalankan pemerintahan di daerah-daerah kerajaan itu secara tidak langsung. Jadi dalam prakteknya raja-raja itu tidak lain adalah pegawai pemerintah Belanda juga.

Sesungguhnya setiap perubahan politik pemerintah Kolonial Belanda disesuaikan dengan politik ekonominya. Untuk menunjang "politik pintu terbuka" pemerintah Belanda mulai mendirikan sekolah-sekolah di Riau. Untuk rakyat biasa didirikan Sekolah Rakyat *(Volkschool)* sampai kelas tiga dan beberapa buah Sekolah Melayu *(Gouvernement Inlandsche School)* sampai kelas lima. Sampai akhir kekuasan Belanda di Riau hanya terdapat dua buah sekolah HIS *(Hollands Inlandsche School)* yaitu di Siak dan di Tanjung Pinang. Sekolah gadis, *Meisjes Scholl* yang terdapat di Taluk baru didirikan pada tahun 1942.

Pemerintah mendirikan sekolah-sekolah bukan untuk mencerdaskan penduduk akan tetapi untuk memproduksi tenaga pegawai rendahan yang dapat dipakai dalam perusahaan-perusahaan asing maupun untuk kepentingan pemerintah sendiri dengan gaji yang sangat rendah.

Karena jumlah sekolah tidak mencukupi, sedangkan keinginan rakyat untuk maju semakin besar, maka beberapa tokoh-tokoh agama dan masyarakat berusaha untuk memenuhi keinginan penduduk itu dengan mendirikan beberapa sekolah swasta yang bersifat agama. Para ulama merasa terpanggil jiwanya akan kewajiban moril maupun kewajiban politik demi kelestarian ajaran Islam yang sedang terancam pengaruh buruk dari Barat. Untuk membendung pengaruh yang merusak tatanan masyarakat itu, kaum ulama bangkit dengan mendirikan beberapa lembaga pendidikan agama maupun perkumpulan-perkumpulan yang bersifat keagamaan. Dalam hal ini *Rusydiah Club* adalah perkumpulan yang tertua di Riau. Meskipun kelihatannya perkumpulan-perkumpulan itu bergerak dalam bidang agama, seni budaya dan juga ekonomi, akan tetapi sebenarnya mereka itu secara diam-diam bergerak menghadapi ekspansi penjajah Belanda. Gerakan menentang penjajahan ini mereka lancarkan dari Singapura.

Karena sebagian besar penduduk Riau penganut agama Islam yang taat, maka tidak mengherankan apabila setiap kegiatan yang berdasarkan kepada agama Islam cepat mendapat tanggapan dari masyarakat di sini. Demikianlah pada dasawarsa kedua abad XX Organisasi Sarikat Islam mendapat sambutan hangat di Riau. Hampir di semua daerah di Riau terdapat perkumpulan-perkumpulan Sarikat Islam. Sehingga perkembangannya yang begitu cepat sangat mengkhawatirkan pemerintah

Belanda. Setiap kegiatan tokoh-tokoh Sarikat Islam selalu menimbulkan kecurigaan pihak Belanda.

Hal ini tidak berarti bahwa organisasi-organisasi politik lainnya tidak ada di daerah Riau. Pada waktu terjadi pemberontakan PKI tahun 1926/1927, di daerah Taluk telah ditangkap beberapa oknum PKI antara lain ialah Jamal Lako Sutan, Tuanku Abdul Thalib dari Kelayang, Datuk Mudo Hasyim dan Datuk Majolelo dari Tapung, serta Buyung Hitam dari Bangkinang. Di antara yang ditangkap itu, Jamal Lako Sutan dibuang oleh pemerintah Belanda ke Digul.

Dalam dasawarsa kedua sampai ketiga daerah Riau terkenal sebagai penghasil karet utama di antara daerah-daerah lainnya di Indonesia. Pemilik pohon karet terbesar adalah dari perkebunan swasta. Kenaikan harga karet akibat permintaan yang semakin meningkat, menyebabkan penduduk Riau berlomba-lomba untuk menanam pohon karet. Dalam persaingan antara perusahaan-perusahaan perkebunan dengan petani-petani karet rakyat, maka pemerintah Belanda selalu bertindak melindungi perusahaan perkebunan swasta. Namun begitu tidak dapat dipungkiri bahwa, penanaman karet membawa pengaruh kepada kehidupan ekonomi rakyat Riau. Di daerah juga terkenal sebagai pengekspor kopra atau kelapa, dan hasil tambang seperti : minyak bumi, bauxit dan timah.

Akibat terjadinya depresi ekonomi dunia tahun 1929 dirasakan juga oleh karet di daerah Riau. Rakyat yang selama ini sempat mengenyam keuntungan dari penanaman karet menjadi gelisah. Pada masa itu timbul pengangguran dan kegelisahan dalam masyarakat. Kehidupan rakyat menjadi bertambah sulit. Pada tahun 1937 pemerintah Belanda mengeluarkan kupon karet dalam usaha membatasi produksi karet. Oleh petani kupon itu kebanyakan dijual lagi kepada saudagar Cina, sehingga yang beruntung dengan adanya sistim kupon adalah pedagang-dagang Cina.

Sesudah terjadi pemberontakan PKI politik pemerintah Belanda berubah menjadi semakin keras. Semua kegiatan politik dilarang. Pada dasawarsa keempat mulailah berkembang di Riau Organisasi Muhammadiah. Organisasi ini terutama bergerak dalam bidang pendidikan, sosial dan agama: Organisasi Muhammadiyah mengadakan dakwah Islam ke mana-mana. Karena Islam yang di bawah Muhammadiah lebih modern, maka hal ini mendapat tantangan dari golongan konservatif. Sehingga waktu itu di Riau terdapat dua golongan yaitu adanya golongan tua (konservatif) dan golongan muda (modern).

Akibat politik keras dari pemerintah Belanda itu banyak tokoh masyarakat yang terjebak "fasal-fasal karet" yang sengaja dibuat oleh pe-

merintah kolonial. Di antaranya H.Muhammad Amin dari Partai Sarikat Islam dan Ajub Syairafi dari Muhammadiah.

Sementara itu pemerintah Hindia Belanda mengadakan *blasting* baru lagi kepada rakyat. Kepada semua orang yang sudah berumur 15 tahun ke atas diwajibkan membayar pajak. Dalam hal ini pemerintah tidak membedakan antara orang yang sudah berpencaharian dan yang tidak bermata pencaharian, semuanya diharuskan membayar pajak. Sedangkan di Bengkalis ada lagi semacam pajak dikenakan kepada barang-barang yang "jejak bumi" (menyentuh bumi). Di daerah Kuantan ada lagi bea ekstra terhadap *Rubber Fonds* dan bermacam-macam pajak yang menambah beban penderitaan rakyat.

Meletusnya Perang Dunia II di Eropa, dimana negeri Belanda diduduki Jerman, mengakibatkan sifat pejabat-pejabat pemerintah Belanda di Riau berubah. Mereka sengaja menyembunyikan keadaan sebenarnya kepada rakyat, namun dari sikap mereka yang sangat berubah itu telah mengundang tanda tanya bagi rakyat. Sementara itu penduduk Riau yang biasa pulang pergi ke Singapura dan Semenanjung Melayu sudah mendengar berita tentang negeri Belanda yang sudah diduduki Jerman dan pemerintahnya yang mengungsi ke negeri Inggris. Kaum cerdik pandaipun mengetahui kejadian itu dari media pers.

Mungkin akibat dari tekanan pemerintah Belanda terhadap pergerakan kebangsaan Indonesia, ditambah sikap pemerintah yang tidak mau perduli akan niat baik dari rakyat, maka rakyat menjadi terpengaruh oleh propaganda Jepang yang dihembuskan secara diam-diam di kalangan masyarakat.

Selain itu perasaan dendam yang terpendam selama ini ingin sekali melihat hancurnya kekuasaan kolonial Belanda yang telah berabad-abad menguasai tanah airnya. Itulah sebabnya maka rakyat cepat meletakkan kepercayaannya kepada Jepang yang pada masa itu sedang tumbuh menjadi negara besar di kawasan Asia.

Setelah Jepang benar-benar berkuasa, barulah rakyat sadar, bahwa persaudaraan yang diteriak-teriakkan Jepang itu hanya merupakan taktik belaka.

Dalam masa pendudukan Jepang daerah Riau dibagi dalam dua kekuasaan yaitu Daerah Riau Daratan *(Riau Syu)* berpusat di Pekanbaru, dan daerah Riau Kepulauan berpusat di Singapura.

Sesudah Jepang dapat menguasai seluruh Riau, maka Jepang mulai menampakkan sifat fasisnya. Hampir semua raja-raja dan sultan-sultan di Riau yang dicurigai ditangkap dan dipenjarakan. Kegiatan-kegiatan politik dilarang, begitu juga dengan pengibaran bendera merah putih.

Setelah Jepang mulai mengalami kekalahan dalam peperangan dengan Sekutu di Lautan Pasifik, maka Jepang mencoba mengubah sikapnya terhadap rakyat Indonesia. Untuk membantu Jepang melawan Sekutu Jepang mulai berlatih pemuda-pemuda Riau dengan membentuk *Gyu Tai* (sama dengan PETA di Jawa). barisan *Bo Go Dan, Hei Ho* dan *Kai Gun.* Di beberapa tempat didirikan sekolah-sekolah militer *Gyu Gun.*

Untuk memperkuat pertahanan, Jepang membangun pelabuhan kapal terbang Simpang Tiga dan membuat jalan kereta api dari Pekanbaru ke Sijunjung melalui Logas. Untuk pembangunan itu Jepang telah mengerahkan tenaga-tenaga *Romusha* baik yang didatangkan dari Jawa maupun dari penduduk Riau sendiri. Pembangunan jalan kereta api dan pelabuhan udara itu telah meninggalkan kenangan yang paling pahit dalam sejarah Riau, karena beribu-ribu rakyat telah menjadi korban kerja paksa tersebut. Peristiwa tragis itu menyebabkan Logas menjadi terkenal sebagai "Neraka Bikinan Jepang".

Kesengsaraan penduduk Riau semakin bertambah akibat perampasan padi rakyat oleh Jepang. Akhirnya rakyat tidak sabar lagi. Mereka mengadakan perlawanan. Yang terkenal adalah perlawanan rakyat di Tembilahan. Dengan menyerukan "Allahuakbar!", mereka nekad melakukan perang sabil melawan tindasan Jepang tersebut. Karena kekuatan yang tidak sebanding banyak rakyat yang mati di ujung senjata Jepang.

## DAFTAR BACAAN


Ahmad Subardjo Djoyoadisuryo, Mr., *Lahirnya Republik Indonesia,* PT Kinta, 1972.

Prof, *Peranan Ide-ide Dalam Pergerakan Kemerdekaan Indonesia,* Idayu Press, Jakarta, 1977.

A.K.Pringgodigdo, S.H, *Sejarah Pergerakan Rakyat Indonesia,* Dian Rakyat , Jakarta 1967.

Arsip Nasional Republik Indonesia, "Surat-surat Perjanjian Antara Kesultanan Riau dengan Pemerintah-pemerintah VOC dan Hindia Belanda 1784-1909, Jakarta 1970.

"Laporan Politik tahun 1837 (Staatkundig Over Ziocht van Nederlandsch Indie, 1837), Jakarta 1971.

Burger, DH, Prof, Dr, Prajudi, Prof, DR, Mr *Sejarah Ekonomis Sosiologis Indonesia,*I, Pradnjaparamita, Djakarta, 1962.

Prajudi Atmosudirdjo, Prof, Dr, Mr, *Sejarah Ekonomis Sosisal Indonesia II,* (Disadur dan dikarang kembali dari buku Burger, DH, Prof, Dr,) Pradnjaparamita, Djakarta, 1970.

B.Nazar Dahlan, Drs., *Sejarah Perekonomian Kotamadya Pekanbaru pada Zaman Purba dan Masa Sekarang,* Kertas Kerja pada Seminar Sejarah Kota Pekanbaru, Universitas Riau, Pekanbaru, 1978.

Datuk Wan Abdul Rachman, *Kota Pekanbaru semenjak tahun 1925,* Kertas Kerja Pada Seminar Sejarah Kota Pekanbaru, Universitas Riau, Pekanbaru, 1978.

Hall, DGE, *Sejarah Asia Tenggara,* Dewan Bahasa dan Pustaka Kuala Lumpur, 1973.

Horrison, Brian, *Asia Tenggara, satu Sejarah Ringkas,* Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur, 1966.

Hans, Kohn, *Nasionalisme, Arti dan Sejarahnya,* terjamahan Mertodipuro, PT Pembangunan, Jakarta, 1976.

H.Soeman Hs., *Pendidikan dan Pengajaran di Pekanbaru,* Kertas Kerja pada Seminar sejarah Kota Pekanbaru, Universitas Riau, Pekanbaru, 1978.

H. Syafei Abdullah, "Mengenang Perjuangan Almarhum H.Muhamad Amin, Perintis Kemerdekaan dari Daerah Riau, *Majalah Canang,* No.VI, Juni, 1978.

Jamal Lako Sultan, "Sejarah Kuantan dan Indragiri", (Manus Krip), 1965.

Kerajaan Siak Sri Indrapura, "Bab-Al Kawaid", Kerajaan 1901.

Kansil, CST, Drs, Julianto SA, Drs, *Sedjarah Perdjuangan Pergerakan Kebangsaan Indonesia,* Erlangga, Djakarta, 1972.

Kahin, George MacTurnan, *Nasionalism and Revolution in Indoneia,*

Cornell University Press, New York, 1961.

Mackie, F. JAC. *Sejarah Pembangunan Ekonomi Dalam Dunia Modern II,* PT Pembangunan, Djakarta, 1963.

MA Effendi BA. *Selayang Pandang Peri Hidup Rakyat di Kepulauan Riau,* Badan Pembina Kesenian Daerah Propinsi Riau, Senopress, 1974.

Mahidin Said, *Rokan, Tuanku Tambusai Berdjuang,* Sri Dharma Padang.

*Majalah Canang No.II,* "Pusaka Nenek Moyang", Senopress, Pekanbaru, 1978.

,No.V, "Pendidikan Tempo Doeloe dan Masa Kini di Riau" Senopress, Pekanbaru, 1978.

No.Perdana,"Sultan Syarif Kasim II, Jadikah Beliau Diangkat Sebagai Pahlawan Nasional ?", Senopress, Pekanbaru, 1978.

Muchtar Lutfi, Drs., Dkk., *Rusydiah Club,* Hasil Suatu Penelitian, Universitas Riau, Pekanbaru, 1976.

Nio Yoe Lan, *Jepang Sepanjang Masa,* PT Kinta, Djakarta, 1962.

Ny.Soejatin Kartowijono, *Perkembangan Pergerakan Wanita Indonesia,* Yayasan Idayu, Jakarta, 1975.

Ryan NY, *Sejarah Semenanjong Tanah Melayu,* terjemahan Daud Bahrum, Oxford University Press, Kuala Lumpur, 1966.

R.Soekmono,Drs, *Pengantar Sejarah Kebudajaan Indonesia III,* Penerbit Nasional Trikarya, Djakarta,1959.

R.Soebrantas Siswanto. "Selintas Pandang Tentang Sejarah Pemerintah dan Sosial Budaya Pekanbaru." Kertas kerja pada seminar sejarah Pekanbaru Universitas Riau, Pekanbaru, 1978.

Schadee, WHM, *Geschei denis van Sumatra's Oostkust van Sumatra,* Institut, terjemahan S.Panjaitan, 1973.

Schwartz, HJEF, *Over den Politieken Ekonomischen Toesdtand van Het Landschap Kwantan*, Indische Taal Land en Volkenkunde, XXXVI, Albrecht & Rusche, Batavia, 1893.

Sarimo Mangunpranoto, Dr, *Pendidikan Sebagai Sistim Perjoangan Kemerdekaan Indonesia*, Yayasan Idayu, Jakarta, 1976.

Sartono Kartodirdjo, et al, *Sejarah Nasional Indonesia* V & VII, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan 1975.

Soekarno, Ir, *Indonesia Menggugat*, Departemen Penerangan Republik Indonesia, Djakarta, 1961.

Susanto Tirtoprodjo, SH, Drs, *Sejarah Pergerakan Nasional Indonesia* PT Pembangunan, Djakarta, 1965.

Suwardi MS, Drs, "Peranan Sungai Indragiri-Kampar-Rokan dalam Sejarah dan Pembangunan," *Majalah Canang No.V*, Senopres, Pekanbaru, 1978.

Slametmulyana, Prof., Dr., *Nasionalisme Sebagai Modal Perjoangan Bangsa Indonesia*, PN Balai Pustaka, I & II, Penerbit Nasional Trikarya, Djakarta, 1968.

Team Penyusunan dan Penulisan Sejarah Riau Universitas Riau Pekanbaru, *Sejarah Riau* Percetakan Riau, Pekanbaru, 1977.

Tenas Effendi dan Nahar Effendi BA. *Lintasan Sejarah Kerajaan Siak Sri Indrapura*, BPKD, Pekanbaru, 1972.

Umar Amin, Drs, dkk., "Inventarisasi Peninggalan Sejarah dalam Daerah Kotamadya Pekanbaru dan Sekitarnya", Suatu Hasil Penilitian Jurusan Sejarah Fakultas Keguruan Universitas Riau, Pekanbaru, 1977.

Van Leur, JC, *Indonesia Trade and Society, Essays in in Asia and Economic History*, Sumur Bandung, 1960.

Vlekke, Benard, HM. *Nusantara (Sedjarah Indonesia)*, Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur, 1967.

Koch, DMG. *Menuju Kemerdekaan, Sedjarah Pergerakan Kebangsaan Indonesia Sampai 1942*, Jajasan Pembangunan, Djakarta, 1951.

Yayasan Gedung-Gedung Bersejarah Jakarta, "45 Tahun sumpah Pemuda", Jakarta, 1972.

# DAFTAR KATA

Adurrachman Muazam Syah 11, 36
Assyaidis Syarif Kasim 11
Amir 81
Al Ahmadiah Press 36, 49
Abdul Rachman Malin Marajo 42
Abdul Rachman 66
Ayub Syarofi 55, 70
Adnan
Abdul Muluk 66
Abdullah Rusyi 70
Abu Bakar Abduh 84
Aminuddin 89
Abbas Saleh 89
Bahasa Melayu 12
Babul Qawa'ied 24, 97
Buyung Hitam 55, 61, 100
Bestuur Hervorming Wet 57
Bajuri 67
B.O.W 74
Bustami 84
Bo Go Dan 93
Datuk Kaya 81
Datuk Empat Suku
Datuk Anis 42
Datuk Simarajo 42
Datuk Mudo Kasim 55, 61
Datuk Majolelo 55, 61
Datuk Singo 62
Datuk Laksamana 24
De Jonge 58, 64
Dr. Abu Hanifah 72, 76
Dr.Ilyas 76
Datuk Wan Entol 90, 94
Ekploitatie Maatschappij Bengkalis 73
Fujiwarakiku 84
Gouvernement Sumatra's Oostkust 11
Groepsgemeenschap Ordonnantie 58
Gubernur Schaklen 64
Gyu Gun 93

Gyu Tai 93
Haji Muhammad Amin 41
Hasan Guru 41
Haji Muhammad 42
Haji Muhammad Amin 41, 55, 56, 60, 67
Haji Jaafar 62, 75
Haji Salaudin 67
Haji Ibrahim 33, 67
Haji Rasyidi 67
Haji Muhammad Isa
Haji Usman
Haji Burhan 84
Haji Ismail Umar 84
Haji Muhammad Nur 84
Haji Abdul Arif 94
Hayat Abdurrachman 67
Indische Bouxit Ekploitatie Maatschappij 73
Ibtidaiyah
Insulindo
Jamal Lako Sutan 42, 55, 61, 70
Kutub Khazanah Marhum Ahmadi 12
Korte Verklaring 2, 11, 19, 30, 39
Kerapatan Tinggi 23
Karet Hitam 64
Karet Putih 64
K.N.I.L 79
Kinrahosyi 92
Kei Bo Dan 95
Kei Pei Ho 95
Kaisya
Laut Natuna 4
Lange Contract 2, 11, 19, 30
Landraad 58
Logas 19
Mathama'atul Riauwiyah 12, 32
Mathama'atul Ahmadiyah 32
Majalah Al Iman 51
Madrasah Taufiqiyah
Madrasatun Nisa 49
Madrasah Islamiah
Medebewind 57
Magistraad Recht 58

Mesjid Raya
Muhammadiyah 70
Musyawaratul Thalibin 67, 69
MIAI 67
Ma'rifat Marjani
Mualimin 75
M. Zen 84
Makino Sazaburo 87
Mayor Abdul Manaf
M.Djamin 93
Nazri 67
Nahdatul Ulama 67
Nederlansch Koninklijk Petroleum Maatschappij 74
Orang Gedang 22, 81
Pulau Penyengat 13, 21
Pancung Alas 23
Persatuan Indonesia Malaya (PIM) 59
Persatuan Muslimin Indonesia (PERMI) 60, 67, 68
Partai Serikat Islam (PSI) 66
PERTI 69, 71
Residentie Riouw en Onderhorigheden 11, 22
Riau Syu 3
Riouw Archipel 3
Raja Ali Haji 49, 52, 56
Raja Ali Tengku Kelana 56
Rusydiah Club 12, 31, 33, 34, 35, 37, 38
Raja Hitam 31, 52
Raja Abdullah 31
Raja Asyah
Riouw Studie Fonds 37
Raja Haji Ahmad 52, 33
Raja Haji Ali 12, 52
Raad van Justitie 58
Rechtstreekbestuurgebeid 20, 28, 57, 98
Rubber Restrictie Dienst 65, 73
Rubber Fonds 73
Riau Syu Sangikai 89
Raden Yusuf SA 89
Romusha 92, 102
Sultan Abdurrahman Muazam Syah 21
Sultan Assaidis Syarif Kasim Abdul Jalil Syaifuddin 22
Sultan Isa Mudayat 11

Sungai Rokan 14
Sungai Siak 14, 17
Sungai Kampar 14, 17
Sungai Indragiri 14, 17
Serikat Dagang Ahmadi 52, 53
Sultan Zainal Mangkat Madiun 39
Sarikat Islam 66
Suman Datuk Magang 42
Sultana Latifah School 44, 49
Staatsgemènten 57
Staatsgewesten 58
System Coupon 65
Sultan Laut Api 66
SIAP 67
Sirajuddin Abbas
Stadswacht 78
Sanade
Syonanto 87
Sultan Kaigi 90
Simpang Tiga
Seinendan
Shounin Ginko 95
Tuanku Abdul Thalib 55, 61, 100
Tsanawiyah 75
Thoha Hanafi 84
Tarempa 84, 85
Toyo 88
Umar Abdullah 49
Umar Amir Husin 69
Umar Usman 84
Wetbook van Strafrecht 60
Wajjahidu Fisabilillah 70
Wan Abdurrachman
Wan Ghalib 89
Yahya Siddiq 49
Zelfbestuurende Landschappen 20, 28, 57, 98

## DAFTAR INFORMAN

1. a. Nama Informan : DJASMAN KARTOSENTONO
   b. Tempat/Tgl. lahir : Bengkalis, 5–11–1924
   c. A l a m a t : Rimba Skampung, Bengkalis.
   d. Jabatan : Kasi Kebudayaan Kandep P dan K Kabupaten Bengkalis.
   e. Aktivitas :
      - Tahun 1939–1945 : Anggota Organisasi Kesenian/Olahraga Bengkalis.
      - Tahun 1945 : Anggota Pelopor Angkatan Pemuda Indonesia (API) yang berdiri tanggal 12–10–1945.
      - Tahun 1946–1949 : Anggota Badan Penyelidik TNI
      - Tahun 1948 : Anggota Pemuda Demokrat.
      - Tahun 1948–1949 : Anggota Ampri (Angkatan Muda Pembaharuan Republik Indonesia).
      - Tahun 1951 : Masuk Anggota PGRI (Sekretaris).
      - Tahun 1955–1958 : Ketua Pemuda Demokrat
      - Tahun 1958–1960 : Wakil Ketua BKSPM (Badan Kerjasama Pemuda Militer), Anggota Front Nasional Pembebasan Irian Barat.
      - Tahun 1958–1962 : Pembantu (wartawan) Riau Pos
      - Tahun 1962–1967 : – Wakil Sekretaris Front Nasional Bengkalis.
        – Utusan Daerah dalam Kongres Pemuda Seluruh Indonesia di Bandung.
        – Ikut Ganefo I
        – Peserta Musyawarah Tani, 1965.
      - Tahun 1962–1971 : Sekretaris PNI Bengkalis.
      - Tahun 1976–1978 : Wakil Ketua KNPI Bengkalis.
2. a. Nama Informan : YAHYA BIN HAJI IBRAHIM
   b. Tempat/Tgl. lahir : Siak Sri Indrapura, 1902
   c. Alamat : Kebun Kapas, Bengkalis.
   d. Jabatan : Anggota DPRD Dati II Bengkalis.
   e. Aktivitas :
      - Tahun 1923 : Kelasi kapal "Diana".
      - Tahun 1925 : Juru Mudi Kapal "Diana"
      - Tahun 1927–1950 : Juragan Kapal.
      - Tahun 1951 : Nakhoda Kapal.
      - Tahun 1952–1957 : Wakil Syahbandar Bengkalis.

- Tahun 1958 : Swadur Pelabuhan Bengkalis.
- Tahun 1960 : Kepala Kantor/Bendaharawan Pool Sandang-Pangan
- Tahun 1971
- sampai sekarang : Anggota DPRD Dati II Bengkalis.

3. a. Nama Informan : ABDULLAH (YONG DULLAH)
   b. Tempat/Tgl. lahir : Senggoro, Bengkalis, 5 April 1905.
   c. Alamat : Jalan Senggore, Bengkalis.
   d. Jabatan : Pensiun Penghulu Senggoro, Bengkalis.
   e. Aktivitas :
      - Tahun 1931–1952 : Menjadi Led.
      - Tahun 1941–1967 : Penghulu Senggoro.
      - Tahun 1967 sampai sekarang : Bertani.

4. a. Nama Informan : HAJI MUHAMMAD
   b. Tempat/Tgl. lahir : Sungai Rawa/11–12–1911.
   c. alamat : Jalan HOS Cokroaminoto, Bengkalis.
   d. Jabatan : Pengusaha Swasta.
   e. Aktivitas :
      - Tahun 1928–1942 : Anggota Riau Cua Sangi Kai. 155
      - Tahun 1945 : Ketua KNPI
      - Tahun 1945 : Pimpinan Badan Perjuangan Rakyat
      - Tahun 1947 : Wakil Ketua Kewedanaan.
      - Tahun 1947 : Kepala Jawatan Penerangan Bengkalis.
      - Februari 1949 : Diangkat jadi Bupati (Sipil) Bengkalis.
      - Mei 1949–Akhir–1949 : Bupati (Militer) Bengkalis.
      - Tahun 1949 : Anggota Staf Komando Daerah Militer Riau Utara.
      - Tahun 1949 : Koordinator Seluruh Pangkalan Grilya Kabupaten Bengkalis.
      - Tahun 1950–1953 : Bupati (Sipil) Bengkalis.
      - Tahun 1950–1953 : Ketua PNI Bengkalis.
      - Tahun 1969–1971 : Ketua PNI Daerah Riau
      - Tahun 1969–1971 : Anggota DPRD Dati I Riau.

5. a. Nama Informan : AZHARI AMIN
   b. Tempat/Tgl. lahir : SIKIJANG (TAPUNG KANAN) 1912
   c. Alamat : Jln Kampar No.36 Pekanbaru
   d. Jabatan : Pensiun Guru Agama SD
   e. Aktivitas :
      - Tahun 1927–1939 : Berada di Malaya, sambil mengikuti

pendidikan agama di Madrasah Masriyah, Bukit Martajam, Penang.

- Tahun 1942 : Guru Agama di Tandun dengan besluit dari Jepang.
- Tahun 1945–1972 : Guru Agama pada SD Pekanbaru

6. a. Nama Informan : DANILSYAH
   b. Tempat/Tgl. lahir : Krui Bengkulen, 27-9-1925
   c. Alamat : Jln Kampar No.70 Pekanbaru.
   d. Jabatan : Pensiun Karyawan PTT.
   e. Aktivitas :
   - Tahun 1943 : Bekerja di PTT (Tushin Kyoku) Bukittinggi.
   - Tahun 1944 : Pindah ke Pekanbaru sebagai Karyawan PTT.
   - Sesudah Proklamasi RI – 1950 : Masuk Anggota Angkatan Bersenjata RI.
   - Tahun 1951–1975 : Kembali sebagai Karyawan PTT sampai pensiun.

7. a. Nama Informan : ABDUL RAB
   b. Tempat/Tgl. lahir : Bagansiapi-api, 1912.
   c. Alamat : Jln Pattimura No.1 Pekanbaru.
   d. Jabatan : Pensiun Kepala Kecamatan.
   e. Aktivitas :
   - Tahun 1928–1930 : Guru Agama di Bagansiapi-api.
   - Tahun 1930–1935 : Pegawai Qhadi di Kerajaan Siak.
   - Tahun 1936–1940 : Guru Agama dan giat dalam Muhammadiah.
   - Tahun 1941 : Masuk Pasukan Sabilillah (Masyumi), bergerak di Rokan.
   - Tahun 1943–1945 : Anggota Cuo Sangi Kai Pekanbaru.
   - Tahun 1945 sampai September 1946 : Membentuk KNIP Bagansiapi-api dengan Ketuanya Suleiman.
   - Februari 1949–1950 Komandan Pangkalan Gerilya di Kubu, berkedudukan di Bagansiapi-api.
   - Tahun 1955–1964 : Camat Selatpanjang.
   - Tahun 1967–1968 : Camat Dumai.

8. a. Nama Informan : RIDWAN THAHER
   b. Tempat/Tgl. lahir : Pekanbaru, 1921.
   c. Alamat : Jln Tg.Batu No.77 Pekanbaru.

d. Jabatan : Pensiun Kantor Departemen Agama Kotamadya Pekanbaru.

e. Aktivitas :

- Tahun 1945 : Anggota Majelis Islam Tinggi (MTT) Pekanbaru.
  Anggota Masyumi.
  Anggota GPII (Gerakan Pemuda Islam Indonesia.
- Tahun 1950–1953 : Anggota DPR/DPD Siak Hulu.
- Tahun 1955–1956 : Anggota DPR/DPD Kotapraja Pekanbaru.
- Tahun 1955 : Utusan ke Kongres Desentralisasi di Bandung.
- Tahun 1958–1962 : Kepala Penerangan Kotamadya Pekanbaru/Kampar.
- Tahun 1958–1964 : Pimpinan HSBI (Himpunan Seni Budaya Islam).
- Tahun 1961 : Wakil Ketua Utusan Daerah Riau ke Kongres Pemuda Seluruh Indonesia di Bandung.
- Tahun 1967–1970 : Kepala Penerangan Agama Kabupaten Bengkalis.
- Tahun 1971 sampai sekarang : Wakil Ketua GUPPI Kotamadya Pekanbaru.
- Tahun 1977 : Ketua Komisariat Golkar Kecamatan Limapuluh, Kepenghuluan Tanjung Rhu.
- Mei 1978 : Anggota Seminiar Sejarah Kota Pekanbaru.

9. a. Nama Informan : DT. ACHMAD YUSUF
   b. Tempat/Tgl. lahir : Siak, tahun 1905.
   c. Alamat : Tampan, Pekanbaru.
   d. Jabatan : Pensiunan Bupati
   e. Aktivitas :
   - Tahun 1927–1932 : Kas Kelrk Kls I di Kerajaan Siak Sri Inderapura.
   - Tahun 1932–1940 : Onderdistricthoofd di Tapung Kanan, kemudian di Teluk Belitung.
   - Tahun 1940–1942 : Districthoofd di Bukit Batu.
   - Tahun 1942–1945 : Gunco di Bengkalis.
   - Tahun 1946 – Desember 1948 : Bupati di Bengkalis.

- Mei 1950 : Walikota Jambi dengan besluit Gubernur Sumatera Tengah (tidak jadi dilaksanakan).
- Tahun 1950–1953 : Walikota Pekanbaru.
- Tahun 1953–1956 : Walikota Pekanbaru.
- Tahun 1953–1956 : Patih di Bengkalis.
- Tahun 1956–1958 : Bupati Indragiri.
- Tahun 1961 : Pensiun.

10. a. Nama Informan : AMIR HAMZAH HS
    b. Tempat/Tgl. lahir : Gunung Tua (Tapanuli Selatan) 1910.
    c. Alamat : Jln Banteng No.31 Pekanbaru.
    d. Jabatan : Pensiun Kepala SD.
    d. Aktivitas :
    - Tahun 1928 : Dengan ijazah Volk Onderwijzen School mulai menjadi guru Sekolah Dasar (SD).
    - Tahun 1944–1945 : Kepala Bogodan di Bengkalis. Pengan-jur pertanian zaman Jepang.
    - Tahun 1967 : Pensiun sebagai Kepala SD Negeri No.2 Bengkalis.

11. a. Nama Informan : SULEIMAN
    b. Tempat/Tgl. lahir : Bagansiapi-api, 1907.
    c. Alamat : Jln Cempaka No.102 Pekanbaru.
    d. Jabatan : Pensiunan Penilik Sekolah. Ketua HKTI (Himpunan Kerukunan Tani Indonesia) Propinsi Riau.
    e. Aktivitas :
    - Tahun 1924 : Tamat Normal School 4 tahun di Pematang Siantar.
    - Nopember 1924–1925 : Guru SD Lanschap di Rantau Bais.
    - Tahun 1925–1934 : Guru Sekolah Governemen di Pasirpangaraian.
    - Tahun 1935 : Kepala Sekolah Pasirpangaraian.
    - Tahun 1944 : Dikirim bersekolah ke Padang Panjang, yaitu sekolah Jo Kiu Sihan Gakko (Sekolah Menengah Guru). Sesudah tamat diangkat menjadi Syi Ga Ku (Penilik Sekolah) di Bagansiapi-api.
    - Akhir 1945 – Juni 1946 : Ketua KNPI Wilayah Bagansiapi-api (Di

samping sebagai Penilik Sekolah).
- Juni 1946 : Dipindahkan ke Selatpanjang, karena dituduh sebagai biang keladi kerusuhan di Bagansiapi-api 13 Maret 1946.
- 2 Juni 1946–1948 : Penilik Sekolah di Selatpanjang. Ketua DPK (Dewan Pemerintahan Kewedanaan).
- Tahun 1947–1948 : Diangkat jadi Wedana Selatpanjang.
- Awal 1949–1951 : Penilik Sekolah di Indragiri
- Tahun 1951–1956 : Penilik Sekolah di Bangkinang
- Tahun 1956–1961 : Penilik Sekolah di Bengkalis
- Tahun 1961–1964 : Penilik Sekolah Kepala di Pekanbaru.

12. a. Nama Informan : ABU BAKAR
    b. Tempat/Tgl. lahir : Padang, Februari 1898.
    c. Alamat : Kampung Rumah Tinggi No.57 Simpang Tiga, Pekanbaru.
    d. Jabatan : Petani.
    e. Aktivitas :
    - Tahun 1921 : Menjadi Polisi Security.
    - Dalam zaman Jepang : Menjadi Pegawai PO
    - Setelah Indonesia merdeka : Menjadi Anggota Militer RI.
    - Tahun 1949–1950 : Pegawai Caltex Pekanbaru.

13. a. Nama Informan : H.MOHD.DJAMIN SUTAN BANDARO
    b. Tempat/Tgl. lahir : Tanjung Ampalu, Kabupaten Sawahlunto – Sijunjung, 1906.
    c. Alamat : Jalan Sumatera Pekanbaru.
    d. Jabatan : Pensiun Ajung Komisaris Besar Polisi (Letkol Pol Purn.)
    e. Aktivitas :
    - Tahun 1924 : Guru Bantu pada Sekolah Rakyat di Sentajo, Kuantan Tengah.
    - Tahun 1926 : Guru Kepala Sekolah Rakyat Koto Rajo (Baserah).
    - Tahun 1928 : Steiger Beambte di Taluk.
    - Tahun 1930 : Hulp Schryver pada kantor tersebut.
    - Tahun 1931 : Criffier Mahkamah Besar Tembilahan.
    - Tahun 1933 : Schrijver Kantor Controleur di Taluk.
    - Tahun 1934 : Schrijver Kantor Asisten Residen di Rengat dan Jaksa Landraad.

- Tahun 1936 : Schrijver Districthoofd di Terempa, merangkap sebagai Cipiery/Huis van Bewaring di Terempa.
- Tahun 1937 : Schrijver Kantor Controleur Pulau Tujuh dan Jaksa Landraad di Terempa.
- Tahun 1940 : Menteri Polisi Detachement Vold Politie Tanjungpinang.
- Tahun 1941 : Menteri Polisi di Selatpanjang.
  Tahun 1943 : Kaisatsushocho (Kepala Polisi Wilayah) Pekanbaru.
- Tahun 1945 : Kepala Polisi di Taluk (setelah RI Merdeka).
- Tahun 1946 : Kepala Polisi Wilayah di Tembilahan.
- Tahun 1947 : Kepala Polisi Wilayah Kabupaten di Pekanbaru.
- Tahun 1948 : Bertugas di Kantor Penilik Kepolisian Sumatra Selatan.
- Tahun 1949 : Kepala Perhubungan dan Pertahanan "Badan Pimpinan Perjuangan Rakyat" (BPPR), Markas Kewedanaan Terawas, Selangit dan Magang.
- Tahun 1952 : Dir. Sek. Kol. Sumatera Tengah.
- Tahun 1958 : Kepala Polisi Kabupaten Maluku Tengah, Ambon.
- Tahun 1960 : Merangkap Kepala Polisi Res Maluku Tengah dan Tenggara.
- Tahun 1961 : Kepolisian Komisariat Riau, Pekanbaru.
- Tahun 1962 : Memajukan Pensiun dengan pangkat Letnan Kolenel.

14. a. Nama Informan : HAJI ABDUL GANIE
    b. Tempat/Tgl. lahir : Gunung Sahilan, Kampar Kiri 7 Januari 1906.
    c. Alamat : Jalan Madura Lama Pekanbaru.
    d. Jabatan :
    e. Aktivitas :
    - Tahun 1918–1922 : Agendaris pada Kantor Chalifah van Kampar Kiri, Gunung Sahilan.
    - Tahun 1923 : Pergi ke Mekah.
    - Tahun 1925–1932 : Partikulir.
    - Tahun 1933–1936 : Kantor Oppassertevens Telefonist di Pekanbaru.

- Tahun 1937–1941 : Cipier v/h Govangeriswezen to Pekanbaru toven Adjusnt Djaksa b/h Magistraatgerecht di Pekanbaru.
- Tahun 1942–1943 : Cranie NPPM di Pekanbaru.
- Tahun 1944–1946 : Kepala Kantor Ukura Sangya Kabushuki Kaisha di Pekanbaru.
- Tahun 1946–1950 : Kepala Keuangan dan Perbekalan TNI Regt.IV.
- Tahun 1951–1952 : Cranie Toko Ansoon di Pekanbaru.
- Tahun 1952–1957 : Cranie Toko Teching di Pekanbaru.
- Tahun 1953–1957 : Sekretaris Chung Hua Chunghui di Pekanbaru.
- Tahun 1957–1958 : Kasir pada Bank Niaga Cabang Pekanbaru di Pekanbaru.
- Tahun 1958–1960 : Wakil Direktur Fa.Kim Kiaw Hang di Pekanbaru.

15. a. Nama Informan : T. ILYAS
    b. Tempat/Tgl. Lahir : Dalu-dalu, 1911
    c. Alamat : Jalan Hang Tuah Pekanbaru.
    d. Jabatan : Pensiunan dengan jabatan setingkat Bupati (Pegawai Tingkat Tatapraja.
    e. Aktivitas :
    - Tahun 1930–1935 : Juru Tulis Kantor Controleur Pasirpengaraian.
    - Tahun 1935–1940 : Ambtenaar Torbeschouking.
    - Tahun 1940–1945 : Zelfbestuur di Tambusai.
    - Tahun 1945–1947 : Camat di Tambusai.
    - Tahun 1948–1952 : Wedana Pasirpengaraian.
    - Tahun 1953–1956 : Walikota kecil Pekanbaru.
    - Tahun 1957 : Patih di Kantor Bupati Pekanbaru.
    - Tahun 1958 : Kepala Kantor Filial Gubernur di Pekanbaru.
    - Tahun 1960–1967 : Bersatu di Kantor Gubernur.
    - Tahun 1967 : Pensiun.

16. a. Nama Informan : SARIAMIN ISMAIL
    b. Tempat/Tgl. lahir : Talu, Sumatera Barat, 31 Juli 1909.
    c. Alamat : Jln Wolter. Mongonsidi No.1 Pekanbaru.
    d. Jabatan : Pensiunan Guru SMA.
    e. Aktivitas :
    - Tahun 1925 : Guru Bantu Meisesvervolkschool Bengkulu.

- Tahun 1926 : Guru Kepala di Sekolah di atas
- Tahun 1927 : Guru Kepala Meiseschool di Matur Sumatera Barat.
- Tahun 1928–1941 : Guru Leershool di Payakumbuh.
- Juli 1941 : Guru Schakelshool (HIS) Kuantan Institut kepunyaan Landschap.
- Tahun 1942 : Guru Kepala Meisesvervolkshcool Taluk dan Guru SMP Taluk pertama di Riau.
- Tahun 1946 : Guru Kepala SKKP Pekanbaru.
- Tahun 1948–1955 : Guru SMA berturut-turut di Pekanbaru, Bengkalis dan Tanjungpinang.
- Tahun 1968 : Pensiun.

*Keahlian di bidang Seni*

Mengarang prosa dan puisi sejak tahun 1926 di koran-koran seperti Persamaan, Radio, Sinar Sumatra, Sumatra Pos (Bahasa Belanda), dan majalah-majalah : Bintang Hindia, Panji Pustaka, Lukisan Dunia, Keutamaan Isteri, dan lain-lain.

Mengarang dan memainkan sandiwara, di antaranya : Harapan Ibu, Malin Kundang, Puti Pajuang Lauik, Sabai Nan Aluih, Panji Semirang, Cinduo Mato dan lain-lain. Dan yang berhubungan dengan Riau ialah Hang Tuah, Rancak di Labuah dan Si Lancang.

Selain itu mengajarkan keterampilan-keterampilan wanita dalam pengabdian masyarakat seperti : merangkai bunga, melukis kain, membatik sutera, sablon, pluset, dan lain-lain.

Hasil-hasil karya seni, yaitu buku-buku terbitan Balai Pustaka.

1. Kalau Tak Untung, tahun 1933,
2. Pengaruh Keadaan, tahun 1937
3. Mengarang buku-buku pelajaran prosa dan puisi Rangkaian Sastra, terbit tahun 1952.

*Pengabdian Pada Masyarakat :*

1. Ketua Jong Islamieten Bond Dames Afdeeling, 1928-1930.
2. Ketua Sarikat Kaum Ibu (SKIS).
3. Anggota Gerakan Ingin Merdeka (GIM) yang bergerak di bawah tanah dari tahun 1930 sampai 1941 di Payakumbuh.
4. Pernah menjadi Anggota DPRD Riau pada tahun 1947-1949.
5. Anggota Pembina Bahasa Indonesia di Pekanbaru.
6. Pendiri Lembaga Studi Sosial Budaya Riau yang baru didirikan 22 Juli 1978.

17. A. Nama Informan : H. MURAD RASYIDI
    b. Tempat/Tgl. lahir : Sapat, tahun 1916
    c. Alamat : Jalan H.Arsyad Ahmad, Tembilahan.
    d. Jabatan : Pedagang
    e. Aktivitas : Waktu Agresi menjadi CPM.

18. a. Nama Informan : SUNIPAHAR
    b. Tempat/Tgl. lahir : Kalimantan, tahun 1924
    c. Alamat : Indragiri
    d. Jabatan : Swasta.
    e. Aktivitas :
    - Tahun 1945 : Anggota Pemuda RI
    - Tahun 1949 : Berhenti dari TNI
    - Tahun 1951 : Mendirikan Organisasi Pelabuhan bernama Gabungan Buruh Angkatan Laut.
    - Tahun 1954 : Ketua Buruh Indragiri Hilir.
    - Tahun 1954–1955 : Ketua PARINDRA Indragiri Hilir.

19. a. Nama Informan : R. AHMAD SALEH
    b. Tempat/Tgl. lahir : Rengat, tahun 1918
    c. Alamat : Rengat.
    d. Jabatan : Pensiunan Kepala SMP.
    e. Aktivitas :
    - Tahun 1935 : Guru SD di Sarasan.
    - Tahun 1941–1942 : Guru Sekolah Sambungan di Lubuk Jambi, dan Rengat
    - Tahun 1951 : Kepala KPKPKB di Rengat.
    - Tahun 1953 : Kepala SGB Negeri di Rengat.
    - Tahun 1964–1971 : Kepala SMP Negeri di Rengat.
    - Tahun 1971 Pensiun. :

20. a. Nama Informan : ABUBAKAR ABDOEH
    b. Tempat/Tgl. lahir : Kelayang, Januari 1919.
    c. Alamat : Rengat.
    d. Jabatan :
    e. Aktivitas :
    - Pegawai Sundenkan dan Pemimpin Surat Kabar Riau Ho Ko (zaman Jepang).
    - Wakil Ketua Komite Nasional Indonesia Daerah Riau.
    - Camat Kelayang (Pasir Penyu).
    - Kepala Jawatan Penerangan Kabupaten Indragiri.
    - Anggota DPRD Kabupaten Inderagiri.
    - Masuk PRRI.

21. a. Nama Informan : MUSFADIL
    b. Tempat/Tgl. lahir : Rengat, 3–3–1893.
    c. Alamat : Kampung Dagang, Rengat.
    d. Jabatan : Pensiunan Camat.
    e. Aktivitas :
       - Zaman Belanda : Pegawai Pemerintah Belanda.
       - Zaman Jepang : Pegawai Pemerintah Jepang.
       - Tahun 1954 : Pensiun sebagai Camat.

22. a. Nama Informan : H. MANAF YACUB
    b. Tempat/Tgl. lahir : Rengat, tahun 1916
    c. Alamat : Rengat.
    d. Jabatan : Pensiunan Kepala Kantor Urusan Agama.
    e. Aktivitas :
       - Tahun 1946–1948 : Kepala Penerangan Agama Islam Kewedanaan Kuantan dan Singingi.
       - Tahun 1968 : Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kuantan Tengah.
       - Tahun 1971 : Pensiunan sebagai Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuantan Tengah.

23. a. Nama Informan : HAJI MOHD. ZEN WAHIDY
    b. Tempat/Tgl. lahir : Kampar, tahun 1927.
    c. Alamat : Ranah Air Tiris – Kampar.
    d. Jabatan : Anggota DPRD Propinsi Riau.
    e. Aktivitas :
       - Tahun 1940–1944 :
         - Ketua Umum Persatuan Murid Madrasah Tarbiyah Islamiyah Padang dan Sekitarnya.
         - Guru Kepala pada Madrasah Tarbiyah Islamiyah Kampung Naumbai, Air Tiris, Kecamatan Kampar.
         - Mendirikan PI Perti Cabang Kabupaten Kampar.
       - Tahun 1945–1950 :
         - Ketua Umum PI Perti Cabang Kabupaten Kampar.
         - Anggota KNI (Komite Nasional Indonesia) di Bangkinang.
         - Kepala Staf Markas Besar LASYMI (Laskar Muslimin Indonesia) Batalyon Kampar di Air Tiris, dengan pangkat Letnan I.

- Anggota MPRK (Markas Pertahanan Rakyat Kewedanaan) di Bangkinang.

- Tahun 1951–1955 :
  - Ketua Umum Komisariat PI Perti Kabupaten Kampar di Air Tiris.
  - Anggota Inside Information Perwakilan Pengurus Besar PI Perti Bukittinggi yang ditugaskan untuk Kabupaten Kampar dan Kabupaten Kepulauan Riau.
  - Pendiri PI Perti di Kabupaten Kepulauan Riau, di Midai Pulau Tujuh.
- Tahun 1956–1960 :
  - Ketua Umum Komisariat PI Perti Kabupaten Kepulauan Riau di Midai Pulau Tujuh.
  - Anggota DPRD-P (Dewan Perwakilan Rakyat-Peralihan) di Tanjungpinang, Kabupaten Kepulauan Riau.
  - Anggota PPD (Panitia Pemilihan Daerah) Kabupaten Kampar di Pekanbaru.
  - Anggota Team Penerangan Riau Kecamatan Kampar yang diperbantukan pada Bintara Ter.Operasi Tegas "A" Vak Kampar di Air Tiris, Kecamatan Kampar.
- Tahun 1961–1965 :
  - Anggota DPRD Kabupaten Kampar.
  - Ketua Umum DPD PI Perti Daerah Propinsi Riau di Pekanbaru.
  - Wakil Ketua Pengurus Daerah Front Nasional (PDFN) Propinsi Riau.
  - Anggota Panitia Perumus Integrasi Pemerintahan Masyarakat Daerah Propinsi Riau.
  - Anggota Musyawarah Panca Tunggal Daerah Propinsi Riau.
  - Anggota DPRD-GR Propinsi Riau di Pekanbaru.
  - Panitia Khusus guna menghadapi persoalan-persoalan Rencana Pola Pembangunan Daerah Kampar.
  - Diangkat menjadi Cabang Perwakilan

dalam pelaksanaan Pembangunan "Universitas Islam Riau" dengan jabatan sebagai anggota untuk Kecamatan Kampar di Air Tiris.
- Seksi Penerangan Dewan Penyantun Fakultas Usuluddin di Bangkinang.

- Tahun 1966–1971 :
- Ketua II Dewan Pimpinan Daerah PI Perti Propinsi Riau di Pekanbaru.
- Ketua Pengadilan Agama (Mahkamah Syar'iyah) Bangkinang.

- Tahun 1971 sampai
- sekarang :
- Anggota DPRD Propinsi Riau di Pekanbaru.
- Anggota Tetap Hakim Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Pekanbaru.
- Wakil Ketua Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Wilayah Riau di Pekanbaru.
- Wakil Ketua Majelis Ulama Propinsi Riau di Pekanbaru.
- Bendahara pada HKTI (Himpunan Kerukunan Tani Indonesia) Propinsi Riau di Pekanbaru.

24. a. Nama Informan : HAJI MUHAMMAD AMIN
b. Tempat/Tgl. lahir : Air Tiris, tahun 1902.
c. Alamat : Pasar Baru Air Tiris, Kecamatan Kampar.
d. Jabatan :
- Pensiunan Asisten Wedana Kecamatan Kampar.
- Pensiunan Perintis Kemerdekaan Republik Indonesia.

e. Aktivitas :
- Tahun 1932 : Mendirikan Partai Muslimin Indonesia, dan menjadi Ketua.
- 14 Maret 1932 : Dituduh Pemerintah Belanda Melanggar UUR Ofrechting Voohsdring, dan dihukum penjara selama 3 bulan.
- 8 November 1932: Dituduh menghina Demang Bangkinang, karenanya dihukum 6 bulan penjara.

- 28 Agustus 1933 : Dituduh menyindir pemerintah Belanda dan dihukum 9 bulan penjara.
- 7 Oktober 1934 : Mendirikan Partai Politik Islam Indonesia dan langsung sebagai Ketua I.
- 28 Juli 1934 : Akan dibuang ke Digul, karenanya ia melarikan diri ke Singapura sampai awal tahun 1942.
- Tahun 1944 : Menjadi Pemimpin Muhammadiyah.
- Tahun 1945 : Ditangkap oleh pemerintah Jepang karena merebut senjata Jepang di Bangkinang. Akhirnya disiksa dan ditahan selama 51 hari. di Pekanbaru.
- Tahun 1945 : Menjabat Ketua KNI Cabang Bangkinang.
  Ketua Umum Pemuda Republik Indonesia Cabang Bangkinang.
- Tahun 1946 : Diangkat sebagai Komandan Pangkalan Gerilya Daerah Kewedanaan Bangkinang dan Ketua Pusat Perbekalan Gerilya.
- Tahun 1947 : Ketua Desentralisasi Bangkinang dan Anggota DPR sampai tahun 1948.

Tahun 1949 : Anggota Dewan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kampar dan melakukan timbang terima dengan Pemerintah Belanda di Pekanbaru.

- Tahunm 1950 : Membina masyarakat dan bekerja sebagai petani dengan tujuan untuk kepentingan bangsa dan agama.
- Tahun 1953 : Asisten Wedana Kecamatan Kampar ibu negerinya Air Tiris.

25. a. Nama Informan : RUSLI THOIMI
    b. Tempat/Tgl. lahir : Pulau Payung, tahun 1906.
    c. Alamat : Pulau Payung Rumbio, Kecamatan Kampar.
    d. Jabatan : Pensiun Perintis Kemerdekaan.
    e. Aktivitas :
    - Tahun 1932 : Sekretaris Partai Muslimin Indonesia (PERMI) di Rumbio.
    - Tahun 1933 : Dipenjarakan di Bangkinang karena terang-terangan melawan Pemerintah Belanda.

Dipenjarakan juga di Suliki (Payakumbuh) selama 3 bulan.

- Tahun 1973 : Menerima besluit pensiunan sebagai Perintis Kemerdekaan dari Riau.

26. a. Nama Informan : AYUB SYAIROFI
    b. Tempat/Tgl. lahir : Pulau Terap, Kuok Bangkinang.
    c. Alamat : Pulau Terap, Kuok Bangkinang.
    d. Jabatan : Pensiunan Perintis Kemerdekaan Indonesia.
    e. Aktivitas :
    - Tahun 1931 : Mengajar di Sekolah Mengaji di Melaya selam 8 tahun.
    - Tahun 1938 : Kembali ke Tanah Air dan mendirikan Muhammadiah.
    - Tahun 1940 : Mengunjungi Konperensi Daerah di Sungai Penuh.
    - Tahun 1940 : Sekembalinya dari Konperensi di Sungai Penuh, ditangkap di Rumbio dipenjarakan selama 104 hari di Bangkinang. Kemudian diadili oleh Landraat sehingga dijatuhi hukuman 2 tahun.
    - Tahun 1942–1945 : Memimpin Muhammadiah di Kuok.
    - Sesudah Proklamasi Menjadi Anggota Komite Nasional Indonesia di Bangkinang.
    - Tahun 1973 : Menerima besluit pensiun sebagai Perintis Kemerdekaan.

27. a. Nama Informan : RAJA MUHAMMAD.
    b. Jabatan : Pensiunan Bupati.

28. a. Nama Informan : SAID HUSIN
    b. Jabatan : Pensiunan dari Kantor Kehutanan.

29. a. Nama Informan : RAJA HAMZAH
    b. Jabatan : Pegawai Kasi Kebudayaan Kab. Kepulauan Riau.

30. a. Nama Informan : T A I B
    b. Jabatan : Pensiunan Penilik Kabupaten.

31. a. Nama Informan : MU HASIBUAN
    b. Jabatan : Anggota DPRD Tk.II Kabupaten Kepulauan Riau.

32. a. Nama Informan : RAJA ABDUL RAZAK
    b. Jabatan : Pensiunan Polri.

33. a. Nama Informan : RAJA CHALID
    b. Jabatan : Pensiunan Kepala Japen Kabupaten Kepulauan Riau.

34. a. Nama Informan : MUCHTAR ZAM
    b. Jabatan : Pegawai Kantor Bupati Kepulauan Riau.

35. a. Nama Informan : SYUFAAT SANGARI
    b. Jabatan : Anggota DPRD Tk.II Kep. Riau.

36. a. Nama Informan : RAJA KHATIJAH
    b. Jabatan : Pensiunan Penilik Kabupaten.

37. a. Nama Informan : R U K I N I.
    b. Jabatan : Pensiunan Pegawai Kandep P dan K Kabupaten.

38. a. Nama Informan : TENGKU AHMAD ATAN.
    b. Jabatan : Bekas Anggota DPR RI.

39. a. Nama Informan : DATUK HARUNSYAH.
    b. Jabatan : Pensiunan Bupati.

40. a. Nama Informan : M. ADNAN KASIM
    b. Jabatan : Pensiunan Polri.

41. a. Nama Informan : HAJI HASYIM
    b. Jabatan : Pensiunan Kantor Kehutanan.

42. a. Nama Informan : MAHIDIN SAID
    b. Jabatan :

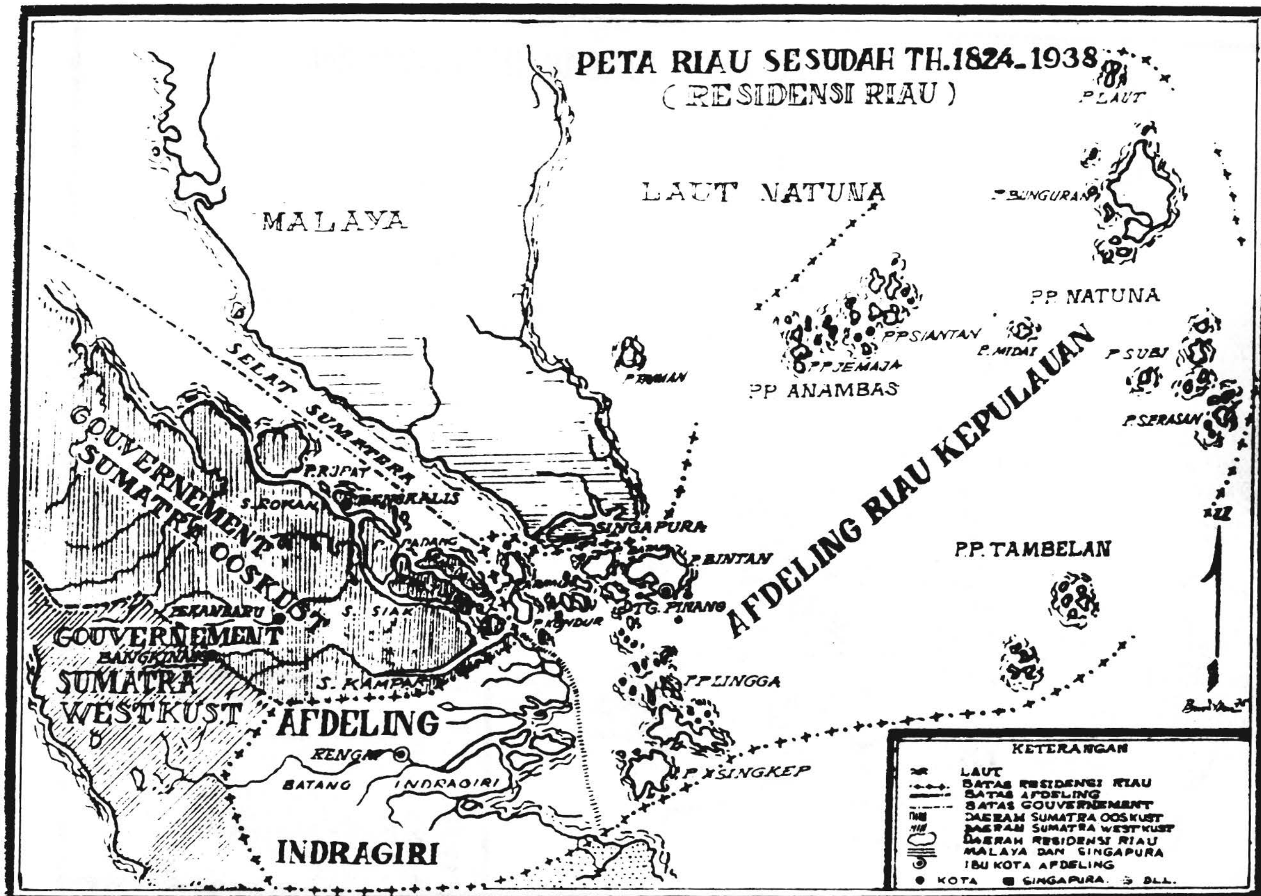
PETA RIAU SESUDAH TH.1824-1938
( RESIDENSI RIAU )
MALAYA
LAUT NATUNA
SELAT SUMATERA
GOUVERNEMENT SUMATRA OOSKUST
GOUVERNEMENT SUMATRA WESTKUST
AFDELING RIAU KEPULAUAN
AFDELING INDRAGIRI
P. LAUT
P. BUNGURAN
PP. NATUNA
PP. SIANTAN
P. MIDAI
PP. JEMAJA
PP. ANAMBAS
P. SUBI
P. SERASAN
PP. TAMBELAN
SINGAPURA
P. BINTAN
TG. PINANG
PP. LINGGA
P. SINGKEP
P. RUPAT
S. ROKAN
BENGKALIS
PADANG
S. SIAK
PEKANBARU
BANGKINANG
S. KAMPAR
RENGAT
BATANG INDRAGIRI
KETERANGAN
LAUT
BATAS RESIDENSI RIAU
BATAS AFDELING
BATAS GOUVERNEMENT
DAERAH SUMATRA OOSKUST
DAERAH SUMATRA WESTKUST
DAERAH RESIDENSI RIAU
MALAYA DAN SINGAPURA
IBU KOTA AFDELING
KOTA
SINGAPURA
DLL.

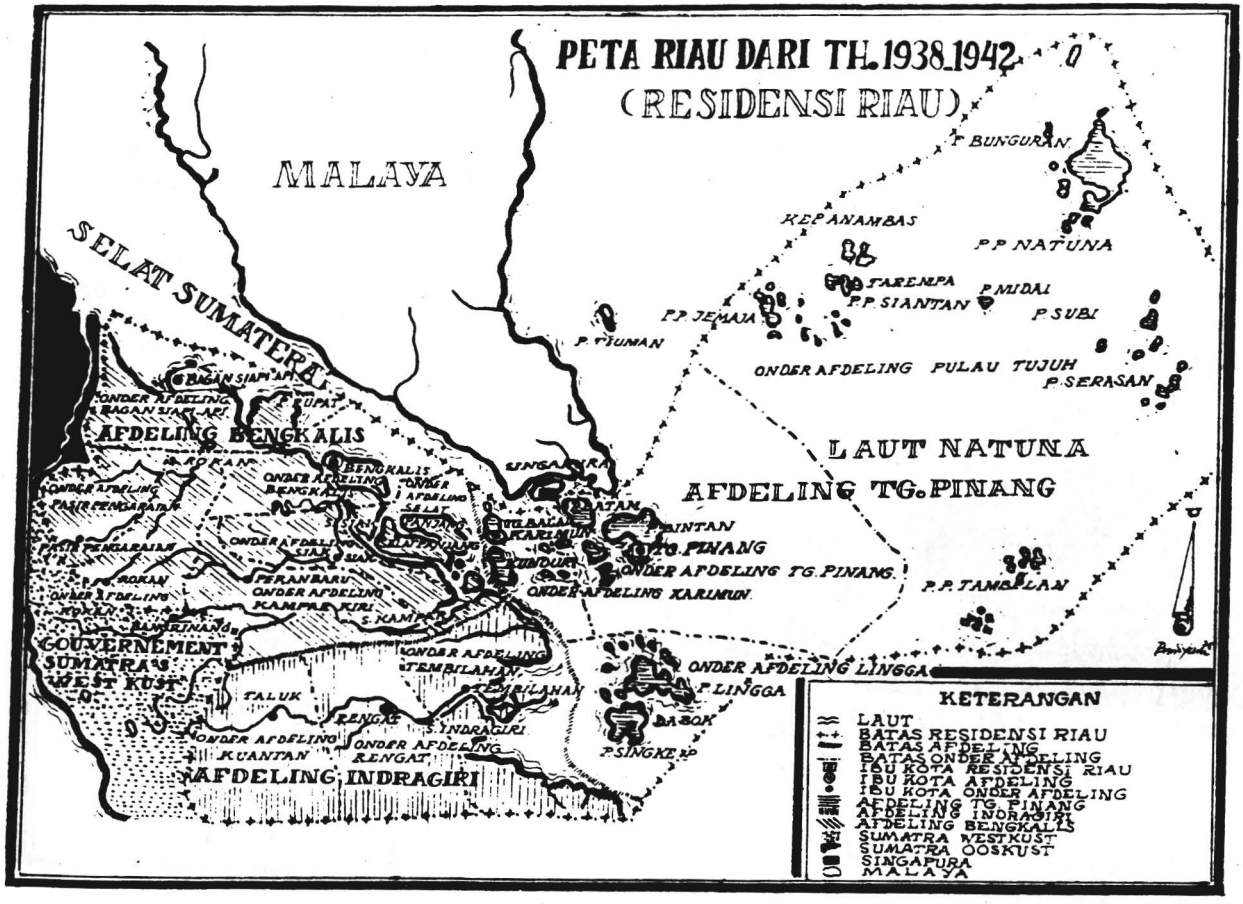
PETA RIAU DARI TH. 1938-1942
(RESIDENSI RIAU)
MALAYA
SELAT SUMATERA
P. BUNGURAN
KEPANAMBAS
P.P. NATUNA
TAREMPA
P.P. SIANTAN
P. MIDAI
P. SUBI
P.P. JEMAJA
P. TIUMAN
ONDER AFDELING PULAU TUJUH
P. SERASAN
LAUT NATUNA
AFDELING TG. PINANG
P.P. TAMBELAN
BAGAN SIAPI-API
ONDER AFDELING BAGAN SIAPI-API
P. RUPAT
AFDELING BENGKALIS
ROKAN
BENGKALIS
ONDER AFDELING BENGKALIS
ONDER AFDELING SELAT PANJANG
SINGAPURA
BATAM
BINTAN
TG. PINANG
ONDER AFDELING TG. PINANG
ONDER AFDELING KARIMUN
KUNDUR
ONDER AFDELING SIAK
PERANBARU
ONDER AFDELING KAMPAR KIRI
S. KAMPAR
ONDER AFDELING PASIR PENGARAIAN
PASIR PENGARAIAN
ROKAN
ONDER AFDELING ROKAN
BANGRINANG
GOUVERNEMENT SUMATRA'S WEST KUST
ONDER AFDELING TEMBILAHAN
TEMBILAHAN
TALUK
RENGAT
S. INDRAGIRI
ONDER AFDELING KUANTAN
ONDER AFDELING RENGAT
AFDELING INDRAGIRI
ONDER AFDELING LINGGA
P. LINGGA
DABOK
P. SINGKEP
KETERANGAN
LAUT
BATAS RESIDENSI RIAU
BATAS AFDELING
BATAS ONDER AFDELING
IBU KOTA RESIDENSI RIAU
IBU KOTA AFDELING
IBU KOTA ONDER AFDELING
AFDELING TG. PINANG
AFDELING INDRAGIRI
AFDELING BENGKALIS
SUMATRA WESTKUST
SUMATRA OOSKUST
SINGAPURA
MALAYA

PERPUSTAKAAN
SEKRETARIAT DIT.JEN.BUD
No. INDUK
TGL. CATAT.

001026.4
G3.2